



Lampiran VII: Peraturan Daerah

Nomor : 4 Tahun 2021

Tanggal : 28 Juli 2021



PEMERINTAH KOTA DENPASAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* maka penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan asas otonomi dan tugas pembantuan tersebut diserahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan juga peran serta masyarakat. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan pemerintah wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat tersebut akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Prinsip *good governance* tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Walikota selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD dari segi manfaat/hasil (*outcome*). Sedangkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD dari segi barang dan/atau jasa yang disediakan (*output*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka kepada daerah-daerah diberikan hak dan wewenang didalam mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya. Dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah setiap tahunnya disusun Anggaran





Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setelah APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut melalui Peraturan Walikota. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Walikota selaku kepala daerah yang memiliki kuasa pengelolaan keuangan daerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah dan Laporan Dana Desa.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020 disusun dengan maksud untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta semua perubahannya serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Selain itu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah dan mengenai perubahan atas posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- d. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- e. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- f. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya;
- g. memenuhi akuntabilitas publik, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Kota Denpasar;
- h. menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektifitas pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana;
- i. menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Transfer, Dana Cadangan, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana, Beban, Saldo Anggaran Lebih dan Arus Kas suatu entitas pelaporan.





1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Kota Denpasar diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 Ayat (2);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 184 Ayat (1) dan (3) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- n. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- p. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 50 Tahun 2017 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Kota Denpasar;
- q. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 80 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;





- r. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 81 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Denpasar

1.3. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Ekuitas dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Adapun sistematika dari penyajian Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
 - 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
 - 1.3. Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan
- Bab II Informasi Umum tentang entitas pelaporan, entitas akuntansi, BLUD dan Perusahaan Daerah
- 2.1. Entitas pelaporan
 - 2.2. Entitas akuntansi
 - 2.3. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
 - 2.4. Perusahaan Daerah
- Bab III Informasi Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- 3.1. Ekonomi makro
 - 3.1.1 Tingkat Kemiskinan
 - 3.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka
 - 3.1.3 Indek Gini (Gini Ratio)
 - 3.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
 - 3.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi
 - 3.1.6 Infasi
 - 3.1.7 Struktur Perekonomian Kota Denpasar
 - 3.2. Kebijakan keuangan
 - 3.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- Bab IV Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- 4.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
 - 4.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- Bab V Kebijakan Akuntansi
- 5.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah.
 - 5.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan LKPD.
 - 5.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan LKPD.
 - 5.4. Ringkasan Penerapan Kebijakan Akuntansi Akun yang Penting Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
 - 5.4.1 Kas dan Setara Kas
 - 5.4.2 Piutang
 - 5.4.3 Persediaan





	5.4.4	Aset Investasi
	5.4.5	Aset Tetap
	5.4.6	Aset Lain-lain
	5.4.7	Pendapatan LRA dan Pendapatan - LO
	5.4.8	Belanja dan Beban
Bab VI		Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
	6.1.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
	6.1.1	Pendapatan Daerah
	6.1.2	Belanja Daerah
	6.1.3	Transfer
	6.1.4	Pembiayaan
	6.1.5	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
	6.2.	Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
	6.2.1	Saldo Anggaran Lebih Awal
	6.2.2	Penggunaan SAL sebagai Penerima Pembiayaan Tahun Berjalan
	6.2.3	Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
	6.2.4	Saldo Anggaran Lebih Akhir
	6.3	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
	6.3.1	Pendapatan
	6.3.2	Beban Operasi
	6.3.3	Beban Transfer
	6.3.4	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional
	6.3.5	Pos Luar Biasa
	6.3.6	Surplus/(Defisit) - LO
	6.4	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
	6.4.1	Ekuitas Awal
	6.4.2	Surplus/(Defisit) - LO
	6.4.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
	6.4.4	Ekuitas Akhir
	6.5	Penjelasan atas Pos-pos Neraca
	6.5.1	Aset
	6.5.2	Kewajiban
	6.5.3	Ekuitas
	6.6	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Arus Kas
	6.6.1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi
	6.6.2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi
	6.6.3	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
	6.6.4	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
	6.6.5	Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas
	6.6.6	Saldo Awal Kas dan Setara Kas
	6.6.7	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas
	6.6.8	Saldo Akhir Kas
Bab VII		Penjelasan atas Informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah
Bab VII		Penutup





BAB II

INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN, ENTITAS AKUNTANSI, BLUD DAN PERUSAHAAN DAERAH

2.1 Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas pelaporan disini adalah Pemerintah Kota Denpasar dan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya.

2.2 Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas akuntansi yang ada pada Pemerintah Kota Denpasar ada sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

2.3 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Pada Pemerintah Kota Denpasar hanya ada satu BLUD yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya yang menyusun laporannya berdasarkan SAK dan SAP.

2.4 Perusahaan Daerah

Pada Pemerintah Kota Denpasar ada 3 (tiga) Perusahaan Daerah yaitu :

- a. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma
- b. Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma
- c. Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma

Ketiga Perusahaan Daerah tersebut menyampaikan laporan keuangannya kepada Pemerintah Kota Denpasar untuk diakomodir pada laporan keuangan Pemerintah Kota Denpasar.





BAB III

INFORMASI EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

3.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2020 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, yaitu (minimal) :

- Tingkat Kemiskinan sebesar 2,14 %
- Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020 sebesar 7,62 %.
- Gini Ratio tahun 2018 sebesar 0,342 %
- Indeks Pembangunan Manusia sebesar 83,93%
- Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar -9,42 %
- Tingkat Inflasi sebesar 0,55%
- Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp 49.583,47 milyar.

3.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Provinsi/Kabupaten/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 3.1 Persentase Penduduk Miskin Kota Denpasar

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/turun (%)
1	Kota (%)	2,10	2,14	1,90
2	Kota (Ribuan Orang)	19,83	20,48	3,28
3	Provinsi (%)	3,79	3,78	(0,01)
4	Nasional (%)	9,22	10,19	0,97
5	Peringkat Provinsi	2	1	1

Sumber Dokumen: BPS Kota Denpasar, BPS Prov Bali dan BPS Indonesia, 2021

Persentase penduduk miskin Kota Denpasar pada Tahun 2019 sebesar 2,10% dan mengalami peningkatan pada Tahun 2020 dimana persentase penduduk miskin meningkat menjadi 2,14% serta diharapkan dapat ditekan pada tahun 2021 sehingga menjadi angka 2,00%. Meskipun persentase penduduk miskin Kota Denpasar tahun 2020 sudah berada di bawah provinsi dan nasional, namun dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang tetap harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.





Tabel 3.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kota Denpasar

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kota	0,29	0,25	(13,79)
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	0,53	0,52	(0,01)
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,50	1,61	0,11
4.	Peringkat Provinsi	5	9	4

Sumber Dokumen: BPS Kota Denpasar, BPS Prov Bali dan BPS Indonesia, 2021

Tabel 3.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kota Denpasar

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kota	0,06	0,05	(16,67)
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,11	0,10	(0,01)
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,36	0,38	0,02
4.	Peringkat Provinsi	8	9	1

Sumber Dokumen: BPS Kota Denpasar, BPS Prov Bali dan BPS Indonesia, 2021

3.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar Tahun 2020 adalah sebesar 7,07%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 3.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/Turun (%)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota (%)	2,22	7,62	5,40
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	1,52	5,63	4,11
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,28	7,07	1,79

Sumber Dokumen: BPS Kota Denpasar, BPS ProvBali dan BPS Indonesia, 2021

Menurut data BPS, tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Denpasar Tahun 2020 menunjukkan angka sebesar 7,62% dimana lebih tinggi dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2019 yang sebesar 2,22%. TPT Kota Denpasar juga lebih tinggi dibandingkan TPT Provinsi Bali yang sebesar 5,63% lebih tinggi dari TPT Nasional yang sebesar 7,07%.

3.1.3 Indek Gini (Gini Ratio)

Indek Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana :





- a. Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- b. Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Realisasi pencapaian Gini Ratio Tahun 2020 sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 3.5 Gini Ratio Kota Denpasar

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/turun (%)
1	Tingkat Kota	-	-	-
2	Tingkat Provinsi	0,366	0,369	0,003
4	Tingkat Nasional	0,382	0,385	0,003
5	Peringkat Provinsi	2	3	(1)

Sumber Dokumen: BPS Kota Denpasar, BPS Prov Bali dan BPS Indonesia, 2021

Pada Tahun 2020, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Propinsi Bali yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,369. Pada tahun 2020, gini ratio provinsi Bali sebesar 0,369 dimana lebih tinggi poin 0,003 jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2019 yang sebesar 0,366 serta lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Nasional sebesar 0,385.

3.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu :

- a. Rendah (< 60)
- b. Sedang ($60 \leq IPM < 70$)
- c. Tinggi ($70 \leq IPM < 80$)
- d. Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, realisasi pencapaian IPM Kota Denpasar Tahun 2020 adalah sebesar 83,93 poin dengan kategori sangat tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.6 Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/turun (%)
1	Kota	83,68	83,93	0,30
2	Provinsi	75,38	75,50	0,16
3	Indonesia/Nasional	71,92	71,94	0,02
4	Peringkat Provinsi	1	1	-

Sumber Dokumen: BPS Kota Denpasar, BPS Prov Bali dan BPS Indonesia, 2021

Realisasi pencapaian IPM Kota Denpasar tahun 2020 adalah sebesar 83,93 poin dimana mengalami kenaikan sebesar 0,30 poin dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 83,68 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (UHH), harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) walaupun terdapat penurunan standar hidup berkaitan dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.





Tabel 3.7 Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kota Denpasar

No	Komponen	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/Turun
1	UHH (Tahun)	74,68	74,82	0,19
2	HLS (Tahun)	13,99	14,00	0,07
3	RLS (Tahun)	11,23	11,47	2,14
4	PNB per kapita (Rp 000)	19,992	19,72	(1,36)

Sumber Dokumen: BPS Prov Bali, 2021

Umur harapan hidup saat lahir (UHH) Kota Denpasar pada tahun 2020 mencapai 74,82 tahun dimana lebih lama 0,14 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah pada tahun 2020 adalah 11,47 tahun dengan harapan lama sekolah 14,00 tahun. Sementara, Standar Hidup PNB per kapita per tahun sebesar Rp19,72 ribu atau menurun Rp0,272 ribu dibandingkan tahun sebelumnya.

IPM di Kota Denpasar pada saat ini berada pada urutan pertama dari sembilan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali dan Provinsi Bali berada pada urutan kelima untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia.

3.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomidiharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 3.8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar

No	Uraian	Kota			Provinsi
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2020
1	PDRB (harga konstan 2010) (Milyard Rp)	34.168,72	36.164,9	32.747,63	147.549,80
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,43	5,84	-9,42	-9,31

Sumber Dokumen: BPS Kota Denpasar, BPS Prov Bali dan BPS Indonesia, 2021

Selama kurun waktu Tahun 2019 - Tahun 2018, perekonomian Kota Denpasar mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,95%. Pada periode Tahun 2018 – Tahun 2019 pertumbuhan perkonomian Kota Denpasar sebesar 5,84% dan sebesar -9,42% pada kurun waktu Tahun 2019 – Tahun 2020. Dalam skala provinsi laju pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar menempati urutan kedelapan dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Bali.

3.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kota Denpasar dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa, maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya, inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*). Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*). Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan.





Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*). kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100 % setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan, dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*), jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Denpasar, Tingkat Inflasi Kota Denpasar Tahun 2020 adalah sebesar 0.55% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.9 Tingkat Inflasi Kota Denpasar

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kota (%)	2,37	0,55	(76,79)
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	-	-	-
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	2,72	1,68	(38,24)
4	Peringkat Provinsi	1	1	-
5	Peringkat Nasional	48	6	42

Sumber Dokumen: BPS Kota Denpasar, BPS Prov Bali dan BPS Indonesia, 2020

Berdasarkan data BPS, tingkat inflasi di Kota Denpasar tahun 2020 menunjukkan angka sebesar 0,55% dimana lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2019 yang sebesar 2,37%. Inflasi Kota Denpasar masih lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Nasional yang sebesar 1,68%.

3.1.7 Struktur Perekonomian Kota Denpasar

Struktur perekonomian Kota Denpasar dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.10 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
(dalam miliar rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	3.452,73	3.594,55	3.498,15
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-
3	Industri Pengolahan	3.190,15	3.448,05	3.259,61
4	Pengadaan Listrik dan Gas	277,70	293,68	266,16
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	122,72	132,55	131,66
6	Konstruksi	5.011,09	5.639,69	5.505,25
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.800,29	5.281,85	4.950,46
8	Transportasi dan Pergudangan	1.530,05	1.669,27	1.365,32
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14.715,05	15.623,87	10.563,60
10	Informasi dan Komunikasi	2.219,89	2.458,74	2.636,46
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.973,60	3.204,14	3.034,83
12	Real Estate	2.040,07	2.159,32	2.191,67
13	Jasa Perusahaan	957,72	1.017,18	981,34
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.406,19	2.641,33	2.728,76
15	Jasa Pendidikan	5.742,14	6.243,25	6.315,24
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.182,18	1.297,50	1.382,19
17	Jasa Lainnya	753,21	830,10	772,77
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	51.374,78	55.535,05	49.583,47
19	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas	51.374,78	55.535,05	49.583,47
20	PDRB Provinsi	233.636,77	252.138,88	224.214,11

Sumber Dokumen: BPS Kota Denpasar, BPS Prov Bali dan BPS Indonesia, 2021





3.2 Kebijakan Keuangan

Dalam proses pembangunan dan perkembangan perekonomian di daerah, pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui APBD, memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah. Oleh karena itu, proses penyusunan APBD semaksimal mungkin harus dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan dan belanja daerah. Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik.

Oleh karena itu, disiplin dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran merupakan hal penting agar anggaran tersebut dapat berfungsi sebagaimana diharapkan yaitu (1) dalam konteks kebijakan anggaran, memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat; (2) untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian; (3) sebagai sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal dalam suatu daerah.

Pembangunan di Kota Denpasar dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan umum anggaran dan pendapatan serta Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang memuat berbagai strategi dan prioritas pembangunan yang dilaksanakan dan disesuaikan dengan situasi maupun kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat yang tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*expectation gap*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan atau antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi.

Adanya *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di dunia, khususnya di Kota Denpasar yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan kerugian material bahkan korban jiwa dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Dimana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah dinyatakan sebagai *Pandemic* oleh *World Health Organization (WHO)* pada tanggal 11 Maret 2020. Dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19* diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Serta diperlukan adanya respon tanggap dari Pemerintah untuk melindungi kesehatan dan keselamatan jiwa.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, beberapa kebijakan keuangan yang ditempuh antara lain:

a. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Dalam upaya mengoptimalkan pendapatan daerah ada beberapa kebijakan umum pendapatan daerah pada Rancangan APBD maupun yang ada pada Perubahan APBD Kota Denpasar sebagai berikut:

- 1) Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
- 2) Penggalan potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan, terutama diluar Pajak dan retribusi Daerah;





- 3) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan system informasi yang berbasis teknologi informasi;
- 4) Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar Perangkat Daerah yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
- 5) Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
- 6) Meningkatkan partisipasi dan peranan pihak ketiga penyediaan biaya pembangunan daerah
- 7) Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan Pajak dilakukan dengan memaksimalkan objek pajak.

Berkaitan dengan upaya optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam jangka pendek dilakukan melalui intensifikasi terhadap obyek atas sumber pendapatan daerah yang ada melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dukungan teknologi informasi secara terpadu sangat dibutuhkan guna meningkatkan kecepatan dan ketepatan serta memudahkan menemukan hambatan sehingga mempercepat penanganannya.

b. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hasil tersebut bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya.

Kebijakan umum Belanja Daerah adalah dalam rangka memenuhi beban pengeluaran atas Belanja Tidak Langsung yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah dan Belanja Tak Terduga. Pengarahan porsi Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL) sesuai dengan kebijakan nasional seperti tertuang dalam Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan mengutamakan pencapaian hasil melalui program dan kegiatan (Belanja Langsung) daripada Belanja Tidak Langsung. Walaupun sulit mencapai komposisi Belanja Langsung lebih besar daripada Belanja Tidak Langsung, Pemerintah Kota Denpasar tetap berupaya mengutamakan pencapaian hasil melalui berbagai program pembangunan yang menyentuh langsung pada masyarakat sesuai kebutuhannya. Alokasi anggaran belanja tahun 2020 difokuskan untuk penanganan *COVID-19*, anggaran untuk belanja tidak terduga mendapat tambahan yang sangat besar begitu pula untuk alokasi belanja bantuan sosial.

c. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

- 1) kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah Berupa Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diprediksikan dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain - lain pendapatan daerah yang sah, sisa penghematan belanja atau akibat lainnya kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan. Penerimaan pembiayaan diupayakan berasal dari jenis penerimaan yang tidak membebani daerah;
- 2) Pengeluaran pembiayaan diupayakan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah serta memenuhi kewajiban daerah yang segera harus dipenuhi;





- 3) Pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan pembayaran hutang yang harus diselesaikan.

Adanya pandemi *COVID-19* menyebabkan Kota Denpasar melakukan beberapa kali *refocusing* anggaran yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.11 *Refocusing* APBD Tahun 2020

Tanggal	Peraturan Walikota	Pendapatan	Belanja	Pembiayaan
18 Maret 2020	Perwali No. 19 Tahun 2020	2.216.180.686.830,62	2.431.260.686.830,62	215.080.000.000,00
1 April 2020	Perwali No. 26 Tahun 2020	2.216.180.686.830,62	2.431.260.686.830,62	215.080.000.000,00
9 April 2020	Perwali No. 27 Tahun 2020	2.216.180.686.830,62	2.431.260.686.830,62	215.080.000.000,00
4 Mei 2020	Perwali No. 31 Tahun 2020	1.696.286.435.982,61	2.177.013.325.379,42	480.726.889.396,81
23 Juni 2020	Perwali No. 36 Tahun 2020	1.706.286.435.982,61	2.187.013.325.379,42	480.726.889.396,81
30 Juli 2020	Perwali No. 43 Tahun 2020	1.710.096.435.982,61	2.190.823.325.379,42	480.726.889.396,81
23 Oktober 2020	Perwali No. 57 Tahun 2020	1.887.428.059.246,12	2.120.729.132.375,13	233.301.073.129,01
18 Nopember 2020	Perwali No. 61 Tahun 2020	1.940.379.129.246,12	2.173.680.202.375,13	233.301.073.129,01
22 Desember 2020	Perwali No. 74 Tahun 2020	1.947.478.202.444,12	2.180.779.275.573,13	233.301.073.129,01

3.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Perkembangan komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD semakin menunjukkan peranan PAD yang semakin signifikan terhadap APBD. Oleh karenanya dalam Tahun Anggaran 2020 kebijakan dan kegiatan lebih diprioritaskan ke arah peningkatan komponen PAD dan Dana Perimbangan.

Hal tersebut penting mengingat pendanaan belanja daerah sangat tergantung pada keberhasilan merealisasikan komponen-komponen pendanaan tersebut, sehingga kebijakan dan kegiatan seperti penertiban perijinan, pembangunan infrastruktur pelayanan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang konsisten dan berkelanjutan akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap APBD. Hal ini dapat terjadi karena penertiban perijinan, pembangunan infrastruktur pelayanan dan penegakan peraturan perundang-undangan secara langsung akan berdampak pada peningkatan PAD.

Proyeksi APBD untuk tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12 Proyeksi APBD untuk Tahun 2019 dan 2020

No.	Uraian	APBD TA 2019	APBD TA 2020	Bertambah/ Berkurang	%
1	Pendapatan Daerah	2.188.089.007.589,62	1.947.478.202.444,12	(240.610.805.145,50)	(11,00)
1.1	PAD	950.190.475.024,54	654.920.213.449,58	(295.270.261.574,96)	(31,07)
1.2	Dana Perimbangan	916.945.551.544,00	853.287.029.452,00	(63.658.522.092,00)	(6,94)
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	320.952.981.021,08	439.270.959.542,54	118.317.978.521,46	36,86
	Jumlah Pendapatan	2.188.089.007.589,62	1.947.478.202.444,12	(240.610.805.145,50)	(11,00)
2	Belanja Daerah	2.487.294.595.541,49	2.180.779.275.573,13	(306.515.319.968,36)	(12,32)
2.1	Belanja Tidak langsung	1.195.547.910.202,79	1.274.652.516.935,90	79.104.606.733,11	6,62
2.2	Belanja Langsung	1.291.746.685.338,70	906.126.758.637,23	(385.619.926.701,47)	(29,85)
	Jumlah Belanja	2.487.294.595.541,49	2.180.779.275.573,13	(306.515.319.968,36)	(12,32)
	Surplus/(Defisit)	(299.205.587.951,87)	(233.301.073.129,01)	65.904.514.822,86	(22,03)
3	Pembiayaan Daerah	299.205.587.951,87	233.301.073.129,01	(65.904.514.822,86)	(22,03)
3.1	Penerimaan Pembiayaan	323.367.373.097,87	237.423.789.571,01	(85.943.583.526,86)	(26,58)
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	24.161.785.146,00	4.122.716.442,00	(20.039.068.704,00)	(82,94)
	Pembiayaan Netto	299.205.587.951,87	233.301.073.129,01	(65.904.514.822,86)	(22,03)





BAB IV

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Tujuan strategis yang terkait dengan pengukuran kinerja keuangan adalah bermakna bahwa Pemerintah Kota Denpasar hendak meningkatkan kemandirian daerah dalam membiayai seluruh kebutuhan belanjanya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan tingkat kemandirian yang tinggi pada akhirnya dapat menekan/mengurangi ketergantungan pada pemerintah vertikal, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Berdasarkan tujuan tersebut maka ditetapkan strategi pencapaian tujuan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

a. Ikhtisar Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pada bagian pendapatan terjadi kenaikan dari target yang ditetapkan setelah perubahan yaitu sebesar Rp1.947.478.202.444,12 terealisasi sebesar Rp1.964.054.093.227,60 atau 100,85%. Dari sisi belanja dan transfer, terdapat efisiensi pengeluaran sebesar Rp296.226.163.726,52 yaitu dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp2.180.779.275.573,13 terealisasi sebesar Rp1.884.553.111.846,61 atau 86,42%. Akibat dari jumlah realisasi belanja dan transfer lebih kecil dari realisasi pendapatan maka pada tahun 2020 Pemerintah Kota Denpasar mengalami surplus sebesar Rp79.500.981.380,99.

Sementara realisasi pembiayaan netto Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp233.301.073.129,01 atau 100% dari anggaran sebesar Rp233.301.073.129,01. Pelampauan anggaran pendapatan dan efisiensi belanja serta pembiayaan menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp312.802.054.510,00. Saldo SILPA ini akan memberikan fleksibilitas pengelolaan APBD untuk tahun mendatang.

b. Ikhtisar Dana Tugas Pembantuan di Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020

Untuk tahun anggaran 2020, Pemerintah Kota Denpasar tidak mengelola Dana Tugas Pembantuan.

c. Ikhtisar Dana Desa di Kota Denpasar Tahun 2020

Dana Desa di Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020 dikelola oleh 27 desa dengan realisasinya sebagai berikut:

Tabel 4.1 Ikhtisar Dana Desa Tahun 2020

No.	Nama Desa	Dana Desa Diterima di Kas Desa			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Total
1	Dauh Puri Kangin	416.505.600,00	412.182.800,00	201.768.600,00	1.030.457.000,00
2	Dauh Puri Kauh	547.318.400,00	542.995.600,00	267.175.000,00	1.357.489.000,00
3	Dauh Puri Kelod	388.059.200,00	383.736.400,00	187.545.400,00	959.341.000,00
4	Padangsambian Kaja	511.647.600,00	507.324.800,00	249.339.600,00	1.268.312.000,00
5	Padangsambian Kelod	499.150.800,00	494.828.000,00	243.091.200,00	1.237.070.000,00
6	Pemecutan Kelod	694.444.400,00	690.121.600,00	340.738.000,00	1.725.304.000,00
7	Tegal Harum	469.627.600,00	465.304.800,00	228.329.600,00	1.163.262.000,00
8	Tegal Kertha	647.644.000,00	643.321.200,00	317.337.800,00	1.608.303.000,00
9	Pemogan	710.728.800,00	706.406.000,00	348.880.200,00	1.766.015.000,00
10	Sanur Kaja	418.193.600,00	413.870.800,00	202.612.600,00	1.034.677.000,00





No.	Nama Desa	Dana Desa Diterima di Kas Desa			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Total
11	Sanur Kauh	440.910.400,00	436.587.600,00	213.971.000,00	1.091.469.000,00
12	Sidakarya	510.953.600,00	506.630.800,00	248.992.600,00	1.266.577.000,00
13	Dangin Puri Kelod	615.468.800,00	611.146.000,00	301.250.200,00	1.527.865.000,00
14	Kesiman Kertalangu	590.163.600,00	585.840.800,00	288.597.600,00	1.464.602.000,00
15	Kesiman Petilan	542.796.800,00	538.474.000,00	264.914.200,00	1.346.185.000,00
16	Penatih Dangin Puri	491.195.600,00	486.872.800,00	239.113.600,00	1.217.182.000,00
17	Sumerta Kaja	479.139.200,00	474.816.400,00	233.085.400,00	1.187.041.000,00
18	Sumerta Kauh	408.986.000,00	404.663.200,00	198.008.800,00	1.011.658.000,00
19	Sumerta Kelod	509.756.400,00	505.433.600,00	248.394.000,00	1.263.584.000,00
20	Dangin Puri Kaja	505.656.000,00	501.333.200,00	246.343.800,00	1.253.333.000,00
21	Dangin Puri Kangin	436.022.400,00	431.699.600,00	211.527.000,00	1.079.249.000,00
22	Dangin Puri Kauh	428.391.600,00	424.068.800,00	207.711.600,00	1.060.172.000,00
23	Dauh Puri Kaja	582.526.400,00	578.203.600,00	284.779.000,00	1.445.509.000,00
24	Peguyangan Kaja	516.188.000,00	511.865.200,00	251.609.800,00	1.279.663.000,00
25	Peguyangan Kangin	736.583.200,00	732.260.400,00	361.807.400,00	1.830.651.000,00
26	Pemecutan Kaja	1.119.474.000,00	1.115.151.200,00	553.252.800,00	2.787.878.000,00
27	Ubung Kaja	547.824.000,00	543.501.200,00	267.427.800,00	1.358.753.000,00
Jumlah		14.765.356.000,00	14.648.640.400,00	7.207.604.600,00	36.621.601.000,00

d. Ikhtisar Dana BOS Tahun 2020

Dana BOS di Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020 dikelola oleh SD dan SMP. Adapun realisasinya sebagai berikut:

Tabel 4.2 Ikhtisar Dana BOS Tahun 2020

No.	Sekolah	Saldo Awal 1 Januari 2020	Penerimaan BOS	Pengeluaran BOS	Saldo Akhir Kas BOS 31 Desember 2020
1	Sekolah Dasar (SD) Negeri	3.169.134.115,72	5.200.407.6211,74	48.467.765.680,81	6.705.444.646,65
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri	3.478.973.800,88	15.094.767.342,17	13.908.240.926,00	4.665.500.217,05
Jumlah		6.648.107.916,60	67.098.843.553,91	62.376.006.606,81	11.370.944.863,70

4.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 serta dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, mengalami beberapa kendala terutama dalam *refocusing* anggaran karena adanya pandemic *COVID-19* yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan di Pemerintah Kota Denpasar tahun 2020. Akan tetapi dalam beberapa kali *refocusing* anggaran tersebut, dari target yang ditetapkan terealisasi sebesar 100,85% untuk pendapatan dan 86,42% untuk belanja dan transfer. Sedangkan dalam merealisasikan belanja daerah tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan skala prioritas dalam pembelanjaan daerah terutama untuk penanganan *COVID 19*. Kebijakan Pembangunan daerah Kota Denpasar pada tahun 2020 bertema “Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Adapun strategi pokok yang dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah, yaitu:

- Peningkatan produktivitas sumber daya manusia, kualitas tenaga kerja, dan kemampuan penguasaan teknologi;
- Pengembangan pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam (hayati darat-laut, mineral, energi alam) dan pengembangan lahan;





- c. Pengembangan institusi ekonomi yang mendukung peningkatan kegiatan produksi, keberdayaan ekonomi rakyat, dan daya saing perekonomian daerah;
- d. Peningkatan penyediaan infrastruktur antar wilayah (jaringan jalan raya, transportasi laut dan udara, jalan dan infrastruktur kawasan (jalan, air bersih, waduk, irigasi, sanitasi, drainase, pengolahan sampah, tenaga listrik, dan telekomunikasi);
- e. Peningkatan kegiatan investasi di sektor produksi (sektor riil) untuk mengurangi pengangguran terbuka dan meningkatkan jaminan lapangan kerja penduduk yang bekerja;
- f. Peningkatan integrasi ekonomi antar daerah melalui penguatan jaringan ekonomi antar daerah.

Dalam mensukseskan pembangunan Kota Denpasar, prioritas pembangunan daerah Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas SDM yang didukung pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
- b. Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas;
- c. Membangun ekosistem ekonomi kreatif yang kondusif untuk menumbuhkan kembangkan wirausaha;
- d. Memantapkan pembangunan pariwisata berbasis budaya;
- e. Memantapkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.





BAB V KEBIJAKAN AKUNTANSI

5.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan umumnya mempunyai ciri-ciri:

- a. Entitas dibiayai oleh APBD;
- b. Entitas dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau dipilih oleh rakyat;

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar merupakan konsolidasian dari laporan keuangan SKPD yang ada pada Pemerintah Kota Denpasar.

5.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPD Pemerintah Kota Denpasar tahun 2020 adalah:

- a. Basis Kas (*Cash Basis*)
Basis Kas (*Cash Basis*) adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis Kas (*Cash Basis*) digunakan untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas (LAK).
- b. Basis Akrual (*Accrual Basis*)
Basis Akrual (*Accrual Basis*) adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis Akrual digunakan dalam penyusunan Neraca, LO, LP-SAL, dan LPE.

5.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan LKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu kedalam rupiah.

5.4. Ringkasan Penerapan Kebijakan Akuntansi Akun yang Penting Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

5.4.1. Kas dan Setara Kas

a. Definisi

Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.





Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, mendefinisikan setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

b. Klasifikasi

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- 1) saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
- 2) setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

c. Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

d. Penyajian

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

e. Pengungkapan

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rincian kas dan setara kas;
- 2) Kebijakan manajemen setara kas; dan
- 3) Informasi lainnya yang dianggap penting.

5.4.2. Piutang

a. Definisi

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Semua standar akuntansi menempatkan piutang sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.





Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

b. Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

1) Pungutan

Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:

- a) Piutang Pajak Daerah Pemerintah Provinsi;
- b) Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kota;
- c) Piutang Retribusi;
- d) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

2) Perikatan

Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:

- a) Pemberian Pinjaman;
- b) Penjualan;
- c) Kemitraan;
- d) Pemberian fasilitas.

3) Transfer antar Pemerintah

Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:

- a) Piutang Dana Bagi Hasil;
- b) Piutang Dana Alokasi Umum;
- c) Piutang Dana Alokasi Khusus;
- d) Piutang Dana Otonomi Khusus;
- e) Piutang Transfer Lainnya;
- f) Piutang Bagi Hasil;
- g) Piutang Transfer Antar Daerah;
- h) Piutang Kelebihan Transfer.

4) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas:

- a) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
- b) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

c. Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.

Piutang dapat diakui ketika:

- 1) diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- 2) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- 3) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian





fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- 1) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- 2) jumlah piutang dapat diukur;
- 3) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- 4) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) atau hak untuk menagih diakui pada saat pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran kepada Pemerintah Pusat yang belum melakukan pembayaran.

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

- 1) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
- 2) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian pemerintah daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Secara normal tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagi hasil telah ditransfer. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi pemda yang bersangkutan.

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan





yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.

Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

d. Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- 1) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- 2) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- 3) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

1) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee*





dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

2) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

3) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

4) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- 1) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- 2) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
- 3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Penghapusan Piutang

- 1) Penghapusan Piutang dikenal dengan dua cara yaitu penghapusan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan daerah kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang:
 - a) Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang daerah dari pembukuan pemerintah daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah atau yang dikenal dengan penghapusbukuan (*write down*).
 - b) Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih daerah atau yang dikenal dengan penghapustagihan (*write-off*).
- 2) Secara akuntansi, penghapusbukuan piutang (*write down*) merupakan proses untuk pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel* agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Tujuan hapusbuku adalah menampilkan aset





yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

- 3) Tata cara penghapusan piutang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - a) Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang antara lain mengatur Tata cara penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Neraca/Daerah yang antara lain menegaskan bahwa Piutang Negara/Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah, kecuali mengenai Piutang Negara/Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang.

Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah-LO dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah-LRA tergantung dari jenis piutang.

e. Penilaian

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Pengelolaan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- 1) Kualitas Piutang Lancar;
- 2) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- 3) Kualitas Piutang Diragukan;
- 4) Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

- 1) Pajak Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
- 2) Pajak Ditetapkan oleh Walikota (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - c) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.





- 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - c) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- 3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang di atas 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- 4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Walikota (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - c) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - d) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - c) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- 3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang di atas 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- 4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang untuk objek retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Kualitas Lancar, jika umur piutang sampai dengan 1 bulan;
- 2) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 1 sampai dengan 3 bulan;
- 3) Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 3 sampai dengan 12 bulan;
- 4) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan kualitas piutang selain Piutang Pajak dan Piutang Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- 2) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- 3) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- 4) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.





Dalam hal Surat Tagihan Pertama, Surat Tagihan Kedua, dan Surat Tagihan Ketiga belum diterapkan, maka kualitas piutang selain Piutang Pajak dan Piutang Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas Lancar, jika umur piutang sampai dengan 1 bulan;
- 2) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 1 sampai dengan 3 bulan;
- 3) Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 3 sampai dengan 12 bulan;
- 4) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penyisihan Piutang, ditetapkan sebesar:

- 1) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
- 2) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar;
- 3) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 4) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pada tanggal pelaporan berikutnya pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

f. Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- 1) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- 2) Penjelasan atas penyelesaian piutang;
- 3) Jaminan atau sita jaminan jika ada;
- 4) Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, jumlah debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.





5.4.3. Persediaan

a. Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

b. Klasifikasi

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- 2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.
- 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
- 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah obat, bahan pakai habis, hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- 5) Persediaan dalam kondisi rusak, usang, hilang, atau kadaluarsa (*expired*), sambil menunggu keputusan penghapusan direklas ke asset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

c. Pengakuan

1) Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

2) Pengakuan Beban Persediaan

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan asset dan pendekatan beban.

Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan asset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga (*buffer stock*). Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit/puskesmas, persediaan bahan bangunan di Dinas PU.

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode.

3) Selisih Persediaan

Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, rusak, atau kesalahan pencatatan.

Selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal jika nilai selisih paling tinggi sebesar 25% dari nilai persediaan menurut





catatan atau laporan persediaan akhir periode pelaporan, dan terhadap selisih kurang persediaan ini diperlakukan sebagai beban lain-lain dalam laporan operasional, dan sebaliknya jika terdapat selisih lebih diakui sebagai lain-lain PAD yang sah-LO.

Selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal jika nilai selisih di atas 25% dari nilai persediaan menurut catatan atau laporan persediaan akhir periode pelaporan, dan selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian dalam Laporan Operasional.

d. Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian termasuk pajak, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti pengembangbiakan, donasi, hibah atau rampasan.
Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar set atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*), atau harga pasar setelah dikurangi biaya untuk menjual.

Dalam hal terjadi fluktuasi biaya perolehan persediaan, maka persediaan dinilai dengan menggunakan harga terakhir yang diperoleh untuk setiap jenis persediaan sesuai dengan jumlah persediaan akhir berdasarkan catatan persediaan dan/atau hasil perhitungan fisik.

e. Sistem Pencatatan Persediaan

Persediaan dicatat dengan metode perpetual atau metode periodik.

1) Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat, seperti persediaan obat-obatan di Rumah Sakit, Puskesmas, dan Dinas Kesehatan, dan bahan material untuk pemeliharaan aset tetap di Dinas PU. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan dengan kewajiban melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada setiap akhir periode pelaporan. Metode perpetual diterapkan untuk persediaan dengan kode akun 1.1.7.02 “persediaan bahan/material” sebagaimana kode akun yang disajikan dalam Lampiran III Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

2) Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, seperti





persediaan ATK di SKPD. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. Metode periodik diterapkan untuk jenis persediaan selain yang diterapkan dalam metode perpetual sebagaimana disebutkan di atas.

f. Penyajian

Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Sedangkan persediaan yang rusak atau kadaluarsa (*expired*) namun belum dihapuskan disajikan dalam aset lain-lain didukung dengan berita acara reklasifikasi.

g. Pengungkapan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan:

- 1) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- 2) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak, usang, hilang, atau kadaluarsa (*expired*).

5.4.4. Aset Investasi

a. Definisi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

b. Klasifikasi

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Pos-pos investasi menurut PSAP Berbasis AkruaI Nomor 06 tentang investasi antara lain:

1) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal pelaporan.

2) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:





- a) Investasi Jangka Panjang Nonpermanen
Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
 - b) Investasi Jangka Panjang Permanen
Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.
- b. Pengakuan
- Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:
- 1) memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
 - 2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).
- Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasijangka pendek di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan mencatat pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerahdi debit dan perubahan SAL di kredit.
- c. Pengukuran
- Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis.
- 1) Pengukuran investasi jangka pendek:
 - a) Investasi dalam bentuk surat berharga:
 - (1) Apabila terdapat nilai perolehan, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 - (2) Apabila tidak terdapat biaya perolehan, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
 - b) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.
 - 2) Pengukuran investasi jangka panjang:
 - a) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - b) Investasi nonpermanen selain dana bergulir:
 - (1) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - (2) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - (3) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.





- 3) Investasi nonpermanen dalam bentuk dana bergulir dinilai:
- a) Dana bergulir dengan kelola sendiri:
- (1) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - (c) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (d) Penerima dana kooperatif.
- (2) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (d) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
- (3) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (d) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
- (4) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan/atau
 - (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (d) Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
 - (e) Penerima dana mengalami musibah (*force majeure*).
- b) Dana bergulir dengan *executing agency*:
- (1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
- (2) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
 - (b) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (c) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut; dan/atau
 - (d) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya mengalami musibah (*force majeure*).
- c) Dana bergulir dengan *chanelling agency*
- (1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.





- (2) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
- (3) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
- (4) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (d) Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (e) Penerima dana bergulir mengalami musibah (*forcemajeure*).

Besaran Penyisihan dana bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

- 1) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
- 2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
- 3) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 4) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

d. Metode Penilaian Investasi

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1) Metode biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk





saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- 4) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- 1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- 2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- 3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
- 4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

e. Penyajian di Laporan Keuangan

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen.

f. Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
- 2) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- 3) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- 4) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- 5) Perubahan pos investasi.

5.4.5. Aset Tetap

a. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, disewakan, atau dimaksudkan untuk digunakan





dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

b. Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai termasuk aset tetap renovasi.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan/konstruksi namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

c. Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1) berwujud;

2) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;

3) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

4) tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga dalam operasi normal entitas;

5) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan atau disewakan;





- 6) merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- 7) memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

d. Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.

1) Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, perencanaan, pengawasan, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian/perolehan.

2) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

3) Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

4) Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos





semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas asset yang dilepas.

5) Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

6) Kapitalisasi Aset Tetap

Kriteria batasan minimal jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

Tabel 5.1 Batasan Minimal Jumlah Biaya Aset Tetap

No Urut	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Besar Darat	100.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	500.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	500.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	500.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	500.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	500.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	500.000
2.9	Alat Keamanan	500.000
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	20.000.000
3.2	Bangunan Monumen	20.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	20.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	20.000.000
4.3	Instalasi	500.000
4.4	Jaringan	500.000
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/	500.000
5.3	Kebudayaan/Olahraga	500.000
	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a. Hewan	
	b. Ternak	
	c. Tumbuhan Pohon	
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	20.000.000
	e. Aset Tetap Renovasi	
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	20.000.000

Khusus aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, *Master Plan*, dan sejenisnya, tidak ada nilai kapitalisasinya yang berarti seluruh nilainya masuk sebagai bagian dari aset tetap yang akan dibangun yang disajikan dalam Konstruksi Dalam





Pengerjaan (KDP). Uang muka dan/atau termin pembayaran pekerjaan konstruksi dicatat dalam KDP sebesar progress fisik sampai akhir periode pelaporan dan selisih yang timbul dengan jumlah uang yang sudah dibayarkan diakui sebagai uang muka atau hutang belanja dalam neraca.

7) Pengeluaran setelah perolehan awal

Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:

- (1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
- (2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
- (3) bertambah volume, dan/atau
- (4) bertambah kapasitas produksi.

b) Nilai pengeluaran memenuhi kriteria batasan minimal jumlah biaya (*capitalization thresholds*).

c) Tidak termasuk pemeliharaan yang sifatnya hanya untuk mengembalikan agar aset tetap yang dipelihara dapat berfungsi seperti semula.

d) Jika terjadi pergantian komponen/bagian aset tetap yang dipelihara, maka komponen/bagian aset tetap yang diganti dikeluarkan dari nilai aset tetap dan dituangkan dalam berita acara.

8) Penambahan masa manfaat

Terhadap pemeliharaan aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 tersebut di atas, maka penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi.

e. Pengungkapan

Aset Tetap disajikan sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) harus diungkapkan pula:

1) Dasar penilaian yang digunakan

2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis aset tetap yang menunjukkan:

- a) Penambahan;
- b) Pelepasan;
- c) Mutasi lainnya.

3) Kebijakan kapitalisasi dan penyusutan.

5.4.6. Aset Lain-lain

a. Definisi

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.





Dari sekian banyak aset lainnya tersebut, terdapat beberapa aset yang hanya menjadi kewenangan PPKD dan beberapa lainnya menjadi kewenangan Perangkat Daerah.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:

- 1) Tagihan Jangka Panjang;
- 2) Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan
- 3) Aset lain-lain.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:

- 1) Aset Tak Berwujud; dan
- 2) Aset lain-lain

b. Pengakuan

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

1) Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

a) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah.

b) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

a) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

b) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

c) Bangun Guna Serah - BGS (*Build, Operate, Transfer - BOT*)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagukannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh





masing-masing pihak. BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

d) Bangun Serah Guna - BSG (*Build, Transfer, Operate - BTO*)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

e) Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

(1) *Goodwill*

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

(2) Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

(3) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

(4) *Software*

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.

(5) Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan





Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

- (6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
- (7) Aset Tak Berwujud Lainnya
Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.
- (8) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan
Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset - work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.
Sesuai diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:
 - (a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
 - (b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- (9) Aset Lain-Lain
Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

c. Pengukuran

- 1) Tagihan Jangka Panjang
 - a) Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- 2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - a) Sewa
Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - b) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)
Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.





- c) Bangun Guna Serah - BGS (*Build, Operate, Transfer - BOT*)
BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
 - d) Bangun Serah Guna - BSG (*Build, Transfer, Operate - BTO*)
BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
- 3) Aset Tidak Berwujud
- Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.
- Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:
- a) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
 - b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - (1) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - (2) biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - (3) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
- Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
- a) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
 - b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
 - c) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
- Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
- 4) Aset Lain-lain
- Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.
- 5) Amortisasi
- Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.





Amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus selama 5 tahun tanpa nilai sisa. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

d. Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) besaran dan rincian aset lainnya;
- 2) kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
- 3) kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
- 4) informasi lainnya yang penting.

5.4.7. Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

a. Definisi

Pendapatan terdiri dari Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 2) Pendapatan Transfer
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

b. Pengakuan

Pendapatan LO diakui pada saat:

- 1) timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
- 2) pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

- 1) diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
- 2) diterima oleh SKPD yang menerapkan PPK BLUD setelah adanya pengesahan dari PPKD.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur pendapatan atau penerimaan maka pengakuan Pendapatan-LO atau Pendapatan-LRA dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternatif:

- 1) Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu (*official assessment*), dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan-LO diakui ketika dokumen penetapan beserta kelengkapannya tersebut telah disahkan/ditandatangani oleh pejabat berwenang sehubungan pekerjaan jasa telah dilaksanakan atau barang telah diserahkan. Pendapatan-LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan dan diterima di kas daerah.
- 2) Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*selfassessment*) dan





dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan.

- a) Pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika uang diterima di kas daerah dari wajib pajak.
 - b) Jika saat penelitian/pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar (SKPKB) yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO, dan jika ditemukan lebih bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar (SKPLB) yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO jika laporan keuangan belum diterbitkan, dan koreksi ke LPE dan akun ekuitas jika laporan keuangan telah diterbitkan. Sedangkan pendapatan-LRA diakui ketika uang diterima di kas daerah.
- 3) Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan-LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
 - 4) Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu, maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA diakui pada saat pembayaran telah diterima di kas daerah.
 - 5) Jika pada akhir tahun terdapat penerimaan yang masih ada di Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Kasir Penerimaan, atau Juru Pungut, akan dicatat sebagai Kas di Bendahara Penerimaan dan Pendapatan-LO.
 - 6) Khusus pendapatan-LO pada SKPD yang menerapkan PPK BLUD seperti Rumah Sakit diakui pada saat pasien sudah mendapatkan pelayanan, dengan ketentuan jika pasien menggunakan jaminan kesehatan maka besarnya pendapatan-LO dan piutang disesuaikan dengan hasil verifikasi penjamin sampai batas waktu penerbitan laporan keuangan, dan jika laporan keuangan telah diterbitkan, diakui sebagai koreksi surplus (defisit) tahun lalu pada LPE dan akun ekuitas.
 - 7) Hibah aset non kas diakui sebagai Pendapatan-LO ketika barang/jasa telah diterima disertai dokumen hibah seperti berita acara serah terima barang/jasa atau naskah hibah telah ditandatangani kedua belah pihak, jika dokumen hibah belum ditandatangani cukup diungkapkan dalam CaLK.
 - 8) Pendapatan Transfer-LO baik dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir periode pelaporan jika kas yang diterima di kas daerah kurang dari yang seharusnya sesuai penetapan definitif oleh pejabat yang berwenang diakui sebagai piutang transfer dan pendapatan transfer-LO.
- c. Pengukuran
- 1) Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.





- 3) Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 4) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- 5) Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- 6) Hibah aset tetap yang tidak diketahui nilainya, diukur dengan menggunakan nilai wajar atau harga taksiran aset tetap sejenis.

d. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

- 1) penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- 2) penjelasan mengenai hibah aset tetap;
- 3) penjelasan jika terdapat realisasi pendapatan-LRA yang tidak dianggarkan dalam APBD;
- 4) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
- 5) informasi lainnya yang dianggap perlu.

5.4.8. Belanja dan Beban

a. Definisi

Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

- 1) Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain seperti beban tak terduga.
- 2) Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
- 3) Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah, belanja dinas pemerintah provinsi dan lembaga teknis daerah.





Sedangkan, berdasarkan PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional (LO), beban hanya diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban.

b. Pengakuan

Beban diakui pada saat:

1) Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah (LS) atas kas di Bendahara Pengeluaran (UP/GU). Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik, atau adanya hutang belanja non modal seperti hutang insentif pajak dan retribusi daerah dan hutang jasa pelayanan.

2) Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah seperti pemakaian persediaan.

3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan, penyusutan, atau amortisasi.

Belanja diakui pada saat:

1) Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan SP2D untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS).

2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (uang persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban pengeluaran disahkan oleh pengguna anggaran dan penerbitan SP2D atas pemakaian uang persediaan (GU/Nihil) atau diterimanya SPJ Fungsional oleh BUD/Kuasa BUD.

3) Dalam hal BLUD, belanja diakui pada saat adanya pengesahan belanja oleh PPKD.

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:

1) Metode pendekatan beban

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin seperti keperluan sehari-hari perkantoran. Dengan pendekatan beban, maka sisa persediaan akhir berdasarkan perhitungan fisik (*stock opname*), diakui sebagai pengurang beban yang bersangkutan. Metode pendekatan beban diterapkan selain yang diterapkan dalam metode pendekatan aset di bawah ini.

2) Metode pendekatan aset

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai penambah persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga jaga (*buffer stock*). Dengan pendekatan aset, maka beban diakui pada saat terjadinya pemakaian persediaan berdasarkan bukti pengeluaran atau pemakaian barang persediaan. Metode pendekatan aset diterapkan untuk persediaan dengan kode akun 1.1.7.02 “persediaan bahan/material” dan beban dengan kode akun 9.1.2.02 “beban persediaan bahan/material” sebagaimana kode akun disajikan dalam Lampiran III Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah.





c. Pengukuran

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan baik yang telah dibayar maupun telah menimbulkan kewajiban. Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS) dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran menggunakan uang persediaan setelah mendapatkan pengesahan dari fungsi perbendaharaan.

d. Penyajian

Beban disajikan dalam Laporan Operasional sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung.





BAB VI PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

6.1. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

6.1.1. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah dalam Tahun Anggaran 2020 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.947.478.202.444,12 terealisasi sebesar Rp1.964.054.093.227,60 atau 100,85%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah TA 2019 sebesar Rp2.193.530.987.449,51 mengalami penurunan pendapatan sebesar Rp229.476.894.221,91 karena adanya pandemi *COVID-19*. Adapun penjelasan secara rinci dari Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

A. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Asli Daerah pada TA 2020 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp654.920.213.449,58 telah direalisasikan sebesar Rp731.261.280.905,53 atau 111,66%. Sedangkan realisasi TA 2019 adalah sebesar Rp1.010.779.481.697,88. Adapun perbandingan Pendapatan Asli Daerah TA 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No.	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019
1	Pendapatan Pajak Daerah	448.400.000.000,00	489.692.369.902,61	109,21	800.355.727.648,55
2	Pendapatan Retribusi Daerah	28.775.868.000,00	29.183.790.708,00	101,42	33.161.961.523,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	56.725.345.449,58	56.572.597.030,60	99,73	45.521.727.968,30
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	121.019.000.000,00	155.812.523.264,32	128,75	131.740.064.558,03
Jumlah		654.920.213.449,58	731.261.280.905,53	111,66	1.010.779.481.697,88

Penjelasan angka realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara terperinci adalah sebagai berikut:

1) Pajak Daerah

Pajak Daerah dalam TA 2020 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp448.400.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp489.692.369.902,61 atau 109,21%. Sedangkan realisasi TA 2019 adalah sebesar Rp800.355.727.648,55. Pendapatan dari Pajak Daerah terdiri Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Parkir, BPHTB dan PBB. Adapun perbandingan Pendapatan dari Pajak Daerah dalam TA 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.2 Realisasi Pajak Daerah

No.	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019
1	Pajak Hotel	52.000.000.000,00	54.218.559.520,56	104,27	199.524.196.145,96
2	Pajak Restoran	80.500.000.000,00	93.202.955.815,85	115,78	158.752.914.495,08
3	Pajak Hiburan	8.900.000.000,00	9.851.415.929,86	110,69	24.564.636.356,50





No.	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019
4	Pajak Reklame	1.000.000.000,00	1.298.703.432,34	129,87	1.919.389.280,01
5	Pajak Penerangan Jalan	97.000.000.000,00	96.917.837.846,00	99,92	95.535.189.555,00
6	Pajak Air Tanah	7.000.000.000,00	6.526.130.535,00	93,23	10.805.827.177,00
7	Pajak Parkir	5.000.000.000,00	6.021.814.507,00	120,44	8.735.069.224,00
8	BPHTB	115.000.000.000,00	127.839.597.907,00	111,16	193.002.709.077,00
9	PBB-P2	82.000.000.000,00	93.815.354.409,00	114,41	107.515.796.338,00
Jumlah		448.400.000.000,00	489.692.369.902,61	109,21	800.355.727.648,55

Kelebihan/kekurangan realisasi dibandingkan anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Realisasi Pajak Hotel lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran karena adanya integrasi data antara Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mengetahui permohonan perijinan baru atas hotel sehingga menjadi potensi wajib pajak hotel baru serta adanya optimalisasi monitoring dan evaluasi alat *tapping box* dan *cash register online* kepada wajib pajak untuk menghindari kebocoran dan manipulasi penerimaan pajak hotel oleh wajib pajak;
- Realisasi Pajak Restoran lebih besar dibandingkan dengan target anggaran disamping karena adanya integrasi data antara Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mengetahui permohonan perijinan baru atas restoran sehingga menjadi potensi wajib pajak restoran baru serta adanya optimalisasi monitoring dan evaluasi alat *tapping box* dan *cash register online* kepada wajib pajak untuk menghindari kebocoran dan manipulasi penerimaan pajak restoran oleh wajib pajak;
- Pajak Hiburan realisasinya lebih besar dari target yang ditetapkan karena adanya proses validasi dan penagihan terhadap piutang pajak reklame secara bertahap dan berkesinambungan kepada wajib pajak daerah Kota Denpasar;
- Realisasi Pajak Reklame lebih tinggi dari yang ditargetkan karena meningkatnya kesadaran pengguna jasa pemasangan reklame untuk membayar pajak;
- Realisasi Pajak Penerangan Jalan lebih rendah dari yang ditargetkan karena berkurangnya tingkat pemakaian listrik pada akomodasi pariwisata di Kota Denpasar sehubungan dengan Pandemi *COVID-19*;
- Realisasi Pajak Air Tanah lebih rendah dari yang ditargetkan karena adanya usaha-usaha yang menjadi wajib pajak air tanah yang tutup atau tidak beroperasi maksimal selama kondisi pandemi;
- Realisasi Pajak Parkir lebih tinggi dari yang ditargetkan karena meningkatnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak parkir;
- Realisasi BPHTB lebih tinggi dari anggarannya, dikarenakan masyarakat banyak menjual tanah akibat Pandemi *COVID-19*;
- Realisasi PBB lebih besar dari anggaran, karena adanya kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Denpasar untuk mengetahui potensi penerbitan sertifikat baru serta pemecahan tanah atau lahan baru sebagai dasar penambahan wajib pajak PBB-P2 serta adanya kebijakan perpanjangan pembayaran PBB-P2 sampai 31 Desember 2020 tanpa dikenakan sanksi denda untuk SPPT yang terbit tahun 2020 sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Pendapatan pajak daerah selama tahun 2020 akibat pandemi *COVID-19* ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan





penerimaan pajak daerah tahun 2019 yaitu sebesar 38,82% dimana penerimaan pajak daerah tahun 2020 sebesar Rp489.692.369.902,61 dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah tahun 2019 sebesar Rp800.355.727.648,55. Meskipun dari target yang ditetapkan selama tahun 2020 sudah bisa tercapai sesuai target.

2) **Retribusi Daerah**

Retribusi Daerah pada TA 2020 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp28.775.868.000,00 dan realisasi penerimaan sebesar Rp29.183.790.708,00 atau 101,42%. Sedangkan realisasi TA 2019 adalah sebesar Rp33.161.961.523,00. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Adapun perbandingan Pendapatan dari Retribusi Daerah dalam TA 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.3 Realisasi Retribusi Daerah

No.	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019
	Pendapatan Retribusi	28.775.868.000,00	29.183.790.708,00	101,42	33.161.961.523,00
A.	Retribusi Jasa Umum	15.028.880.000,00	9.693.813.750,00	64,50	10.969.463.300,00
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.250.000.000,00	2.897.203.100,00	128,76	4.977.696.500,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.	2.500.000.000,00	2.937.065.000,00	117,48	2.845.258.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	7.000.000.000,00	0,00	-	0,00
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	3.244.880.000,00	3.767.679.000,00	116,11	3.124.995.000,00
5	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	34.000.000,00	91.866.650,00	270,20	21.513.800,00
B.	Retribusi Jasa Usaha	1.450.138.000,00	1.398.752.551,00	96,46	1.510.742.746,00
1	Retribusi Terminal	1.195.138.000,00	1.135.082.551,00	94,98	1.136.462.746,00
2	Retribusi Rumah Potong Hewan	255.000.000,00	263.670.000,00	103,40	374.280.000,00
C.	Retribusi Perizinan Tertentu	12.296.850.000,00	18.091.224.407,000	147,12	20.681.755.477,00
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	8.250.000.000,00	12.077.049.407,00	146,39	15.587.730.477,00
2	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman	46.500.000,00	55.500.000,00	119,35	79.500.000,00
3	Retribusi Izin Trayek	350.000,00	235.000,00	67,14	635.000,00
4	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	4.000.000.000,00	5.958.440.000,00	148,96	5.013.890.000,00

Kelebihan/kekurangan realisasi Retribusi Daerah dibandingkan dengan anggarannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan lebih tinggi dari jumlah yang dianggarkan disebabkan oleh kenaikan jumlah kunjungan pasien karena *COVID-19* baik di Puskesmas maupun Puskesmas Pembantu;
- b) Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan meningkat dari yang dianggarkan karena kesadaran yang bagus dari wajib retribusi dalam membayar retribusi kebersihan;
- c) Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum nihil, hal ini disebabkan karena per Januari 2018 pengelolaan parkir di tepi jalan umum sepenuhnya ada pada Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma sesuai Perwali Nomor 8 Tahun 2018 tanggal 22 Januari 2018;





- d) Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor lebih tinggi dari jumlah yang dianggarkan disebabkan oleh meningkatnya obyek kendaraan yang diuji;
- e) Realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang meningkat dari yang dianggarkan karena kesadaran yang bagus dari wajib retribusi dalam membayar retribusi tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- f) Penerimaan Retribusi Terminal lebih rendah dari yang dianggarkan disebabkan karena belum optimalnya pemanfaatan terminal serta kurangnya kesadaran para sopir untuk menaikturunkan muatannya di terminal;
- g) Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan lebih tinggi dari target yang dianggarkan disebabkan oleh karena kesadaran masyarakat dalam melakukan pemotongan hewan sepenuhnya dilaksanakan melalui rumah potong hewan khususnya dalam pelaksanaan upacara agama serta perayaan hari-hari besar keagamaan;
- h) Meningkatnya pembangunan disertai dengan tingginya kesadaran masyarakat sebagai wajib retribusi untuk mengurus IMB, sehingga penerimaan retribusi IMB lebih tinggi dari yang ditargetkan;
- i) Penerimaan Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol lebih besar dari anggaran disebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat sebagai wajib retribusi untuk mengurus ijinnya sehingga penerimaan retribusi lebih besar dari yang ditargetkan;
- j) Retribusi Ijin Trayek lebih rendah dari target yang ditetapkan disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib retribusi untuk mengurus ijinnya;
- k) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing lebih tinggi dari yang ditargetkan karena banyaknya jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Denpasar dan disamping itu mereka memiliki kesadaran untuk membayar izin mereka.

Pendapatan Retribusi Daerah sama halnya dengan Pendapatan Pajak Daerah jika dibandingkan antara tahun 2020 dengan 2019 dimana pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan diakibatkan kondisi pandemi *COVID-19* ini. Realisasi tahun 2020 sebesar Rp29.183.790.708,00 sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp33.161.961.523,00 sehingga terjadi penurunan sebesar 12,00%, meskipun realisasi untuk tahun 2020 sudah melebihi target yang ditetapkan.

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam TA 2020 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp56.725.345.449,58 dan realisasi penerimaan sebesar Rp56.572.597.030,60 atau 99,73%. Sedangkan realisasi TA 2019 adalah sebesar Rp45.521.727.968,30. Adapun perbandingan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam TA 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.4 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No.	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019
1	PT Bank BPD Bali	44.945.769.902,60	44.945.769.902,60	100,00	38.356.510.053,30
2	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma	11.622.716.442,00	11.622.716.442,00	100,00	7.161.785.146,00





No.	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019
3	Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma	152.748.418,98	0,00	-	0,00
4	PT. Jamkrida Bali Mandara	4.110.686,00	4.110.686,00	100,00	3.432.769,00
Jumlah		56.725.345.449,58	56.572.597.030,60	99,73	45.521.727.968,30

Pencapaian realisasi dibandingkan anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Realisasi pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PT Bank BPD Bali mencapai target yang ditetapkan. Realisasi ini tergantung pada perolehan keuntungan PT Bank BPD Bali dan tergantung dari nilai penyertaan modal yang dilakukan pemerintah daerah pada PT Bank BPD Bali;
- Realisasi pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma mencapai target yang ditetapkan;
- Realisasi pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma tidak mencapai target karena penyertaan laba bersih tahun 2019 baru dilakukan tahun 2021.
- Realisasi pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PT. Jamkrida Bali Mandara sama dengan target yang ditetapkan.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam TA 2020 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp121.019.000.000,00 dan realisasi penerimaan sebesar Rp155.812.523.264,32 atau 128,75%. Sedangkan realisasi TA 2019 adalah sebesar Rp131.740.064.558,03. Termasuk Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diantaranya adalah hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, hasil pengelolaan dana bergulir serta pendapatan lainnya. Adapun perbandingan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam TA 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.5 Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No.	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	0,00	704.303.062,00	-	628.197.204,00
2	Penerimaan Jasa Giro	2.500.000.000,00	5.100.584.781,94	204,02	6.676.040.909,90
3	Pendapatan Bunga Deposito	3.019.000.000,00	4.562.500.000,03	151,13	8.531.250.000,00
4	Pendapatan Denda Pajak	3.500.000.000,00	7.348.920.744,16	209,97	10.021.937.038,00
5	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	1.023.087.972,00	-	876.673.686,00
6	Pendapatan BLUD	97.500.000.000,00	118.370.818.269,21	121,41	85.776.870.300,98
7	Pendapatan Lainnya	14.500.000.000,00	18.702.308.434,98	128,98	19.229.095.419,15
Jumlah		121.019.000.000,00	155.812.523.264,32	128,75	131.740.064.558,03





Kelebihan/kekurangan realisasi dibandingkan anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan realisasinya bersumber dari hasil penjualan peralatan dan mesin;
- Penerimaan jasa giro atas rekening Kas Daerah lebih tinggi dari yang dianggarkan, karena tergantung dari dana yang mengendap dan sulit diprediksi secara pasti;
- Pendapatan dari bunga deposito lebih tinggi dari yang telah dianggarkan karena tergantung dari dana yang mengendap dan tingkat suku bunga bank;
- Pendapatan denda pajak realisasinya bersumber dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak ABT, pajak parkir dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;
- Pendapatan denda retribusi realisasinya bersumber dari retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi terminal dan retribusi ijin mendirikan bangunan;
- Pendapatan BLUD berasal dari pendapatan RSUD Wangaya;
- Pendapatan lainnya lebih tinggi dari yang dianggarkan antara lain diperoleh dari pendapatan dana kapitasi JKN sebesar Rp15.047.390.100,00, penerimaan lain-lain sebesar Rp3.635.508.334,98 dan penggantian, pembelian stuk, plat uji yang hilang/rusak sebesar Rp19.410.000,00.

B. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan transfer dalam hal ini terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2020 yang target anggarannya sebesar Rp1.178.171.318.994,54 dengan realisasi sebesar Rp1.120.461.025.768,16 atau 95,10%. Sedangkan realisasi TA 2019 adalah sebesar Rp1.086.885.500.722,67. Adapun perbandingan Pendapatan Transfer dalam TA 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.6 Realisasi Pendapatan Transfer

No.	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan					
1	Dana Bagi Hasil Pajak	99.237.912.104,00	85.712.138.834,00	86,37	61.039.184.579,00
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	1.647.661.150,00	788.276.289,00	47,84	590.155.800,00
3	Dana Alokasi Umum	623.672.157.000,00	619.582.547.000,00	99,34	677.033.111.000,00
4	Dana Alokasi Khusus Fisik	13.460.496.000,00	11.870.536.132,00	88,19	25.251.621.082,00
5	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	109.878.785.198,00	105.845.717.362,00	96,33	101.603.197.137,00
6	Dana Alokasi Khusus Penugasan	5.390.018.000,00	4.555.772.836,00	84,52	4.441.587.960,00
Jumlah		853.287.029.452,00	828.354.988.453,00	97,08	869.958.857.558,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya					
7	Dana Penyesuaian	85.367.717.000,00	85.367.717.000,00	100,00	18.878.781.000,00
8	Dana Desa	36.621.601.000,00	36.621.601.000,00	100,00	0,00
Jumlah		121.989.318.000,00	121.989.318.000,00	100,00	18.878.781.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota					
9	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	186.130.058.542,54	155.780.657.698,16	83,69	191.850.862.164,67
Jumlah		186.130.058.542,54	155.780.657.698,16	83,69	191.850.862.164,67





No.	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Privinsi					
10	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	16.764.913.000,00	14.336.061.617,00	85,51	6.197.000.000,00
Jumlah		16.764.913.000,00	14.336.061.617,00	85,51	6.197.000.000,00
Jumlah Keseluruhan		1.178.171.318.994,54	1.120.461.025.768,16	95,10	1.086.885.500.722,67

1) Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak dalam TA 2020 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp99.237.912.104,00 dan realisasi penerimaan sebesar Rp85.712.138.834,00 atau sebesar 86,37% dari anggaran yang ada. Sedangkan realisasi TA 2019 adalah sebesar Rp61.039.184.579,00. Adapun perbandingan Dana Bagi Hasil Pajak dalam TA 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.7 Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak

No.	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019
1	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.310.938.751,00	3.788.111.420,00	71,33	4.813.181.255,00
2	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	1.657.093.436,00	1.516.534.607,00	91,52	467.281.631,00
3	Dana Bagi Hasil (DBH)-PPH	92.269.879.917,00	80.407.492.807,00	87,14	55.758.721.693,00
Jumlah		99.237.912.104,00	85.712.138.834,00	86,37	61.039.184.579,00

Realisasi Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dan Dana Bagi Hasil (DBH)-PPH secara global mengalami peningkatan dari tahun 2019 tetapi realisasi lebih rendah dari target anggaran yang ditetapkan, hal ini dipengaruhi oleh kondisi pandemi *COVID-19*.

2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA dalam TA 2020 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.647.661.150,00 dan realisasi penerimaan sebesar Rp788.276.289,00 atau sebesar 47,84%. Sedangkan realisasi TA 2019 adalah sebesar Rp590.155.800,00. Adapun perbandingan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA dalam TA 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.8 Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)

No.	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019
1	Bagi Hasil dari Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan	1.647.661.150,00	788.276.289,00	47,84	590.155.800,00
Jumlah		1.647.661.150,00	788.276.289,00	47,84	590.155.800,00

Kurangnya pencapaian target penerimaan Bagi Hasil dari Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan tergantung pada alokasi dan realisasi transfer yang diberikan oleh Pemerintah Pusat yang berasal dari Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan.

3) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum dalam TA 2020 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp623.672.157.000,00 dan realisasi penerimaan sebesar Rp619.582.547.000,00 atau 99,34%. Sementara untuk realisasi TA 2019 sebesar Rp677.033.111.000,00.





4) Dana Alokasi Khusus Fisik

Dana Alokasi Khusus Fisik dalam TA 2020 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp13.460.496.000,00 dan realisasi sebesar Rp11.870.536.132,00 atau 88,19%. Sedangkan realisasi TA 2019 adalah sebesar Rp25.251.621.082,00. Adapun perbandingan Dana Alokasi Khusus Fisik dalam TA 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.9 Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik

No.	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019
1	Bidang Infrastruktur Jalan	0,00	0,00		11.315.271.353,00
2	Bidang Infrastruktur Sanitasi	0,00	0,00		798.287.856,00
3	Bidang Pertanian	0,00	0,00		687.286.000,00
4	Bidang Pendidikan SD/SDLB	2.584.998.000,00	2.584.995.000,00	100,00	0,00
5	Bidang Kesehatan dan KB Pelayanan Dasar	824.835.000,00	465.241.911,00	56,40	473.709.810,00
6	Bidang Kesehatan dan KB Pelayanan Rujukan	4.081.425.000,00	3.692.774.185,00	90,48	8.640.318.158,00
7	Bidang Kesehatan dan KB Pelayanan Kefarmasian	1.203.071.000,00	915.744.361,00	76,12	1.468.146.281,00
8	Bidang Kesehatan dan KB Keluarga Berencana	513.300.000,00	0,00	-	963.687.124,00
9	Bidang Pendidikan SMP/SMPLB	1.426.617.000,00	1.396.230.675,00	97,87	904.914.500,00
10	Bidang SKB	2.826.250.000,00	2.815.550.000,00	99,62	0,00
	Jumlah	13.460.496.000,00	11.870.536.132,00	88,19	25.251.621.082,00

Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan dari Tahun Anggaran 2019 sebesar 52,99% dikarenakan kondisi pandemi *COVID-19* dan adanya surat dari Menteri Keuangan Nomor: S-247/MK.07/2020 Tanggal 27 Maret 2020, hal Penghematan Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2020 dan APBD di-*refocusing* untuk penanganan *COVID-19*.

5) Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Dana Alokasi Khusus Non Fisik dalam TA 2020 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp109.878.785.198,00 dan realisasi sebesar Rp105.845.717.362,00 atau 96,33%. Sedangkan realisasi TA 2019 adalah sebesar Rp101.603.197.137,00. Adapun perbandingan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dalam TA 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.10 Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik

No.	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019
1	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	9.847.800.000,00	6.820.456.900,00	69,26	10.621.969.000,00
2	Sertifikasi Guru	74.557.243.000,00	74.557.243.000,00	100,00	78.782.953.900,00
3	Non Sertifikasi	0,00	0,00	-	567.000.000,00
4	Bantuan Operasional Kesehatan	6.331.825.000,00	6.331.825.000,00	100,00	4.904.020.187,00
5	Akreditasi Puskesmas	694.960.000,00	694.960.000,00	100,00	731.185.000,00
6	Jampersal	663.408.000,00	663.408.000,00	100,00	598.000.000,00
7	Bantuan Operasional KB	892.652.000,00	826.282.000,00	92,56	1.022.647.000,00
8	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.106.449.000,00	2.068.740.664,00	98,21	1.329.422.050,00
9	BOP Pendidikan Kesetaraan	2.792.700.000,00	1.933.600.000,00	69,24	2.573.500.000,00
10	Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	491.010.000,00	448.463.600,00	91,33	472.500.000,00
11	Pengawasan Obat Dan Makanan	247.615.000,00	247.615.000,00	100,00	0,00





No.	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019
12	Dana Pelayanan Kepariwisata	344.050.000,00	344.050.000,00	100,00	0,00
13	Dana Cadangan BOK Tambahan	10.909.073.198,00	10.909.073.198,00	100,00	0,00
	Jumlah	109.878.785.198,00	105.845.717.362,00	96,33	101.603.197.137,00

6) Dana Alokasi Khusus Penugasan

Dana Alokasi Khusus Penugasan dalam TA 2020 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp5.390.018.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.555.772.836,00 atau 84,52%. Sedangkan realisasi TA 2019 adalah sebesar Rp4.441.587.960,00. Adapun perbandingan Dana Alokasi Khusus Penugasan dalam TA 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.11 Realisasi Dana Alokasi Khusus Penugasan

No.	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019
1	Bidang Air Minum	0,00	0,00	-	1.512.257.360,00
2	Bidang Pasar	0,00	0,00	-	1.251.685.000,00
3	Bidang Lingkungan Hidup	0,00	0,00	-	373.890.000,00
4	Kesehatan Dan KB (Penurunan Stunting)	618.547.000,00	245.808.800,00	39,74	803.363.900,00
5	Kesehatan Dan KB (Pengendalian Penyakit)	4.394.721.000,00	3.933.214.036,00	89,50	500.391.700,00
6	DAK Penugasan Pertanian	376.750.000,00	376.750.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	5.390.018.000,00	4.555.772.836,00	84,52	4.441.587.960,00

7) Dana Penyesuaian

Dana Penyesuaian dalam TA 2020 adalah Dana Insentif Daerah dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp85.367.717.000,00 dan realisasi sebesar Rp85.367.717.000,00 atau 100,00%. Sedangkan realisasi TA 2019 adalah sebesar Rp18.878.781.000,00. Adapun perbandingan Dana Penyesuaian dalam TA 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.12 Realisasi Dana Penyesuaian

No.	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019
1	Dana Insentif Daerah	85.367.717.000,00	85.367.717.000,00	100,00	18.878.781.000,00
	Jumlah	85.367.717.000,00	85.367.717.000,00	100,00	18.878.781.000,00

8) Dana Desa

Dana Desa dalam TA 2020 adalah Dana Desa yang diterima oleh 27 desa dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp36.621.601.000,00 dan realisasi sebesar Rp36.621.601.000,00 atau 100,00%. Sedangkan realisasi dana desa TA 2019 adalah sebesar Rp0,00 karena tahun 2019 dana desa dicatat di rekening pendapatan lainnya pada Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp34.750.461.000,00. Adapun perbandingan Dana Desa dalam TA 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.13 Realisasi Dana Desa

No.	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019
1	Dana Desa	36.621.601.000,00	36.621.601.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	36.621.601.000,00	36.621.601.000,00	100,00	0,00





9) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi dalam TA 2020 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp186.130.058.542,54 dan realisasi pendapatan sebesar Rp155.780.657.698,16 atau 83,69%. Sedangkan realisasi TA 2019 adalah sebesar Rp191.850.862.164,67. Adapun perbandingan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi dalam TA 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.14 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi

No.	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	61.756.435.030,15	64.372.030.792,32	104,24	72.033.119.544,06
2	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	38.669.738.819,17	27.793.326.764,60	71,87	36.122.733.045,28
3	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	221.092.838,33	196.141.538,31	88,71	253.303.724,88
4	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	56.376.207.991,89	30.171.667.700,93	53,52	56.971.088.643,86
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	29.106.583.863,00	33.247.490.902,00	114,23	26.470.617.206,59
	Jumlah	186.130.058.542,54	155.780.657.698,16	83,69	191.850.862.164,67

10) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya

Bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi lainnya dalam TA 2020 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp16.764.913.000,00 dan realisasi penerimaan sebesar Rp14.336.061.617,00 atau 85,51%. Sedangkan realisasi TA 2019 adalah sebesar Rp6.197.000.000,00. Adapun perbandingan Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya dalam TA 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.15 Realisasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya

No.	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019
1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	16.764.913.000,00	14.336.061.617,00	85,51	6.197.000.000,00
	Jumlah	16.764.913.000,00	14.336.061.617,00	85,51	6.197.000.000,00

C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam TA 2020 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp114.386.670.000,00 dan realisasi sebesar Rp112.331.786.553,91 atau 98,20%. Sedangkan realisasi TA 2019 adalah sebesar Rp95.866.005.028,96. Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2020 terdiri atas pendapatan hibah yaitu hibah pariwisata dan hibah dana BOS, sedangkan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2020 masih termasuk pendapatan lainnya yaitu pendapatan dana desa. Adapun perbandingan Lain-Lain Pendapatan yang Sah dalam TA 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:





Tabel 6.16 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

No.	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019
1	Pendapatan Hibah	114.386.670.000,00	112.331.786.553,91	98,20	61.115.544.028,96
2	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	34.750.461.000,00
	Jumlah	114.386.670.000,00	112.331.786.553,91	98,20	95.866.005.028,96

6.1.2. BELANJA DAERAH

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bagian yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, hibah, bantuan sosial. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan/irigasi/jaringan dan aset tidak berwujud. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Belanja Daerah dalam TA 2020 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp2.019.054.001.573,13 dan realisasi sebesar Rp1.722.827.837.846,61 atau 85,33%. Sedangkan realisasi TA 2019 adalah sebesar Rp2.055.142.986.563,43. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga. Rincian atas jumlah belanja daerah dengan anggarannya serta perbandingan dalam TA 2020 dengan 2019 seperti tersaji di bawah ini:

Tabel 6.17 Realisasi Belanja Daerah

No.	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019
1	Belanja Operasi	1.794.098.119.339,96	1.593.414.604.560,08	88,81	1.761.407.661.975,81
2	Belanja Modal	101.168.786.870,82	95.126.152.508,62	94,03	293.700.082.214,62
3	Belanja Tak Terduga	123.787.095.362,35	34.287.080.777,91	27,70	35.242.373,00
	Jumlah	2.019.054.001.573,13	1.722.827.837.846,61	85,33	2.055.142.986.563,43

A. BELANJA OPERASI

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran Pemerintah Kota Denpasar untuk kegiatan sehari-hari pemerintahan yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi dalam TA 2020 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.794.098.119.339,96 dan realisasi sebesar Rp1.593.414.604.560,08 atau 88,81%. Sedangkan realisasi TA 2019 adalah sebesar Rp1.761.407.661.975,81. Adapun rincian serta perbandingan Belanja Operasi dalam TA 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Tabel 6.18 Realisasi Belanja Operasi

No.	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019
1	Belanja Pegawai	819.560.096.023,55	747.920.479.236,00	91,26	809.371.496.020,78
2	Belanja Barang dan Jasa	792.271.428.974,41	697.596.172.310,88	88,05	826.430.741.592,13
3	Belanja Hibah	130.607.619.342,00	105.695.939.156,99	80,93	121.514.449.362,90
4	Belanja Bantuan Sosial	51.658.975.000,00	42.202.013.856,21	81,69	4.090.975.000,00
	Jumlah	1.794.098.119.339,96	1.593.414.604.560,08	88,81	1.761.407.661.975,81





1) Belanja Pegawai

Akun ini menggambarkan Belanja Pegawai yang meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah, Tambahan Penghasilan, Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, uang lembur dan Belanja Pegawai BLUD. Target anggaran Belanja Pegawai tahun 2020 setelah perubahan sebesar Rp819.560.096.023,55 dan realisasinya sebesar Rp747.920.479.236,00 atau 91,26%. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp809.371.496.020,78. Rincian atas jumlah belanja pegawai tersebut sebagai berikut:

Tabel 6.19 Realisasi Belanja Pegawai

No.	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	493.626.517.996,55	461.438.975.604,00	93,48	487.164.432.847,78
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	270.198.066.711,00	241.368.233.605,00	89,33	266.472.511.550,00
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	18.016.507.431,00	17.368.321.416,00	96,40	18.188.123.600,00
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	22.388.107.500,00	16.656.840.000,00	74,40	23.962.487.500,00
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	856.870.005,00	661.614.006,00	77,21	923.281.156,00
6	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan Perangkat Daerah	14.474.026.380,00	10.426.494.605,00	72,04	12.660.659.367,00
Jumlah		819.560.096.023,55	747.920.479.236,00	91,26	809.371.496.020,78

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa meliputi belanja bahan dan material, jasa pihak ketiga, cetak dan penggandaan, sewa-sewa, makanan dan minuman, pakaian dinas, belanja pemeliharaan, jasa konsultasi, kursus-kursus pelatihan dan perjalanan dinas. Target anggaran Belanja Barang dan Jasa tahun 2020 setelah perubahan Rp792.271.428.974,41 realisasinya sebesar Rp697.596.172.310,88 atau 88,05%. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp826.430.741.592,13. Rincian atas jumlah belanja barang dan jasa tersebut sebagai berikut:

Tabel 6.20 Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019
1	Belanja Bahan Pakai Habis	96.293.927.716,29	86.704.899.147,81	90,04	105.842.103.451,65
2	Belanja Bahan/Material	47.640.829.088,56	34.908.333.376,00	73,27	34.565.006.235,50
3	Belanja Jasa Kantor	123.674.541.018,93	100.319.007.813,60	81,12	313.692.854.540,00
4	Belanja Premi Asuransi	30.497.472.050,00	28.317.046.574,00	92,85	19.424.928.609,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	54.571.001.095,50	45.026.432.576,00	82,51	52.992.485.628,00
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.375.309.807,50	9.909.999.345,00	87,12	15.651.006.053,00
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	11.611.897.012,50	8.685.620.304,00	74,80	5.987.631.136,00
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	341.250.000,00	260.250.000,00	76,26	1.131.611.000,00
9	Belanja Sewa Alat Berat	240.000.000,00	117.941.200,00	49,14	0,00





No.	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.946.962.800,00	4.451.752.682,00	89,99	10.397.683.774,00
11	Belanja Makanan dan Minuman	15.242.539.500,00	10.491.892.500,00	68,83	28.864.226.045,00
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	388.569.900,00	350.189.752,00	90,12	5.597.855.755,25
13	Belanja Pakaian Kerja	993.803.000,00	957.681.750,00	96,37	4.029.993.020,00
14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.322.619.000,00	2.229.181.500,00	95,98	6.906.191.800,00
15	Belanja Perjalanan Dinas	26.272.370.449,00	19.370.729.878,00	73,73	70.157.780.764,88
16	Belanja Pemeliharaan	18.257.008.323,00	16.830.133.131,00	92,18	28.231.724.116,28
17	Belanja Jasa Konsultansi	1.366.000.000,00	1.350.062.585,00	98,83	4.781.518.260,00
18	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.646.350.000,00	4.224.870.000,00	48,86	8.177.580.000,00
19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	3.461.650.000,00	2.794.376.845,00	80,72	11.414.795.470,00
20	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	162.746.000,00	149.280.000,00	91,73	232.100.000,00
21	Honorarium PNS	5.088.346.000,00	3.831.426.000,00	75,30	2.216.700.000,00
22	Honorarium Non PNS	218.338.979.478,00	208.187.252.430,00	95,35	2.778.140.000,00
23	Belanja Barang Dana Bos	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	100,00	2.685.000.000,00
24	Belanja Barang Jasa BLUD	96.211.405.537,13	93.904.705.503,47	97,60	90.050.836.133,57
25	Belanja Jasa Kesehatan	10.909.073.198,00	10.908.531.018,00	100,00	0,00
26	Belanja Jasa Klaim	716.778.000,00	614.576.400,00	85,74	620.989.800,00
Jumlah		792.271.428.974,41	697.596.172.310,88	88,05	826.430.741.592,13

3) Belanja Hibah

Belanja Hibah TA 2020 terdiri dari Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Organisasi Masyarakat. Anggaran belanja hibah tahun anggaran 2020 sebesar Rp130.607.619.342,00 dan realisasi sebesar Rp105.695.939.156,99 atau sebesar 80,93% serta realisasi TA 2019 sebesar Rp121.514.449.362,90. Rincian Belanja Hibah adalah sebagai berikut:

Tabel 6.21 Realisasi Belanja Hibah

No.	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019
1	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	72.197.858.600,00	48.972.592.986,99	67,83	93.754.703.800,00
2	Belanja Hibah kepada Pemerintah	45.723.217.950,00	45.717.932.450,00	99,99	3.950.000.000,00
3	Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	12.686.542.792,00	11.005.413.720,00	86,75	23.809.745.562,90
Jumlah		130.607.619.342,00	105.695.939.156,99	80,93	121.514.449.362,90

Untuk realisasi belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan terdiri dari hibah kepada KONI sebesar Rp6.287.397.955,27, hibah kepada PMI sebesar Rp3.396.277.827,00, hibah kepada PRAMUKA sebesar





Rp99.776.543,92, hibah kepada FORMI sebesar Rp1.256.449.438,00, hibah BOP PAUD sebesar Rp8.657.400.000,00, hibah BOP Pendidikan Kesenakawanan sebesar Rp1.929.600.000,00, hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp500.000.000,00 dan hibah pariwisata kepada hotel dan restoran sebesar Rp26.845.691.222,80.

Realisasi belanja hibah kepada pemerintah terdiri dari hibah kepada KODIM sebesar Rp2.000.000.000,00, hibah kepada POLRESTA sebesar Rp7.132.730.000,00, hibah kepada KPU sebesar Rp29.890.440.450,00, hibah kepada BAWASLU sebesar Rp5.880.795.000,00 dan hibah kepada Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri sebesar Rp813.967.000,00.

Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga direalisasikan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp71.280.000,00. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.123.844.489,00, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp5.780.155.950,00, Dinas Sosial sebesar Rp67.750.000,00, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebesar Rp50.772.100,00, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp1.163.134.181,00, Dinas Kebudayaan sebesar Rp197.954.000,00, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan sebesar Rp58.102.000,00, Dinas Pariwisata sebesar Rp298.045.000,00, Dinas Pertanian sebesar Rp1.789.716.000,00, Kecamatan Denpasar Selatan sebesar Rp184.410.000,00, dan Kecamatan Denpasar Utara sebesar Rp220.250.000,00.

4) **Belanja Bantuan Sosial**

Belanja Bantuan Sosial dengan target anggaran setelah perubahan tahun 2020 sebesar Rp51.658.975.000,00 dan realisasi sebesar Rp42.202.013.856,21 atau 81,69%. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp4.090.975.000,00. Rincian Belanja Bantuan Sosial tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.22 Realisasi Belanja Bantuan Sosial

No.	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	51.658.975.000,00	42.202.013.856,21	81,69	4.090.975.000,00
	Jumlah	51.658.975.000,00	42.202.013.856,21	81,69	4.090.975.000,00

Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat terdiri dari Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan sebesar Rp1.932.575.000,00, Belanja Bantuan Sosial Tidak Direncanakan sebesar Rp2.455.000.000,00, Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan untuk COVID-19 sebesar Rp43.573.400.000,00, Bantuan Uang Pangkal siswa SMP sebesar Rp1.958.000.000,00, dan Bantuan Sosial yang direncanakan berupa bantuan sosialpasca bencana sebesar Rp1.740.000.000.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan terdiri dari Belanja Bantuan Sosial Kepada Peserta Didik kurang mampu – Sekolah Dasar sebesar Rp40.825.000,00, dan Belanja Bantuan Sosial Kepada Peserta Didik kurang mampu – Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp616.875.000,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tidak Direncanakan berupa santunan kematian sebesar Rp2.455.000.000,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan untuk COVID-19 sebesar Rp36.008.313.856,21. Realisasi Bantuan Uang Pangkal siswa SMP sebesar





Rp1.341.000.000,00. Realisasi Bantuan Sosial yang direncanakan berupa bantuan sosial pasca bencana sebesar Rp1.740.000.000.

B. BELANJA MODAL

Belanja Modal dalam TA 2020 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp101.168.786.870,82 dan realisasipengeluaran sebesar Rp95.126.152.508,62 atau 94,03%. Sedangkan realisasi TA 2019 sebesar Rp293.700.082.214,62. Rincian belanja modal terdiri dari Belanja Tanah, Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Belanja Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 6.23 Realisasi Belanja Modal

No.	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019
1	Belanja Modal Tanah	544.000.000,00	317.580.840,00	58,38	70.204.840,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.739.774.824,86	39.301.750.223,61	91,96	80.377.733.062,91
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.566.222.873,80	29.449.362.418,00	96,35	118.026.241.990,26
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	12.913.948.163,16	12.677.346.957,01	98,17	85.526.273.950,45
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.404.841.009,00	13.380.112.070,0	92,89	9.699.628.371,00
Jumlah		101.168.786.870,82	95.126.152.508,62	94,03	293.700.082.214,62

- 1. Belanja Modal Tanah**
Belanja Modal Tanah dalam TA 2020 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp544.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp317.580.840,00 atau 58,38%. Realisasi dalam TA 2019 sebesar Rp70.204.840,00.
- 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin dalam TA 2020 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp42.739.774.824,86 dan realisasi sebesar Rp39.301.750.223,61 atau 91,96%. Realisasi dalam TA 2019 sebesar Rp80.377.733.062,91.
- 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan**
Belanja Modal Bangunan dan Gedung dalam TA 2020 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp30.566.222.873,80 dan realisasi sebesar Rp29.449.362.418,00 atau 96,35%. Realisasi dalam TA 2019 sebesar Rp118.026.241.990,26.
- 4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam TA 2020 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp12.913.948.163,16 dengan realisasi sebesar Rp12.677.346.957,01 atau 98,17%. Realisasi dalam TA 2019 sebesar Rp85.526.273.950,45.
- 5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dalam TA 2020 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp14.404.841.009,00 dan realisasi sebesar Rp13.380.112.070,00 atau 92,89%. Realisasi dalam TA 2019 sebesar Rp9.699.628.371,00.





C. BELANJA TAK TERDUGA

Belanja Tak Terduga dalam TA 2020 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp123.787.095.362,35 dan realisasi Rp34.287.080.777,91 atau 27,70%. Realisasi dalam TA 2019 sebesar Rp35.242.373,00. Rincian Belanja Tak Terduga adalah sebagai berikut:

Tabel 6.24 Realisasi Belanja Tak Terduga

No.	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019
1	Belanja Tak Terduga	123.787.095.362,35	34.287.080.777,91	27,70	35.242.373,00
Jumlah		123.787.095.362,35	34.287.080.777,91	27,70	35.242.373,00

Realisasi belanja tak terduga terdiri dari realisasi belanja yang dialokasikan untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp34.048.760.098,00 dan belanja tak terduga selain penanganan COVID-19 sebesar Rp238.320.679,91. Belanja tak terduga selain penanganan COVID-19 terdiri dari restitusi pembayaran PBB-P2 sebesar Rp9.382.726,00, restitusi pembayaran BPHTB sebesar Rp218.875.000,00 dan restitusi kelebihan pelimpahan jasa giro Rp10.062.953,91. Sementara realisasi BTT untuk penanganan COVID-19 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.25 Realisasi Belanja Tak Terduga untuk Penanganan COVID-19

No.	OPD	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	Sisa
1	Badan Penganggulangan Bencana Daerah	954.140.000,00	548.352.900,00	405.787.100,00
2	Bagian Hukum Dan Ham Setda	112.500.000,00	112.000.000,00	500.000,00
3	Dinas Kebudayaan	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	-
4	Dinas Kesehatan	18.239.114.935,00	14.248.395.782,00	3.990.719.153,00
5	Dinas Kesehatan	3.199.000.000,00	2.757.124.398,00	441.875.602,00
6	Dinas Kesehatan	3.396.566.505,00	2.967.701.682,00	428.864.823,00
7	Dinas Kesehatan	6.100.000.000,00	4.920.108.336,00	1.179.891.664,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.350.000.000,00	1.342.077.000,00	7.923.000,00
9	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik	150.000.000,00	150.000.000,00	-
10	Dinas Perhubungan	4.613.000.000,00	4.453.000.000,00	160.000.000,00
11	Kecamatan Denpasar Barat	150.000.000,00	150.000.000,00	-
12	Kecamatan Denpasar Selatan	300.000.000,00	300.000.000,00	-
13	Kecamatan Denpasar Timur	200.000.000,00	200.000.000,00	-
14	Kecamatan Denpasar Utara	150.000.000,00	150.000.000,00	-
BTT Penanganan COVID-19		40.664.321.440,00	34.048.760.098,00	6.615.561.342,00

Seluruh sisa dana BTT yang berasal dari APBD Kota Denpasar sebesar Rp5.427.746.678,00 sudah dikembalikan ke kas daerah Kota Denpasar, sedangkan sisa BTT yang bersumber dari BKK Provinsi pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.179.891.664,00 dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp7.923.000,00 sudah dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Bali pada tanggal 30 Desember 2020.

6.1.3. TRANSFER

Transfer dalam APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan. Pemberian transfer dana dari Pemerintah Kota Denpasar kepada Pemerintah Desa dan partai politik adalah untuk membiayai kegiatan/program tertentu sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan dengan SK Walikota. Transfer dalam TA 2020 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp161.725.274.000,00 dan realisasi





Rp161.725.274.000,00 atau 100,00%. Sedangkan realisasi dalam TA 2019 sebesar Rp200.169.799.266,94. Rincian Transfer tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.26 Realisasi Belanja Transfer

No.	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019
1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	47.717.586.800,00	47.717.586.800,00	100,00	77.845.228.000,00
2	Transfer Bantuan Keuangan	114.007.687.200,00	114.007.687.200,00	100,00	122.324.571.266,94
Jumlah		161.725.274.000,00	161.725.274.000,00	100,00	200.169.799.266,94

1. TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN

Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam TA 2020 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp47.717.586.800,00 dan realisasi Rp47.717.586.800,00 atau 100%. Sedangkan realisasi dalam TA 2019 sebesar Rp77.845.228.000,00. Rincian Transfer Bagi Hasil Pendapatan pada TA 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

1) Transfer Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Merupakan realisasi Transfer Bagi Hasil dari Pemerintah Kota Denpasar kepada Pemerintah Desa berupa bagi hasil pajak dan retribusi. Transfer Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa pada TA 2020 dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp47.717.586.800,00 dan realisasi Rp47.717.586.800,00 atau 100%. Sedangkan realisasi dalam TA 2019 sebesar Rp77.845.228.000,00. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 6.27 Realisasi Transfer Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

No.	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019
1	Transfer Bagi Hasil Pajak	44.840.000.000,00	44.840.000.000,00	100,00	75.000.000.000,00
2	Transfer Bagi Hasil Retribusi	2.877.586.800,00	2.877.586.800,00	100,00	2.845.228.000,00
Jumlah		47.717.586.800,00	47.717.586.800,00	100,00	77.845.228.000,00

Adapun rincian Transfer Bagi Hasil Pajak ke desa tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.28 Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa

No.	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019
1	Desa Sidakarya	1.665.145.000,00	1.665.145.000,00	100,00	2.771.765.000,00
2	Desa Pemogan	2.155.984.000,00	2.155.984.000,00	100,00	3.474.413.000,00
3	Desa Sanur Kaja	1.334.925.000,00	1.334.925.000,00	100,00	2.230.144.000,00
4	Desa Sanur Kauh	1.545.376.000,00	1.545.376.000,00	100,00	2.563.027.000,00
5	Desa Dangin Puri Kelod	1.496.884.000,00	1.496.884.000,00	100,00	2.448.519.000,00
6	Desa Sumerta Kelod	1.563.375.000,00	1.563.375.000,00	100,00	2.630.565.000,00
7	Desa Kesiman Petilan	1.625.670.000,00	1.625.670.000,00	100,00	2.621.074.000,00
8	Desa Kesiman Kertalangu	1.724.793.000,00	1.724.793.000,00	100,00	2.845.766.000,00
9	Desa Sumerta Kaja	1.497.525.000,00	1.497.525.000,00	100,00	2.416.812.000,00
10	Desa Sumerta Kauh	1.296.627.000,00	1.296.627.000,00	100,00	2.147.528.000,00





No.	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019
11	Desa Penatih Dangin Puri	1.590.081.000,00	1.590.081.000,00	100,00	2.583.880.000,00
12	Desa Padangsambian Kelod	1.791.553.000,00	1.791.553.000,00	100,00	3.135.012.000,00
13	Desa Pemecutan Kelod	2.079.187.000,00	2.079.187.000,00	100,00	3.440.896.000,00
14	Desa Dauh Puri Kauh	1.437.757.000,00	1.437.757.000,00	100,00	2.620.771.000,00
15	Desa Dauh Puri Kelod	1.598.759.000,00	1.598.759.000,00	100,00	2.636.917.000,00
16	Desa Dauh Puri Kangin	1.234.960.000,00	1.234.960.000,00	100,00	2.030.203.000,00
17	Desa Tegal Harum	1.471.994.000,00	1.471.994.000,00	100,00	2.461.580.000,00
18	Desa Tegal Kertha	1.759.388.000,00	1.759.388.000,00	100,00	2.411.922.000,00
19	Desa Padangsambian Kaja	1.616.565.000,00	1.616.565.000,00	100,00	2.575.450.000,00
20	Desa Dangin Puri Kangin	1.525.921.000,00	1.525.921.000,00	100,00	2.458.534.000,00
21	Desa Dangin Puri Kauh	1.401.530.000,00	1.401.530.000,00	100,00	2.279.466.000,00
22	Desa Dangin Puri Kaja	1.600.943.000,00	1.600.943.000,00	100,00	2.618.841.000,00
23	Desa Pemecutan Kaja	2.708.369.000,00	2.708.369.000,00	100,00	5.876.044.000,00
24	Desa Dauh Puri Kaja	1.495.593.000,00	1.495.593.000,00	100,00	2.475.805.000,00
25	Desa Ubung Kaja	2.010.345.000,00	2.010.345.000,00	100,00	3.327.183.000,00
26	Desa Peguyangan Kaja	1.698.398.000,00	1.698.398.000,00	100,00	2.800.246.000,00
27	Desa Peguyangan Kangin	1.912.353.000,00	1.912.353.000,00	100,00	3.117.637.000,00
Jumlah		44.840.000.000,00	44.840.000.000,00	100,00	75.000.000.000,00

Rincian Transfer Bagi Hasil Retribusi ke desa tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.29 Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa

.No.	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019
1	Desa Sidakarya	90.995.200,00	90.995.200,00	100,00	88.932.000,00
2	Desa Pemogan	116.616.900,00	116.616.900,00	100,00	105.468.000,00
3	Desa Sanur Kaja	71.270.500,00	71.270.500,00	100,00	70.286.000,00
4	Desa Sanur Kauh	82.593.600,00	82.593.600,00	100,00	79.851.000,00
5	Desa Dangin Puri Kelod	107.683.700,00	107.683.700,00	100,00	101.582.000,00
6	Desa Sumerta Kelod	90.598.100,00	90.598.100,00	100,00	86.921.000,00
7	Desa Kesiman Petilan	106.669.900,00	106.669.900,00	100,00	97.469.000,00
8	Desa Kesiman Kertalangu	98.748.900,00	98.748.900,00	100,00	94.351.000,00
9	Desa Sumerta Kaja	109.588.000,00	109.588.000,00	100,00	83.498.000,00
10	Desa Sumerta Kauh	84.318.900,00	84.318.900,00	100,00	81.520.000,00
11	Desa Penatih Dangin Puri	118.718.400,00	118.718.400,00	100,00	110.973.000,00
12	Desa Padangsambian Kelod	107.132.700,00	107.132.700,00	100,00	116.019.000,00
13	Desa Pemecutan Kelod	118.166.600,00	118.166.600,00	100,00	113.911.000,00
14	Desa Dauh Puri Kauh	91.137.500,00	91.137.500,00	100,00	105.786.000,00
15	Desa Dauh Puri Kelod	84.973.200,00	84.973.200,00	100,00	84.401.000,00
16	Desa Dauh Puri Kangin	80.753.200,00	80.753.200,00	100,00	86.197.000,00
17	Desa Tegal Harum	98.591.600,00	98.591.600,00	100,00	97.163.000,00
18	Desa Tegal Kertha	132.949.800,00	132.949.800,00	100,00	130.268.000,00
19	Desa Padangsambian Kaja	104.677.300,00	104.677.300,00	100,00	93.773.000,00
20	Desa Dangin Puri Kangin	102.232.200,00	102.232.200,00	100,00	93.136.000,00





.No.	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019
21	Desa Dangin Puri Kauh	105.254.100,00	105.254.100,00	100,00	96.080.000,00
22	Desa Dangin Puri Kaja	109.018.200,00	109.018.200,00	100,00	102.833.000,00
23	Desa Pemecutan Kaja	221.400.300,00	221.400.300,00	100,00	313.368.000,00
24	Desa Dauh Puri Kaja	98.452.700,00	98.452.700,00	100,00	95.251.000,00
25	Desa Ubung Kaja	110.281.700,00	110.281.700,00	100,00	106.159.000,00
26	Desa Peguyangan Kaja	103.062.500,00	103.062.500,00	100,00	98.352.000,00
27	Desa Peguyangan Kangin	131.701.100,00	131.701.100,00	100,00	111.680.000,00
Jumlah		2.877.586.800,00	2.877.586.800,00	100,00	2.845.228.000,00

2. TRANSFER BANTUAN KEUANGAN

Transfer Bantuan Keuangan dalam TA 2020 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp114.007.687.200,00 dan realisasi Rp114.007.687.200,00 atau 100,00%. Sedangkan realisasi dalam TA 2019 sebesar Rp122.324.571.266,94. Transfer Bantuan Keuangan pada TA 2020 dan 2019 terdiri dari:

1) Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Merupakan realisasi transfer/bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam TA 2020 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp112.682.101.000,00 dan realisasi Rp112.682.101.000,00 atau 100,00%. Sedangkan realisasi dalam TA 2019 sebesar Rp121.760.322.643,94. Adapun rincian dari transfer bantuan keuangan ke desa adalah sebagai berikut:

Tabel 6.30 Realisasi Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa

No.	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019
1	Belanja Dana Desa	36.621.601.000,00	36.621.601.000,00	100,00	34.750.461.000,00
2	Alokasi Dana Desa	71.000.000.000,00	71.000.000.000,00	100,00	77.000.000.000,00
3	Bantuan Keuangan	5.060.500.000,00	5.060.500.000,00	100,00	4.060.500.000,00
4	Pemilihan Kepala Desa	0,00	0,00	0,00	5.949.361.643,94
Jumlah		112.682.101.000,00	112.682.101.000,00	100,00	121.760.322.643,94

2) Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya dalam TA 2020 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.325.586.200,00 dan realisasi Rp1.325.586.200,00 atau 100,00 %. Sedangkan realisasi dalam TA 2019 sebesar Rp564.248.623,00. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 6.31 Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

No.	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019
1	Belanja Bantuan Keuangan Lainnya Kepada Partai Politik	1.325.586.200,00	1.325.586.200,00	100,00	564.248.623,00
Jumlah		1.325.586.200,00	1.325.586.200,00	100,00	564.248.623,00





6.1.4. PEMBIAYAAN

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Denpasar baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Adapun perbandingan dari Pembiayaan Daerah dalam TA 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.32 Realisasi Pembiayaan Daerah

No.	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019
1.	Penerimaan Pembiayaan	237.423.789.571,01	237.423.789.571,01	100,00	323.367.373.097,87
2.	Pengeluaran Pembiayaan	4.122.716.442,00	4.122.716.442,00	100,00	24.161.785.146,00
	PEMBIAYAAN NETO	233.301.073.129,01	233.301.073.129,01	100,00	299.205.587.951,87

A. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan pembiayaan dalam TA 2020 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp237.423.789.571,01 dan realisasi sebesar Rp237.423.789.571,01 atau 100,00%. Sedangkan realisasi TA 2019 adalah sebesar Rp323.367.373.097,87. Adapun rincian penerimaan pembiayaan TA 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.33 Realisasi Penerimaan Pembiayaan

No.	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019
1)	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	237.423.789.571,01	237.423.789.571,01	100,00	323.367.373.097,87
	Jumlah	237.423.789.571,01	237.423.789.571,01	100,00	323.367.373.097,87

B. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan dalam TA 2020 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp4.122.716.442,00 dengan realisasi sebesar Rp4.122.716.442,00 atau 100,00%. Sedangkan realisasi TA 2019 adalah sebesar Rp24.161.785.146,00. Pengeluaran pembiayaan ini untuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.34 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

No.	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019
1)	Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Daerah)	4.122.716.442,00	4.122.716.442,00	100,00	24.161.785.146,00
a.	Penyertaan Modal pada PDAM	4.122.716.442,00	4.122.716.442,00	100,00	7.161.785.146,00
b.	Penyertaan Modal pada Bank BPD Bali	0,00	0,00	0,00	17.000.000.000,00
	Jumlah	4.122.716.442,00	4.122.716.442,00	100,00	24.161.785.146,00

6.1.5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

SILPA Pemerintah Kota Denpasar dalam TA 2020 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp312.802.054.510,00. Sedangkan realisasi TA 2019 sebesar Rp237.423.789.571,01.

Rincian SILPA TA 2020 adalah sebagai berikut:

1.	Giro Kas Daerah	Rp	274.802.704.477,01
2.	Kas dibendahara penerimaan	Rp	15.147.000,00
3.	Kas JKN	Rp	3.308.176.246,42
4.	Kas BOS	Rp	11.370.944.863,70
5.	Kas BLUD	Rp	23.305.081.922,87
	SILPA TA 2020	Rp	312.802.054.510,00





SILPA TA 2020 terdiri dari:

1. SILPA Terikat	Rp	73.505.898.168,18
a. DAK Fisik	Rp	38.657.761,00
b. DAK Non Fisik	Rp	9.868.136.839,00
c. DID	Rp	17.300.977.258,00
d. DAU Tambahan	Rp	878.713.413,99
e. BKK Propinsi	Rp	83.498.070,00
f. Hibah Pariwisata	Rp	7.351.711.793,20
g. Kas JKN	Rp	3.308.176.246,42
h. Kas BOS	Rp	11.370.944.863,70
i. Kas BLUD	Rp	23.305.081.922,87
2. SILPA Bebas/APBD	Rp	239.296.156.342,82
	Rp	312.802.054.510,00

6.2. PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) adalah Laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan saldo anggaran lebih selama tahun anggaran 2020 dan 2019, yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
6.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 237.423.789.571,01	Rp 323.367.373.097,87
- Kas di Kas Daerah	Rp 226.175.517.105,65	Rp 305.116.730.715,48
- Kas di Bendahara BLUD RSUD Wangaya	Rp 119.425.537,13	Rp 6.131.585.742,72
- Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 0,00	Rp 266.436.117,00
- Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 16.183.000,00	Rp 5.144.000,00
- Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	Rp 4.354.183.239,42	Rp 4.360.981.910,42
- Kas di Bendahara Dana Bergulir	Rp 110.372.772,21	Rp 70.606,96
- Kas di Bendahara Dana BOS	Rp 6.648.107.916,60	Rp 7.486.424.005,29
Jumlah tersebut merupakan saldo anggaran lebih awal Pemerintah Kota Denpasar pada Tahun Anggaran 2020 dan 2019.		

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
6.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp 237.423.789.571,01	Rp 323.367.373.097,87

Jumlah tersebut merupakan penerimaan pembiayaan Pemerintah Kota Denpasar pada Tahun Anggaran 2020 dan 2019.

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
6.2.3 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp 312.802.054.510,00	Rp 237.423.789.571,01

Jumlah tersebut merupakan SiLPA dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Denpasar pada TA 2020 dan 2019. Jumlah tersebut sama dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan.





Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
6.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp 312.802.054.510,00	Rp 237.423.789.571,01
- Kas di Kas Daerah	Rp 274.802.704.477,01	Rp 226.175.517.105,65
- Kas di Bendahara BLUD RSUD Wangaya	Rp 23.305.081.922,87	Rp 119.425.537,13
- Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 0,00	Rp 0,00
- Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 15.147.000,00	Rp 16.183.000,00
- Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	Rp 3.308.176.246,42	Rp 4.354.183.239,42
- Kas di Bendahara Dana BOS	Rp 11.370.944.863,70	Rp 6.648.107.916,60
- Kas di Bendahara Dana Bergulir Koperasi	Rp 0,00	Rp 26.515.143,75
- Kas di Bendahara Dana Bergulir LPD	Rp 0,00	Rp 83.857.628,46

6.3. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan, Beban dan Surplus/(Defisit) operasional dari suatu entitas pelaporan.

Uraian	TA 2020 (Rp)	TA 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
--------	--------------	--------------	--------------------------	---

6.3.1 Pendapatan - LO

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Operasional Pemerintah Kota Denpasar untuk tahun 2020 dan 2019, yang terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah - LO	786.073.805.608,10	1.034.333.176.976,93	(248.259.371.368,83)	(24,00)
- Pendapatan Transfer - LO	1.079.792.307.070,31	1.092.795.876.974,91	(13.003.569.904,60)	(1,19)
- Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO	131.365.625.650,63	156.596.926.084,74	(25.231.300.434,11)	(16,11)
Jumlah	1.997.231.738.329,04	2.283.725.980.036,58	(286.494.241.707,54)	(12,55)

Uraian	TA 2020 (Rp)	TA 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
--------	--------------	--------------	--------------------------	---

6.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Denpasar untuk tahun 2020 dan 2019, yang terdiri dari:

- Pendapatan Pajak Daerah	550.681.615.655,91	833.964.554.436,64	(283.282.938.780,73)	(33,97)
- Pendapatan Retribusi Daerah	29.246.589.983,00	33.225.525.463,00	(3.978.935.480,00)	(11,98)
- Pendapatan	49.145.259.942,60	26.703.877.129,40	22.441.382.813,20	84,04





Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
- Lain-Lain PAD yang Sah	157.000.340.026,59	140.439.219.947,89	16.561.120.078,70	11,79
Jumlah	786.073.805.608,10	1.034.333.176.976,93	(248.259.371.368,83)	(24,00)

Uraian	TA 2020 (Rp)	TA 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
--------	--------------	--------------	--------------------------	---

6.3.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kota Denpasar untuk tahun 2020 dan 2019, yang terdiri dari:

- Pajak Hotel	62.892.915.388,49	201.284.645.347,36	(138.391.729.958,87)	(68,75)
- Pajak Restoran	97.595.687.868,66	160.010.391.803,08	(62.414.703.934,42)	(39,01)
- Pajak Hiburan	9.558.268.888,66	25.177.732.422,30	(15.619.463.533,64)	(62,04)
- Pajak Reklame	1.653.621.390,10	771.110.255,90	882.511.134,20	114,45
- Pajak Penerangan Jalan	96.917.837.846,00	95.535.189.555,00	1.382.648.291,00	1,45
- Pajak Air Tanah	7.878.418.381,00	10.947.297.185,00	(3.068.878.804,00)	(28,03)
- BPHTB	127.509.707.907,00	193.002.709.077,00	(65.493.001.170,00)	(33,93)
- PBB	140.048.000.079,00	138.097.568.367,00	1.950.431.712,00	1,41
- Pajak Parkir	6.627.157.907,00	9.137.910.424,00	(2.510.752.517,00)	(27,48)
Jumlah	550.681.615.655,91	833.964.554.436,64	(283.282.938.780,73)	(33,97)

Pendapatan pajak daerah sebesar Rp550.681.615.655,91 sudah termasuk hal-hal sebagai berikut:

- pengakuan pendapatan pajak atas realisasi tahun 2019 untuk ketetapan pajak tahun 2020 yang terdiri dari pajak hotel sebesar Rp5.600.216,00, pajak restoran 776.822.982,00, Pajak Hiburan Rp14.411.000,00, Pajak Air Tanah Rp19.456,00, dan Pajak Reklame Rp1.145.825.024,11 pada Badan Pendapatan Daerah.
- Pengakuan pengurangan pendapatan pajak-LO karena pendapatan diterima dimuka tahun 2020 pada Pajak Restoran sebesar Rp(237.613.065,00), Pajak Air Tanah sebesar Rp(22.122,00), Pajak Reklame yang sebesar Rp(790.907.066,35) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp(329.890.000,00).

Uraian	TA 2020 (Rp)	TA 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
--------	--------------	--------------	--------------------------	---

6.3.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Denpasar untuk tahun 2020 dan 2019, yang terdiri dari:

- Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.897.203.100,00	4.977.696.500,00	(2.080.493.400,00)	(41,80)
- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.935.531.000,00	2.852.638.000,00	82.893.000,00	2,91
- Retribusi Pengujian Kendaraan	3.767.679.000,00	3.124.995.000,00	642.684.000,00	20,57





Bermotor

- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	91.866.650,00	21.513.800,00	70.352.850,00	327,01
- Retribusi Terminal	1.199.415.826,00	1.192.646.686,00	6.769.140,00	0,57
- Retribusi Rumah Potong Hewan	263.670.000,00	374.280.000,00	(110.610.000,00)	(29,55)
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	12.077.049.407,00	15.587.730.477,00	(3.510.681.070,00)	(22,52)
- Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	55.500.000,00	79.500.000,00	(24.000.000,00)	(30,19)
- Retribusi Izin Trayek	235.000,00	635.000,00	(400.000,00)	(62,99)
- Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	5.958.440.000,00	5.013.890.000,00	944.550.000,00	18,84
Jumlah	29.246.589.983,00	33.225.525.463,00	(3.978.935.480,00)	(11,98)

Uraian	TA 2020 (Rp)	TA 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
--------	--------------	--------------	--------------------------	---

6.3.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kota Denpasar untuk tahun 2020 dan 2019, yang terdiri dari:

- PT Bank BPD Bali	44.945.769.902,60	0,00	44.945.769.902,60	0,00
- Perusahaan Umum Daerah Tirta Sewakadarma	4.195.379.354,00	25.593.143.009,15	(21.397.763.655,15)	(83,61)
- Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma	0,00	1.110.734.120,25	(1.110.734.120,25)	(100,00)
- PT. Jamkrida Bali Mandara	4.110.686,00	0,00	4.110.686,00	0,00
Jumlah	49.145.259.942,60	26.703.877.129,40	22.441.382.813,20	84,04

Uraian	TA 2020 (Rp)	TA 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
--------	--------------	--------------	--------------------------	---

6.3.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah – LO

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kota Denpasar untuk tahun 2020 dan 2019, yang terdiri dari:

- Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	704.303.062,00	628.197.204,00	76.105.858,00	12,11
- Penerimaan Jasa Giro	5.100.584.781,94	6.676.040.909,90	(1.575.456.127,96)	(23,60)
- Pendapatan Bunga	4.562.500.000,03	8.531.250.000,00	(3.968.749.999,97)	(46,52)
- Pendapatan	12.200.641.851,05	12.228.077.848,00	(27.435.996,95)	(0,22)





Denda Pajak				
- Pendapatan	1.024.367.428,00	883.214.925,00	141.152.503,00	15,98
Denda Retribusi				
- Pendapatan	114.699.696.168,59	92.263.343.641,84	22.436.352.526,75	24,32
BLUD				
- Lain-Lain PAD	18.708.246.734,98	19.229.095.419,15	(520.848.684,17)	(2,71)
yang Sah				
Lainnya				
Jumlah	157.000.340.026,59	140.439.219.947,89	16.561.120.078,70	11,79

Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp157.000.340.026,59 sudah termasuk pengakuan koreksi piutang denda pajak tahun 2019 sebesar Rp19.807.223,00 dan penghapusan piutang denda retribusi tahun 2020 sebesar Rp10.039.626,00.

Uraian	TA 2020 (Rp)	TA 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
--------	--------------	--------------	--------------------------	---

6.3.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Transfer oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk tahun 2020 dan 2019, yang terdiri dari:

- Transfer	828.354.988.453,00	876.539.127.558,00	(48.184.139.105,00)	(5,50)
Pemerintah				
Pusat – Dana				
Perimbangan				
- Transfer	85.367.717.000,00	18.878.781.000,00	66.488.936.000,00	352,19
Pemerintah				
Pusat –				
Lainnya				
- Transfer	166.069.601.617,31	197.377.968.416,91	(31.308.366.799,60)	(15,86)
Pemerintah				
Provinsi				
Jumlah	1.079.792.307.070,31	1.092.795.876.974,91	(13.003.569.904,60)	(1,19)

Uraian	TA 2020 (Rp)	TA 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
--------	--------------	--------------	--------------------------	---

6.3.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – LO

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk tahun 2020 dan 2019, yang terdiri dari:

- Dana Bagi	85.712.138.834,00	61.039.184.579,00	24.672.954.255,00	40,42
Hasil Pajak				
- Dana Bagi	788.276.289,00	590.155.800,00	198.120.489,00	33,57
Hasil Sumber				
Daya Alam				
- Dana Alokasi	619.582.547.000,00	683.613.381.000,00	(64.030.834.000,00)	(9,37)
Umum				
- Dana Alokasi	11.870.536.132,00	25.251.621.082,00	(13.381.084.950,00)	(52,99)
Khusus				
- DAK Non Fisik	105.845.717.362,00	101.603.197.137,00	4.242.520.225,00	4,18
- DAK	4.555.772.836,00	4.441.587.960,00	114.184.876,00	2,57
Penugasan				
Jumlah	828.354.988.453,00	876.539.127.558,00	(48.184.139.105,00)	(5,50)





Uraian	TA 2020 (Rp)	TA 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
--------	--------------	--------------	--------------------------	---

6.3.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk tahun 2020 dan 2019, yang terdiri dari:

- Dana Penyesuaian	85.367.717.000,00	18.878.781.000,00	66.488.936.000,00	352,19
Jumlah	85.367.717.000,00	18.878.781.000,00	66.488.936.000,00	352,19

Uraian	TA 2020 (Rp)	TA 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
--------	--------------	--------------	--------------------------	---

6.3.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi - LO

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk tahun 2020 dan 2019, yang terdiri dari:

- Pendapatan Bagi Hasil Pajak	151.733.540.000,31	191.180.968.416,91	(39.447.428.416,60)	(20,63)
- Transfer Bantuan Keuangan	14.336.061.617,00	6.197.000.000,00	8.139.061.617,00	131,34
Jumlah	166.069.601.617,31	197.377.968.416,91	(31.308.366.799,60)	(15,86)

Uraian	TA 2020 (Rp)	TA 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
--------	--------------	--------------	--------------------------	---

6.3.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Lain-Lain PAD yang Sah oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk tahun 2020 dan 2019, yang terdiri dari:

- Pendapatan Hibah	131.339.405.650,63	156.570.706.084,74	(25.231.300.434,11)	(16,11)
- Pendapatan Lainnya	26.220.000,00	26.220.000,00	0,00	0,00
Jumlah	131.365.625.650,63	156.596.926.084,74	(25.231.300.434,11)	(16,11)

Uraian	TA 2020 (Rp)	TA 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
--------	--------------	--------------	--------------------------	---

6.3.2 Beban Operasi - LO

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Operasi oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk tahun 2020 dan 2019, yang terdiri dari:

- Beban Pegawai	745.584.609.854,00	809.354.049.356,78	(63.769.439.502,78)	(7,88)
- Beban Barang dan Jasa	726.639.379.943,47	861.932.428.480,27	(135.293.048.536,80)	(15,70)
- Beban Hibah	141.896.198.905,99	123.339.099.362,90	18.557.099.543,09	15,05
- Beban Bantuan Sosial	42.202.013.856,21	4.090.975.000,00	38.111.038.856,21	931,59





- Beban Penyusutan	156.435.532.835,12	235.426.414.499,76	(78.990.881.664,66)	(33,55)
- Beban Amortisasi	2.014.942.732,00	1.963.383.860,00	51.558.872,00	2,63
- Beban Penyisihan Piutang	33.374.075.159,47	28.254.349.107,23	5.119.726.052,24	18,12
- Beban Lain-lain	5.185.983.702,91	2.075.969.415,05	3.110.014.287,86	149,81
Jumlah	1.853.332.736.989,17	2.066.436.669.081,99	(213.103.932.092,82)	(10,31)

Uraian	TA 2020 (Rp)	TA 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
--------	--------------	--------------	--------------------------	---

6.3.2.1 Beban Pegawai - LO

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Pegawai oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk tahun 2020 dan 2019, yang terdiri dari:

- Beban Gaji dan Tunjangan	461.438.975.604,00	487.164.432.847,78	(25.725.457.243,78)	(5,28)
- Beban Tambahan Penghasilan PNS	236.774.756.805,00	266.460.753.150,00	(29.685.996.345,00)	(11,14)
- Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	17.368.321.416,00	30.843.790.226,00	(13.475.468.810,00)	(43,69)
- Insentif Pemungutan Pajak Daerah	15.449.940.000,00	23.858.200.000,00	(8.408.260.000,00)	(35,24)
- Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	4.277.666.244,00	1.026.873.133,00	3.250.793.111,00	316,57
- Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Perangkat Daerah	10.274.949.785,00	0,00	10.274.949.785,00	0,00
Jumlah	745.584.609.854,00	809.354.049.356,78	(63.769.439.502,78)	(7,88)

Beban insentif pemungutan retribusi daerah sebesar Rp4.277.666.244,00 sudah termasuk insentif tenaga kesehatan yang bersumber dari Belanja Tak Terduga untuk penanganan Covid-19 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp3.764.036.640,00.

Uraian	TA 2020 (Rp)	TA 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
--------	--------------	--------------	--------------------------	---

6.3.2.2 Beban Barang dan Jasa

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Barang dan Jasa oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk tahun 2020 dan 2019, yang terdiri dari:

- Beban Persediaan	125.151.429.527,24	207.920.455.708,43	(82.769.026.181,19)	(39,81)
- Beban Jasa dan Pemeliharaan	579.305.830.938,23	581.169.192.006,96	(1.863.361.068,73)	(0,03)
- Beban Perjalanan Dinas	19.482.119.478,00	70.157.780.764,88	(50.675.661.286,88)	(72,23)





- Beban Barang BOS	2.700.000.000,00	2.685.000.000,00	15.000.000,00	0,56
Jumlah	726.639.379.943,47	861.932.428.480,27	(135.293.048.536,80)	(15,70)

- a) Beban persediaan terdiri dari beban bahan pakai habis sebesar Rp92.257.052.555,81 dan beban persediaan bahan/material sebesar Rp32.894.376.971,43. Jumlah beban bahan pakai habis sebesar Rp92.257.052.555,81 sudah termasuk Pengakuan beban atas belanja pakai habis yang bersumber dari Belanja Tak Terduga sebesar Rp2.868.160.536,00.
- b) Beban jasa dan pemeliharaan merupakan jumlah beban barang dan jasa di luar beban bahan pakai habis, beban persediaan bahan/material, beban perjalanan dinas, dan beban barang dana bos. Beban jasa dan pemeliharaan termasuk pendapatan hibah obat (*non cash*) pada RSUD Wangaya sebesar Rp9.680.693.797,60 dan belanja jasa dan pemeliharaan yang bersumber dari Belanja Tak Terduga sebesar Rp8.073.440.375,00 serta terdapat reklasifikasi dari beban barang dan jasa ke aset tak berwujud atas belanja pengembangan *website* pada RSUD Wangaya sebesar Rp14.500.000,00 dan reklasifikasi dari beban barang dan jasa ke aset tetap peralatan dan mesin atas belanja pemasangan *exhaust fan* di ruang IGD pada RSUD Wangaya sebesar Rp16.950.000,00.

Uraian	TA 2020 (Rp)	TA 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
--------	--------------	--------------	--------------------------	---

6.3.2.3 Beban Hibah

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Hibah oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk tahun 2020 dan 2019, yang terdiri dari:

- Beban kepada Pemerintah	67.540.912.450,00	3.950.000.000,00	63.590.912.450,00	1.609,90
- Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	9.944.140.000,00	1.824.650.000,00	8.119.490.000,00	444,99
- Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	48.972.592.986,99	93.754.703.800,00	(44.782.110.813,01)	(47,70)
- Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	994.189.649,00	0,00	994.189.649,00	0,00
- Beban Barang yang diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	12.267.715.470,00	23.809.745.562,90	(11.542.030.092,90)	(48,48)
- Beban Hibah.	2.176.648.350,00	0,00	2.176.648.350,00	0,00
Jumlah	141.896.198.905,99	123.339.099.362,90	18.557.099.543,09	15,05

Beban hibah, sebesar Rp2.176.648.350,00 merupakan pengakuan beban atas penghapusan aset tetap tanah yang terdiri dari :

- Hibah ke Desa Sanur Kaja sebesar Rp908.000.000,00
- Hibah ke Desa Ubung Kaja sebesar Rp299.825.000,00
- Hibah ke Dusun Padang Sambian Kaja sebesar Rp805.503.000,00
- Objek Tukar Menukar SD Negeri 3 Sanur sebesar Rp163.320.350,00





Uraian	TA 2020 (Rp)	TA 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
--------	--------------	--------------	--------------------------	---

6.3.2.4 Beban Bantuan Sosial

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Bantuan Sosial oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk tahun 2020 dan 2019, yang terdiri dari:

- Beban Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	42.202.013.856,21	4.090.975.000,00	38.111.038.856,21	931,59
Jumlah	42.202.013.856,21	4.090.975.000,00	38.111.038.856,21	931,59

Uraian	TA 2020 (Rp)	TA 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
--------	--------------	--------------	--------------------------	---

6.3.2.5 Beban Penyusutan

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Penyusutan oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk tahun 2020 dan 2019, yang terdiri dari:

- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	73.531.963.088,29	65.282.876.919,04	8.249.086.169,25	12,64
- Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	15.431.064.205,00	18.288.916.033,00	(2.857.851.828,00)	(15,63)
- Beban Penyusutan Jalan Irigasi, dan Jaringan	68.031.611.963,22	142.232.261.161,23	(74.200.649.198,01)	(52,17)
- Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.971.281.251,61	2.112.493.422,20	(141.212.170,59)	(6,68)
- Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	(2.530.387.673,00)	7.509.866.964,29	(10.040.254.637,29)	(133,69)
Jumlah	156.435.532.835,12	235.426.414.499,76	(78.990.881.664,64)	(33,55)

Uraian	TA 2020 (Rp)	TA 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
--------	--------------	--------------	--------------------------	---

6.3.2.6 Beban Amortisasi

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Amortisasi oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk tahun 2020 dan 2019, yang terdiri dari:

- Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	2.014.942.732,00	1.963.383.860,00	51.558.872,00	(2,63)
Jumlah	2.014.942.732,00	1.963.383.860,00	51.558.872,00	(2,63)





Uraian	TA 2020 (Rp)	TA 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
6.3.2.7 Beban Penyisihan Piutang				
Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Penyisihan Piutang oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk tahun 2020 dan 2019, yang terdiri dari:				
- Beban Penyisihan Piutang Pajak	32.157.242.148,18	27.134.829.259,10	5.022.412.889,08	18,51
- Beban Penyisihan Piutang Retribusi	63.801.017,50	60.782.863,50	3.018.154,00	4,97
- Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	(20.235.588,49)	(3.349.468,74)	(16.886.119,75)	504,14
- Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.231.381.164,49	1.235.141.670,47	(3.760.505,98)	(0,30)
- Beban Penyisihan Dana Bergulir	0,00	(5.000.000,00)	5.000.000,00	(100,00)
- Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan KDYD	(58.113.582,21)	(168.055.217,10)	109.941.634,89	(65,42)
Jumlah	33.374.075.159,47	28.254.349.107,23	5.119.726.052,24	18,12

Uraian	TA 2020 (Rp)	TA 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
6.3.2.8 Beban lain-lain	5.185.983.702,91	2.075.969.415,05	3.110.014.287,86	149,81

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Lain-Lain oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk tahun 2020 dan 2019. Beban lain-lain – LO tahun 2020 terdiri atas:

1. Belanja Tak terduga di luar untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp238.320.679,91.
2. Pengakuan kerugian Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma tahun 2020 sebesar Rp1.932.607.628,00.
3. Pengakuan kerugian Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma tahun 2020 sebesar Rp794.467.262,00 pada PPKD.
4. Data *extrakompatabel* aset beberapa OPD yaitu:
 - Disdikpora sebesar Rp426.687.017,39
 - Dinas Kesehatan sebesar Rp53.715.679,00
 - RSUD Wangaya sebesar Rp14.257.300,00
 - PUPR sebesar Rp421.175.706,00,Perkim sebesar Rp10.280.000,00
 - DLHK sebesar Rp378.044.000,00
 - Dinas Capil sebesar Rp1.160.000,00
 - Dinas Perhubungan sebesar Rp644.565.500,61
 - Dinas Arsip sebesar Rp8.614.430,00
 - Dinas Pertanian sebesar Rp29.480.000,00
 - Kecamatan Denpasar Barat sebesar Rp131.911.500,00
 - Kecamatan Denpasar Timur sebesar Rp56.376.000,00
 - Kecamatan Denpasar Selatan sebesar Rp 15.906.000,00
 - Pengelola Barang Daerah Rp28.415.000,00.





Uraian	TA 2020 (Rp)	TA 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
--------	--------------	--------------	--------------------------	---

6.3.3 Beban Transfer

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Transfer oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk tahun 2020 dan 2019, yang terdiri dari:

1. Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan	47.717.586.800,00	77.845.228.000,00	(30.127.641.200,00)	(38,70)
2. Beban Transfer Bantuan Keuangan	76.060.500.000,00	88.474.504.481,94	(12.414.004.481,94)	(14,03)
Jumlah	123.778.086.800,00	166.319.732.481,94	(42.541.645.681,94)	(25,58)

Beban Transfer Bantuan Keuangan tersebut terdiri dari:

- Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	76.060.500.000,00	87.009.861.643,94	(10.949.361.643,94)	(12,58)
- Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	1.464.642.838,00	(1.464.642.838,00)	(100,00)

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa tidak termasuk Beban Transfer Dana Desa karena bukan merupakan beban pemda disebabkan karena dana desa masuk ke kas daerah dan langsung disalurkan ke desa sebesar Rp36.621.601.000,00.

Uraian	TA 2020 (Rp)	TA 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
--------	--------------	--------------	--------------------------	---

6.3.4 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Defisit dari Kegiatan Non Operasional oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk tahun 2020 dan 2019, yang terdiri dari:

- Defisit Penjualan Aset Non Lancar	6.219.700.480,15	11.984.845.722,13	(5.765.145.241,98)	(48,10)
- Defisit dari Kegiatan Non Operasional	3.592.534.534,84	82.282.670,10	3.510.251.864,74	4.266,09
- Lainnya				
Jumlah	9.812.235.014,99	12.067.128.392,23	(2.254.893.377,24)	(18,69)

Uraian	TA 2020 (Rp)	TA 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
--------	--------------	--------------	--------------------------	---

6.3.5 Surplus/(Defisit) – LO

Jumlah tersebut merupakan nilai Surplus dari Kegiatan Operasional yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar selama tahun 2020 dan 2019, yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:





Kegiatan Operasional

Pendapatan Operasional	1.997.231.738.329,04	2.283.725.980.036,58	(286.494.241.707,54)	(12,55)
Beban Operasional	1.853.332.736.989,17	2.066.436.669.081,99	(213.103.932.092,82)	(10,31)
Beban Transfer	123.778.086.800,00	166.319.732.481,94	(42.541.645.681,94)	(25,58)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	20.120.914.539,87	50.969.578.472,65	(30.848.663.932,78)	(60,52)
Defisit Non Operasional	9.812.235.014,99	12.067.128.392,23	(2.254.893.377,24)	(18,69)
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	10.308.679.524,88	38.902.450.080,42	(28.593.770.555,54)	(73,50)
Pos Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	-
Surplus/Defisit Laporan Operasional	10.308.679.524,88	38.902.450.080,42	(28.593.770.555,54)	(73,50)

6.4. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah Laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas selama tahun anggaran 2020 dan 2019, yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
6.4.1 Ekuitas Awal	Rp 6.196.323.480.708,77	Rp 6.019.446.672.858,64

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Awal tahun 2020 dan 2019 per 31 Desember 2020.

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
6.4.2 Surplus/(Defisit) – LO	Rp 10.308.679.524,88	Rp 38.902.450.080,42

Jumlah tersebut merupakan saldo Surplus/(Defisit) – LO Pemerintah Kota Denpasar untuk tahun 2020 dan 2019.

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
6.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	Rp 66.096.050.916,85	Rp 137.974.357.769,71
- Koreksi Aset Tetap Tanah	Rp 35.344.476.000,00	Rp 1.986.720.000,00
- Koreksi Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp 274.552.625,00	Rp 8.764.817.199,00
- Koreksi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp 30.250.952.000,00	Rp 10.493.050.214,00
- Koreksi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp 1.002.416.234,00	Rp 117.215.238.980,00
- Koreksi Aset Tetap Lainnya	Rp (860.115.492,00)	Rp (206.510.035,00)
- Koreksi KDP	Rp (1.499.233.455,00)	Rp 391.350.000,00
- Koreksi Aset Lain-Lain	Rp (417.460.000,00)	Rp 428.961.120,61
- Koreksi Aset Tak Berwujud	Rp 13.380.000,00	Rp 24.750.000,00





- Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	0,00	Rp	529.372.000,00
- Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Rp	699.749.370,50	Rp	0,00
- Koreksi Penyertaan Modal	Rp	(0,15)	Rp	0,10
- Koreksi Pendapatan Pajak Daerah	Rp	(19.403.857,50)	Rp	(751.359.104,00)
- Koreksi Denda Pajak	Rp	19.807.223,00	Rp	0,00
- Koreksi Dana Bergulir	Rp	0,00	Rp	(5.000.000,00)
- Koreksi Hutang Belanja Modal	Rp	717.932.605,00	Rp	(717.902.605,00)
- Koreksi Hutang Belanja Transfer	Rp	568.997.664,00	Rp	0,00
- Koreksi Piutang Lain-Lain	Rp	0,00	Rp	40.000,00
- Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka	Rp	0,00	Rp	(179.170.000,00)
- Koreksi Barang Masuk Antar OPD	Rp	158.492.397.534,51	Rp	265.790.650.364,15
- Koreksi Barang Keluar Antar OPD	Rp	(158.492.397.534,51)	Rp	(265.790.650.364,15)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
6.4.4 Ekuitas Akhir	Rp 6.272.728.211.150,50	Rp 6.196.323.480.708,77

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Akhir Pemerintah Kota Denpasar per 31 Desember 2020 dan 2019. Saldo Ekuitas Akhir tersebut diperoleh dari penjumlahan ekuitas awal ditambah Surplus/(Defisit) – LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada masing-masing tahunnya. Saldo Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2020 dan 2019.

6.5. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
6.5.1. ASET	Rp 6.297.773.657.358,76	Rp 6.229.493.186.998,86
A. ASET LANCAR	Rp 615.421.207.191,13	Rp 531.230.290.199,36
1) Kas di Kas Daerah	Rp 274.802.704.477,01	Rp 226.175.517.105,65
Saldo Kas di Kas Daerah tersebut merupakan saldo Rekening Kas Umum Daerah Kota Denpasar per 31 Desember 2020 dan 2019 yang ditempatkan di PT Bank BPD Bali pada Rekening Giro Nomor 011.01.05.00001-2 yang digunakan untuk menampung seluruh transaksi kas daerah yang meliputi pengeluaran dan penerimaan dari PAD serta transfer dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sebagai berikut:		
a. Rekening Kas Umum Daerah	Rp 274.802.704.477,01	Rp 226.175.517.105,65

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
2) Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 15.147.000,00	Rp 16.183.000,00

Jumlah tersebut merupakan Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 dan 2019. Adapun rincian selengkapnya seperti di bawah ini:

a) Dinas Kesehatan	Rp	11.508.500,00	Rp	14.696.000,00
b) Dinas Perhubungan	Rp	1.197.000,00	Rp	803.000,00





- c) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Rp 1.439.000,00 Rp 684.000,00
- d) Dinas Pertanian Rp 1.002.500,00 Rp 0,00
- Penyetoran untuk kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2020 seluruhnya telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 4 Januari 2021 dan untuk kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2019 seluruhnya telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 2 Januari 2020.

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
3) Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 67.115.799,00	Rp 6.320.610,00

Saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2019 tersebut merupakan merupakan dana PFK diantaranya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp180.000,00 yang merupakan belanja tahun 2019 yang belum ditransfer kepada pihak ketiga atas uang beras dan simpanan wajib koperasi serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp6.140.610,00 karena terdapat kelebihan pengamprahan belanja BPJS bulan Desember 2019. Atas dana PFK tersebut sudah dibayarkan tanggal 14 Januari 2020.

Sedangkan saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2020 merupakan dana PFK pada Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya sebesar Rp67.115.799,00 berupa iuran pembayaran BPJS bulan Desember 2020 yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum dibayarkan ke BPJS. Atas dana PFK pada Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya dibayarkan ke BPJS tanggal 21 Januari 2021. Data terinci dapat dilihat pada *lampiran 1* Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020.

Per 31 Desember 2020 terdapat saldo pada rekening di sekolah-sekolah tetapi bukan merupakan bagian dari Kas Daerah Kota Denpasar. Saldo rekening per 31 Desember 2020 bersumber dari rekening gaji sekolah SD Negeri pada 167 sekolah sebesar Rp8.506.992,68 dan dari rekening gaji sekolah SMP Negeri pada 13 sekolah sebesar Rp1.107,16. Data lebih terperinci dapat dilihat pada *lampiran 1a* Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020.

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
4) Kas di BLUD	Rp 23.305.081.922,87	Rp 119.425.537,13
Merupakan saldo Kas per 31 Desember 2020 dan 2019 pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya yang terdiri atas:		
a) Saldo Kas di Rekening BLUD	Rp 23.276.416.448,21	Rp 99.524.983,79
b) Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 28.665.474,66	Rp 19.900.553,34

Selain rekening yang digunakan untuk operasional BLUD, RSUD Wangaya juga memiliki dua buah rekening lain yaitu rekening untuk menampung dana APBD dengan nomor rekening 011.01.00.01953-0 dan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp67.115.799,00. Serta, rekening untuk menampung pinjaman dari PT Bank BPD Bali dengan nomor rekening 011.01.05.00631-6 dan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00.





Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
5) Kas di Bendahara FKTP	Rp 3.308.176.246,42	Rp 4.354.183.239,42
Kas bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dari Dana Kapitasi JKN per 31 Desember 2020 dan 2019 yang terdiri atas:		
a) Puskesmas I Denpasar Utara	Rp 311.519.573,00	Rp 352.236.110,00
b) Puskesmas II Denpasar Utara	Rp 240.648.977,00	Rp 423.924.698,00
c) Puskesmas III Denpasar Utara	Rp 378.305.578,00	Rp 538.697.487,00
d) Puskesmas I Denpasar Timur	Rp 435.520.869,00	Rp 484.925.158,00
e) Puskesmas II Denpasar Timur	Rp 356.307.676,86	Rp 523.282.466,86
f) Puskesmas I Denpasar Barat	Rp 391.839.703,00	Rp 492.942.969,00
g) Puskesmas II Denpasar Barat	Rp 311.301.515,00	Rp 413.769.964,00
h) Puskesmas I Denpasar Selatan	Rp 216.730.799,00	Rp 278.831.428,00
i) Puskesmas II Denpasar Selatan	Rp 167.572.875,00	Rp 285.298.818,00
j) Puskesmas III Denpasar Selatan	Rp 209.097.852,56	Rp 187.659.222,56
k) Puskesmas IV Denpasar Selatan	Rp 289.330.828,00	Rp 372.614.918,00

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
6) Kas di Bendahara BOS	Rp 11.370.944.863,70	Rp 6.648.107.916,60
Saldo tersebut merupakan kas pada bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) per 31 Desember 2020 dan 2019.		
Saldo Dana BOS tersebut merupakan saldo tahun 2020 yang dicatat di Neraca, Laporan LO dan LPE atas Sekolah Negeri yang ada di Pemerintah Kota Denpasar yaitu untuk SD sebesar Rp6.705.444.646,65 dan SMP sebesar Rp4.665.500.217,05. Secara lebih rinci saldo Kas Dana BOS untuk setiap sekolah SD dan SMP Negeri dapat dilihat pada <i>lampiran 2</i> dan <i>lampiran 2a</i> Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2020.		

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
7) Kas Lainnya	Rp 0,00	Rp 110.372.772,21
Kas lainnya merupakan bagian kas BUD yang salah satunya berasal dari kas di bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari uang persediaan tetapi memenuhi kriteria, definisi, pengakuan dan pengukuran sebagai kas per 31 Desember 2020 dengan saldo sebagai berikut:		
a) Kas Lainnya - Bunga Tabungan Dana Bergulir di Koperasi	Rp 0,00	Rp 26.515.143,75
b) Kas Lainnya - Bunga Tabungan Dana Bergulir di LPD	Rp 0,00	Rp 83.857.628,46





Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
--------	------------------	------------------

8) Bagian Lancar TGR **Rp 1.302.696.991,00 Rp 1.302.696.991,00**

Jumlah tersebut merupakan nilai Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diterbitkan SK Pembebanan SKTJM tanggal 31 Desember 2019. Kasus ganti kerugian daerah yang belum ditetapkan SK Pembebanan maupun SKTJM atau belum diproses penyelesaiannya namun masih berupa informasi kerugian daerah sebanyak 270 kasus senilai Rp19.410.559.603,47.

Adapun rincian dari Bagian Lancar TGR terdiri dari:

a) Tuntutan Perbendaharaan (TP)	Rp 897.130.991,00	Rp 897.130.991,00
b) Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	Rp 405.566.000,00	Rp 405.566.000,00

Tuntutan Perbendaharaan sebesar Rp897.130.991,00 tersebut berasal dari temuan Inspektorat Kota Denpasar yang merupakan jenis kasus pajak/retribusi tidak disetor atas nama I Wayan Renda dengan jabatan sebagai Bendahara Penerimaan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar.

Sedangkan, Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp405.566.000,00 tersebut berasal dari temuan BPK yang status penyelesaiannya masih dalam proses atas kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang atas nama A.A Ngurah Oka Yuda dengan status Non Pegawai.

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
--------	------------------	------------------

9) Penyisihan Piutang TGR **Rp (1.302.696.991,00) Rp (1.302.696.991,00)**

Merupakan jumlah taksiran kemungkinan tidak tertagih atas piutang TGR per 31 Desember 2020, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih sebesar Rp(1.302.696.991,00). Piutang TGR disisihkan sebesar 100% karena lebih dari 5 tahun dan termasuk dalam kategori macet. Piutang TGR terjadi pada tahun 2009.

Rincian selengkapnya untuk Piutang TGR tahun 2020 seperti tercantum pada **Lampiran 3** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020.

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
--------	------------------	------------------

10) Piutang Pajak **Rp 544.074.834.875,61 Rp 483.689.239.404,57**

Merupakan hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang per 31 Desember 2019 belum dilunasi. Piutang pajak yang dimiliki Pemerintah Kota Denpasar terdiri dari:

a) Pajak Hotel	Rp 18.531.693.389,63	Rp 9.862.937.737,70
b) Pajak Restoran	Rp 8.501.524.712,15	Rp 4.648.002.592,84
c) Pajak Hiburan	Rp 1.973.125.244,51	Rp 2.280.683.285,71
d) Pajak Air Tanah	Rp 10.093.572.211,00	Rp 8.752.054.347,00
e) Pajak Reklame	Rp 1.208.618.925,32	Rp 1.208.618.925,32
f) PBB Pedesaan dan Perkotaan	Rp 502.437.427.393,00	Rp 456.213.412.916,00
	Rp 1.328.873.000,00	Rp 723.529.600,00
g) Pajak Parkir		

Nilai piutang pajak sebesar Rp544.074.834.875,61 termasuk koreksi piutang pajak sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp19.403.857,50 yang terdiri dari koreksi piutang Pajak Restoran sebesar Rp16,50, Pajak Air Bawah Tanah sebesar Rp10.772.648,00, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp8.631.193,00





Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
--------	------------------	------------------

11) Penyisihan Piutang Pajak Rp (317.932.901.217,11) Rp (285.775.659.068,93)

Penyisihan piutang tak tertagih Piutang Pajak adalah taksiran nilai piutang pajak yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan Piutang Pajak yang dimiliki Pemerintah Kota Denpasar terdiri dari:

(a) Pajak Hotel	Rp (4.385.103.269,04)	Rp (2.948.498.366,17)
(b) Pajak Restoran	Rp (3.076.766.441,15)	Rp (2.125.832.536,62)
(c) Pajak Hiburan	Rp (1.409.337.798,33)	Rp (1.228.604.292,74)
(d) Pajak Air Tanah/ABT	Rp (8.292.723.208,16)	Rp (8.143.125.569,08)
(e) Pajak Reklame	Rp (1.208.618.925,32)	Rp (1.208.618.925,32)
(f) PBB Pedesaan dan Perkotaan	Rp (299.344.448.745,41)	Rp (270.086.896.333,00)
(g) Pajak Parkir	Rp (215.902.829,70)	Rp (34.083.046,00)

Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang. Rincian selengkapnya untuk Piutang Pajak dan Penyisihan Piutang Pajak Tahun 2020 untuk masing-masing jenis pajak dapat dilihat pada *lampiran 4* Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020.

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
--------	------------------	------------------

12) Piutang Retribusi Rp 574.183.825,00 Rp 799.709.865,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Retribusi tahun 2020 dan 2019, yang terdiri dari:

a) Retribusi Sewa Kios dan Los pada Dinas Perhubungan	Rp 285.222.825,00	Rp 220.889.550,00
b) Retribusi pelayanan kebersihan dari swalayan dan toserba	Rp 69.600.000,00	Rp 69.600.000,00
c) Retribusi Kebersihan dari PDAM	Rp 219.361.000,00	Rp 220.895.000,00
d) Retribusi IMB pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp 0,00	Rp 234.772.753,00
e) Retribusi Gangguan (HO) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp 0.00	Rp 53.552.562,00

Nilai piutang retribusi sebesar Rp574.183.825,00 termasuk penghapusan piutang retribusi sebesar Rp288.325.315,00 yang terdiri dari piutang retribusi IMB sebesar Rp234.772.753,00 dan retribusi gangguan (HO) sebesar 53.552.562,00 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/984/HK/2020 tentang Penghapusan Piutang Retribusi Izin Gangguan yang Sudah Kadaluwarsa tanggal 20 Oktober 2020.





Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
13) Penyisihan Piutang Retribusi	Rp (335.100.326,00)	Rp (559.624.623,50)
Jumlah tersebut merupakan Penyisihan Piutang Retribusi tahun 2020 dan 2019, yang terdiri dari:		
(h)Retribusi Sewa Kios dan Los pada Dinas Perhubungan	Rp (264.403.521,00)	Rp (200.594.833,50)
(i) Retribusi pelayanan kebersihan dari swalayan dan toserba	Rp (69.600.000,00)	Rp (69.600.000,00)
(j) Retribusi Kebersihan dari PDAM	Rp (1.096.805,00)	Rp (1.104.475,00)
(k)Retribusi IMB pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu satu Pintu dan Penanaman Modal	Rp (0,00)	Rp (234.772.753,00)
(l) Retribusi Gangguan (HO) pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu satu Pintu dan Penanaman Modal	Rp (0,00)	Rp (53.552.562,00)
Rincian selengkapnya untuk Piutang Retribusi dan Penyisihan Piutang Retribusi tahun 2020 untuk masing-masing jenis retribusi dapat dilihat pada <i>lampiran 5</i> Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020.		

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
14) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 287.968.105,25	Rp 11.910.684.547,40
Jumlah tersebut merupakan Piutang Deviden tahun 2020 dan 2019, yang terdiri dari:		
a) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma	Rp 0,00	Rp 11.622.716.442,15
b) Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma	Rp 287.968.105,25	Rp 287.968.105,25
Piutang deviden tahun 2019 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma berdasarkan Laporan Audit KAP Tanggal 20 Januari 2020. Piutang deviden tahun 2019 pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma berdasarkan Laporan Audit KAP.		
Piutang deviden tahun 2020 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma berdasarkan Laporan Audit KAP Nomor 00002/2.0079/AU.2/05/0822-3/1/II/2021 tanggal 4 Februari 2021. Piutang deviden Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma tahun 2020 merupakan piutang deviden tahun 2019 yang baru dibayarkan ke kas daerah Kota Denpasar tanggal 11 Februari 2021.		





Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
15) Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp (1.439.840,53)	Rp (59.553.422,74)

Jumlah tersebut merupakan Penyisihan Piutang Deviden tahun 2020 dan 2019, yang terdiri dari:

a) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma	Rp 0,00	Rp (58.113.582,21)
b) Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma	Rp (1.439.840,53)	Rp (1.439.840,53)

Rincian selengkapnya untuk Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2020 dapat dilihat pada ***lampiran 6*** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020.

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
16) Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	Rp 11.020.641.186,89	Rp 15.067.758.884,74

Pengakuan piutang berdasarkan Surat dari Provinsi Bali Nomor 900/522/Bid.PAD-BPKAD tanggal 1 Pebruari 2021 mengenai Kewajiban Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali Tahun Anggaran 2020. Jumlah tersebut karena adanya pengakuan Hutang Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Bali kepada Kota Denpasar tahun 2020 dan 2019 yang terdiri dari:

a) PKB	Rp 7.323.651.947,64	Rp 7.279.401.232,89
b) BBNKB	Rp 1.530.038.801,51	Rp 4.753.842.827,68
c) PBBKB	Rp 2.150.244.043,98	Rp 3.013.605.485,84
d) PPAP	Rp 16.706.393,76	Rp 20.909.338,33

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
17) Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	Rp (55.103.205,93)	Rp (75.338.794,42)

Jumlah tersebut merupakan Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih tahun 2020 dan 2019 yang terdiri dari:

a) PKB	Rp (36.618.259,73)	Rp (36.397.006,16)
b) BBNKB	Rp (7.650.194,01)	Rp (23.769.214,14)
c) PBBKB	Rp (10.751.220,22)	Rp (15.068.027,43)
d) PPAP	Rp (83.531,97)	Rp (104.546,69)

Rincian selengkapnya untuk Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2020 untuk masing-masing jenis piutang dapat dilihat pada ***lampiran 7*** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020.





Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
18) Piutang Lain-lain	Rp 28.048.815.276,28	Rp 26.851.230.917,01
Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 2019 yang terdiri dari piutang BLUD, piutang denda pajak dan piutang denda retribusi dengan rincian sebagai berikut:		
a) Piutang Umum pada RSUD Wangaya	Rp 3.050.208.471,95	Rp 2.671.169.048,81
b) Piutang Karyawan pada RSUD Wangaya	Rp 12.765.532,59	Rp 18.670.510,65
c) Piutang BPJS pada RSUD Wangaya	Rp 3.134.773.700,00	Rp 16.269.519.700,00
d) Piutang IKS pada RSUD Wangaya	Rp 822.402.062,78	Rp 908.839.008,48
e) Piutang COVID-19	Rp 9.176.926.400,00	Rp 0,00
f) Piutang Denda Pajak Hotel	Rp 7.161.425.776,16	Rp 4.353.870.524,16
g) Piutang Denda Pajak Restoran	Rp 3.147.485.064,80	Rp 1.718.767.257,91
h) Piutang Denda Pajak Hiburan	Rp 487.161.651,00	Rp 363.651.880,00
i) Piutang Denda Pajak ABT	Rp 552.986.682,00	Rp 326.980.169,00
j) Piutang Denda Pajak Parkir	Rp 491.044.388,00	Rp 205.305.401,00
k) Piutang Denda Retribusi Sewa Kios dan Los	Rp 5.697.247,00	Rp 4.417.791,00
l) Piutang Denda IMB	Rp 0,00	Rp 8.174.901,00
m) Piutang Denda HO	Rp 0,00	Rp 1.864.725,00
n) Piutang Retribusi Parkir yang dikelola Perusda Bhukti Praja Sewakadarma	Rp 5.938.300,00	Rp 0,00

Nilai piutang lain lain-lain sebesar Rp28.048.815.276,28 termasuk koreksi saldo awal piutang denda pajak daerah sebesar Rp19.807.223,00 yang terdiri dari penyesuaian piutang denda pajak

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
19) Penyisihan Piutang Lain-lain	Rp (7.069.246.447,40)	Rp (5.847.904.908,91)
Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Piutang Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 2019 yang terdiri dari:		
a) Piutang Umum pada RSUD Wangaya	Rp (2.655.563.444,66)	Rp (2.410.527.765,96)
b) Piutang Karyawan pada RSUD Wangaya	Rp (1.703.706,29)	Rp (6.604.925,99)
c) Piutang BPJS pada RSUD Wangaya	Rp (15.673.868,50)	Rp (1.096.946.932,00)
d) Piutang IKS pada RSUD Wangaya	Rp (724.039.880,71)	Rp (529.580.040,83)
e) Piutang COVID-19	Rp (45.884.632,00)	Rp (0,00)
f) Piutang Denda Pajak Hotel	Rp (1.892.012.542,56)	Rp (1.069.089.513,97)
g) Piutang Denda Pajak Restoran	Rp (1.262.169.070,43)	Rp (517.072.598,30)
h) Piutang Denda Pajak Hiburan	Rp (172.917.879,72)	Rp (92.314.888,64)





i) Piutang Denda Pajak ABT	Rp	(161.749.053,07)	Rp	(98.736.234,89)
j) Piutang Denda Pajak Parkir	Rp	(132.221.818,66)	Rp	(14.823.051,63)
k) Piutang Denda Retribusi Sewa Kios dan Los	Rp	(5.280.859,30)	Rp	(2.169.330,70)
l) Piutang Denda IMB	Rp	0,00	Rp	(8.174.901,00)
m) Piutang Denda HO	Rp	0,00	Rp	(1.864.725,00)
n) Retribusi Parkir yang dikelola Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma	Rp	(29.691,50)	Rp	0,00

Rincian selengkapnya Piutang Lain-lain dan Penyisihan Piutang Lain-lain tahun 2020 seperti tercantum pada *lampiran 8, lampiran 8a, lampiran 8b, lampiran 8c dan lampiran 8d* Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020.

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
20) Biaya Sewa Dibayar Dimuka	Rp 192.733.333,33	Rp 524.233.333,33
Jumlah tersebut merupakan sewa gedung dibayar dimuka per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang terdiri dari:		
a) Rumah Jabatan Walikota	Rp 19.900.000,00	Rp 119.400.000,00
b) Rumah Jabatan Wakil Walikota	Rp 19.750.000,00	Rp 19.750.000,00
c) Rumah Jabatan Sekretaris Daerah	Rp 0,00	Rp 97.500.000,00
d) Bangunan Gudang untuk Bagian Umum	Rp 0,00	Rp 62.500.000,00
e) Bangunan Gedung untuk gudang BPKAD	Rp 32.083.333,33	Rp 67.083.333,33
f) Tanah untuk garasi kendaraan operasional Bagian Umum Setda Kota Denpasar	Rp 14.666.666,66	Rp 36.666.666,66
g) Kantor Banwaslu Kota Denpasar	Rp 32.166.666,67	Rp 32.166.666,67
h) Gudang Arsip dan Barang Inventaris Lainnya	Rp 55.000.000,00	Rp 36.666.666,67
i) Tanah untuk Gudang Material Dinas PU Kota Denpasar	Rp 19.166.666,67	Rp 52.500.000,00

Rincian Biaya Sewa Dibayar Dimuka tahun 2020 seperti tercantum pada *lampiran 9* Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020.

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
21) Biaya Asuransi Dibayar Dimuka	Rp 303.089.385,67	Rp 242.670.159,53
Jumlah tersebut merupakan asuransi dibayar dimuka per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang terdiri dari:		
a) Gedung Pemerintah Kota Denpasar	Rp 182.181.310,67	Rp 109.411.828,91
b) Gedung Kantor	Rp 29.424.741,67	Rp 29.504.163,96





- c) Asuransi Kendaraan Dinas Jabatan Rp 0,00 Rp 12.270.833,33
- d) Asuransi Pohon Perindang Rp 91.483.333,33 Rp 91.483.333,33

Rincian Biaya Asuransi Dibayar Dimuka tahun 2020 seperti tercantum pada ***lampiran 10*** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020.

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
22) Persediaan	Rp 43.443.561.931,07	Rp 47.032.733.725,27
Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan berupa alat tulis kantor (ATK), bahan cetak, obat-obatan, sparepart/material/BBM dan persediaan lainnya seperti bahan pembersih dan lain-lain yang ada pada SKPD per 31 Desember 2020 dan 2019 yang terdiri dari:		
a) ATK	Rp 1.276.814.971,00	Rp 1.291.326.983,00
b) Barang Cetakan	Rp 1.721.201.299,20	Rp 1.526.351.334,20
c) Obat-Obatan	Rp 9.257.469.997,91	Rp 14.073.763.285,33
d) Obat Hibah	Rp 11.655.961.722,57	Rp 4.479.550.330,44
e) Barang Kuasi/leges	Rp 28.465.000,00	Rp 16.783.000,00
f) Sparepart/Material/BBM	Rp 4.318.432.709,30	Rp 4.009.275.055,00
g) Alat Listrik	Rp 1.972.335.640,00	Rp 882.064.308,00
h) Lainnya	Rp 12.220.339.878,09	Rp 9.360.724.692,86
i) Hibah CSR	Rp 147.629.824,00	Rp 0,00
j) Persediaan barang yang diserahkan kepada pihak ketiga	Rp 844.910.889,00	Rp 11.392.894.736,44

Rincian persediaan dapat dilihat pada ***lampiran 11*** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020. Rincian selengkapnya Persediaan tahun 2020 seperti tercantum pada ***lampiran 11a*** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020.

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
B. INVESTASI JANGKA PANJANG	Rp 482.792.836.526,05	Rp 477.201.815.620,05
1) Investasi Non Permanen	Rp 3.500.000.000,00	Rp 3.500.000.000,00
Jumlah tersebut merupakan nilai Investasi Non Permanen Dana Bergulir Pemerintah Kota Denpasar per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, terdiri dari:		
a) Dana Bergulir LPD (Bagian Ekonomi)	Rp 3.500.000.000,00	Rp 3.500.000.000,00
b) Dana Bergulir Koperasi (Dinas Koperasi dan UKM)	Rp 161.000.000,00	Rp 166.000.000,00
c) Penyisihan Dana Bergulir	Rp (161.000.000,00)	Rp (166.000.000,00)

Dana bergulir LPD sebesar Rp3.500.000.000,00 tersebut dikelola oleh Bagian Ekonomi, yang digunakan untuk peningkatan kemampuan LPD. Saldo tersebut seluruhnya beradadi rekening pengelolaan dana bergulir LPD Kota Denpasar yang disimpan pada BPD Bali dengan nomor rekening 011.02.02.21923-2. Saat ini dana tersebut sudah tidak ada yang beredar/digulirkan kepada LPD. Dana bergulir Koperasi sebesar Rp161.000.000,00 ditangani oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar. Dalam pengelolaan dana bergulir tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM membuka dua buah rekening di BPD Bali yaitu rekening yang digunakan untuk menampung pokok dana bergulir dengan nomor rekening 011.02.02.27568-8 dan rekening untuk menampung bunga dana bergulir dengan nomor rekening 011.02.02.27569-1. Dana bergulir koperasi yang saat ini masih beredar





sebesar Rp161.000.000,00 tersebut seluruhnya dalam kategori macet/diragukan tertagih (100%). Rincian dana bergulir LPD dan Koperasi per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada ***lampiran 12*** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020.

Uraian		31 Desember 2020	31 Desember 2019
2) Investasi	Permanen	Rp 479.292.836.526,05	Rp 473.701.815.620,05
Penyertaan	Modal		
Pemerintah Kota Denpasar			
Jumlah tersebut merupakan nilai investasi per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar, Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma Kota Denpasar, Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma Kota Denpasar dan PT Jamkrida Bali atas penyertaan modal Pemerintah Kota Denpasar dengan rincian sebagai berikut:			
a) PT. BPD Bali	Rp	174.476.000.000,00	Rp 174.476.000.000,00
b) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma	Rp	237.184.700.502,84	Rp 228.866.604.706,84
c) Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma	Rp	64.950.621.578,45	Rp 66.883.229.206,45
d) Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma	Rp	2.181.514.444,76	Rp 2.975.981.706,76
e) PT. Jamkrida Bali	Rp	500.000.000,00	Rp 500.000.000,00

Nilai investasi pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan PT Jamkrida Bali per 31 Desember 2020 dihitung dengan menggunakan metode biaya sehingga dicatat sebesar nilai penyertaannya. Sedangkan untuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma, Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma dan Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma dihitung menggunakan metode ekuitas karena hak kepemilikannya diatas 20%. Pemerintah Kota Denpasar memiliki hak kepemilikan pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma, Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma sebesar 100% sehingga nilai investasi disajikan berdasarkan perubahan ekuitas pada masing-masing perusahaan umum daerah. Komposisi kepemilikan saham pada *investee* dapat dilihat pada ***lampiran 13*** dan ***lampiran 13a*** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020.

Uraian		31 Desember 2020	31 Desember 2019
C. ASET TETAP	Rp	5.154.840.516.342,83	Rp 5.198.519.405.381,36
Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Pemerintah Kota Denpasar per 31 Desember 2020 dan 2019. Aset Tetap yang dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi tidak disajikan dalam rincian Aset Tetap tetapi masih tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (<i>Extracomptable</i>). Pemerintah Kota Denpasar menentukan nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap Peralatan mesin sebesar sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 dan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar sama dengan atau lebih dari Rp20.000.000,00 yang diatur dalam kebijakan akuntansi tentang kapitalisasi asset Pemerintah Kota Denpasar. Rincian aset tetap sebagai berikut:			
Tanah	Rp	3.415.823.621.669,40	Rp 3.422.551.298.899,40
Peralatan dan Mesin	Rp	711.310.033.567,62	Rp 658.041.584.419,75
Gedung dan Bangunan	Rp	1.089.321.627.556,07	Rp 946.232.397.689,86
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	1.347.058.339.850,93	Rp 1.334.192.693.806,92





Aset Tetap Lainnya	Rp	62.418.055.645,91	Rp	65.594.080.572,91
Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	73.222.188.252,78	Rp	170.746.361.624,78
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp	(1.544.313.350.199,88)	Rp	(1.398.839.011.632,26)

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada *lampiran 14* Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020.

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1) Tanah	Rp 3.415.823.621.669,40	Rp 3.422.551.298.899,40
Merupakan tanah milik Pemerintah Kota Denpasar yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik per 31 Desember 2020 dan 2019. Rincian perhitungan sebagai berikut:		
Saldo Awal per 1 Januari	Rp 3.422.551.298.899,40	Rp 3.395.209.094.459,40
Penambahan:		
(a) Belanja Modal Biaya Sertifikat	Rp 317.580.840,00	Rp 70.204.840,00
(b) Reklas Masuk dari KIB Lain	Rp 0,00	Rp 27.130.475.120,00
1) Reklas Tanah Taman Rekreasi Oongan dari Kemitraan Pihak Ketiga (Aset Lainnya)	Rp 0,00	Rp 12.795.675.120,00
2) Reklas Tanah yang tercatat pada Aset Lainnya karena belum terdapat dokumen kepemilikan sah dari pihak lainnya, dan masih digunakan oleh entitas Pemkot	Rp 0,00	Rp 14.334.800.000,00
(c) Mutasi Masuk Antar OPD	Rp 6.505.320.350,00	Rp 0,00
(d) Mutasi Tambah Non Belanja Modal Lainnya	Rp 35.664.536.840,00	Rp 1.986.720.000,00
1) Biaya Pensertifikatan Tanah	Rp 320.060.840,00	Rp 0,00
2) Tanah yang Belum Tercatat	Rp 28.929.576.000,00	Rp 1.986.720.000,00
3) Pencatatan Tukar Menukar dengan Pihak Ketiga	Rp 6.414.900.000,00	Rp 0,00
Jumlah Penambahan	Rp 42.487.438.030,00	Rp 29.187.399.960,00
Pengurangan:		
(a) Reklas ke Aset Lainnya (Aset yang Dimanfaatkan Pihak Lain)	Rp 8.445.965.720,00	Rp 0,00
(b) Penghapusan tanah yang dihibahkan	Rp 33.943.768.350,00	Rp 1.824.650.000,00
(c) Koreksi reklasifikasi ke Aset Lainnya nilai pecahan sertifikasi tanah yang merupakan tanah Provinsi	Rp 0,00	Rp 19.595.520,00





(d) Reklas biaya sertifikat yang tertinggal di aset tetap Tanah sedangkan tanahnya tercatat pada aset lain-lain (Tanah lain-lain)	Rp	0,00	Rp	950.000,00
(e) Mutasi Keluar Antar OPD	Rp	6.505.320.350,00	Rp	0,00
(f) Mutasi Kurang Lainnya	Rp	320.060.840,00	Rp	0,00
1) Biaya Sertifikat	Rp	320.060.840,00	Rp	0,00
Jumlah Pengurangan	Rp	49.215.115.260,00	Rp	1.845.195.520,00
Saldo Akhir per 31 Desember	Rp	3.415.823.621.669,40	Rp	3.422.551.298.899,40

Catatan:

- Belanja Modal Biaya Sertifikat sebesar Rp317.580.840,00 pada BPKAD merupakan biaya pensertifikatan untuk 502 bidang tanah yang kemudian asetnya dicatat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Terdapat tukar menukar aset tanah SD Negeri 3 Sanur pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp163.320.350,00 dengan tanah Desa Pekraman Intaran Br. Dangin Peken sebesar Rp6.342.000.000,00. Nilai aset tanah SD 3 Sanur sebesar Rp163.320.350,00 sudah dihapus dari aset Pemerintah Kota Denpasar dan aset tanah senilai Rp6.342.000.000,00 dicatat pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- Terdapat kapitalisasi aset tetap dari biaya pensertifikatan tanah untuk Dermaga Matahari Terbit sebesar Rp2.480.000,00 sehingga menjadi Rp21.822.980.000,00 yang kemudian dihibahkan ke Kementerian Perhubungan.
- Terdapat Hibah Tanah Bangunan Kantor sebesar Rp908.000.000,00 ke Desa Sanur Kaja, Hibah Tanah Lapangan Ida Bagus Japa ke Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp9.944.140.000,00, Hibah Tanah Bangunan Kantor sebesar Rp299.825.000,00 ke Desa Ubung Kaja, Hibah Tanah Bangunan Kantor sebesar Rp805.503.000 ke Desa Padang Sambian Kaja.
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya merupakan aset yang dimanfaatkan pihak lain sebesar Rp8.445.965.720,00
- Koreksi nilai pencatatan tanah sebesar Rp28.929.576.000,00 merupakan pencatatan tanah yang belum tercatat dalam KIB Intra yang terdiri dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp3.624.310.000,00, Dinas Kesehatan Rp188.726.000,00, Dinas Pertanian Rp233.600.000,00, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.927.400.000,00, Pengelola Barang Milik Daerah sebesar Rp21.955.540.000,00. Adapun Daftar Aset Tetap Tanah dapat dilihat pada **Lampiran 15** Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2020.

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
3) Peralatan dan Mesin	Rp 711.310.033.567,62	Rp 658.041.584.419,75
Merupakan Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Kota Denpasar per 31 Desember 2020 yang terdiri dari Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio dan Komunikasi, Alat Kedokteran, Alat Laboratorium, dan Peralatan kantor lainnya. Rincian perhitungan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebagai berikut:		
Saldo Awal per 1 Januari	Rp 658.041.584.419,75	Rp 564.733.925.288,17
Penambahan:		
(a) Belanja Modal	Rp 39.301.750.223,61	Rp 80.377.733.062,91
(b) Pencatatan Peralatan Mesin	Rp 0,00	Rp 89.650.000,00
(c) Hibah Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2020	Rp 2.156.800.689,12	Rp 6.649.096.100,00





(d) Reklas dari KIB lainnya ke aset tetap Peralatan Mesin	Rp	13.680.778.468,14	Rp	8,531,106,918.00
(e) Reklas dari aset lain-lain ke aset tetap Peralatan Mesin	Rp	6.690.000,00	Rp	115.000.000,00
(f) Mutasi Antar OPD	Rp	23.126.913.392,00	Rp	0,00
(g) Koreksi Saldo Awal	Rp	222.943.562,00	Rp	8.908.376.418,00
1) Hibah Peralatan dan Mesin dibawah Tahun Anggaran 2020 yang baru dicatat	Rp	45.000.000,00	Rp	8.907.876.418,00
2) Koreksi Pencatatan Peralatan dan Mesin yang belum tercatat Tahun Anggaran 2020	Rp	174.693.562,00	Rp	0,00
3) Koreksi reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan perolehan sebelum Tahun Anggaran 2020	Rp	3.250.000,00	Rp	500.000,00
h) Mutasi Tambah Non Belanja Modal Lainnya	Rp	19.420.875.172,00	Rp	33.900.000,00
1) Pencatatan Tindak Lanjut Temuan BPK RI Tahun Anggaran 2019	Rp	210.802.625,00	Rp	0,00
2) Reklas Dari Belanja Barang Jasa ke Aset Tetap Peralatan Mesin	Rp	16.950.000,00	Rp	33.900.000,00
3) Belanja dengan Biaya Tak Terduga pada Dinas Kesehatan	Rp	19.193.122.547,00	Rp	0,00
Jumlah Penambahan	Rp	97.916.751.506,87	Rp	104.704.862.498,91
Pengurangan:				
(a) Penghapusan	Rp	0,00	Rp	1.544.396.942,78
(b) Reklas ke KIB Lain	Rp	1.286.482.300,61	Rp	1.977.285.211,91
1) Reklas ke Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	855.155.800,61	Rp	810.585.721,91
2) Reklas ke Kontruksi Dalam Pengerjaan dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	235.592.500,00	Rp	337.535.000,00
3) Reklas ke Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	0,00	Rp	148.544.000,00
4) Reklas ke Jalan Irigasi dan Jaringan dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	195.734.000,00	Rp	680.620.490,00





(c) Reklas ke Aset Lain-lain (RB)	Rp	6.523.439.886,00	Rp	5.174.157.038,64
(d) Reklas ke <i>Extrakomptable</i>	Rp	1.176.711.496,39	Rp	488.297.705,00
(e) Reklas ke Aset Tidak Berwujud dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	932.984.302,00	Rp	777.533.750,00
(f) Koreksi Reklasifikasi ke Aset Lainnya atas aset-aset perolehan sebelum TA 2019 yang sudah menjadi kewenangan Provinsi pada Disdikpora	Rp	0,00	Rp	804.731.500,00
(g) Koreksi ke extrakomptabel aset-aset perolehan sebelum TA 2019 yang sebelumnya tercatat gabungan sebagai aset Intra	Rp	0,00	Rp	450.892.219,00
(h) Koreksi keluar biaya (penggantian lampu APILL) yang sebelumnya tercatat sebagai Peralatan dan Mesin perolehan sebelum TA 2019	Rp	0,00	Rp	98.709.000,00
(i) Koreksi reklasifikasi peralatan dan mesin perolehan sebelum TA 2019 yang sebelumnya tercatat sebagai aset intra ke Aset Lain2	Rp	0,00	Rp	74.000.000,00
(j) Koreksi reklasifikasi peralatan dan mesin perolehan sebelum TA 2019 yang sudah diserahkan ke pihak ketiga namun masih tercatat	Rp	0,00	Rp	7.200.000,00
(k) Reklas ke Aset Lainnya (Aset yang Dimanfaatkan Pihak Lain)	Rp	11.367.907.420,00	Rp	0,00
(l) Mutasi Barang antar OPD dari BAPPEDA ke DPUPR	Rp	159.193.562,00	Rp	0,00
(m) Hibah	Rp	74.670.000,00	Rp	0,00
(n) Mutasi antar OP	Rp	23.126.913.392,00	Rp	0,00
Jumlah Pengurangan	Rp	44.648.302.359,00	Rp	11.397.203.367,33
Saldo Akhir per 31 Desember	Rp	711.310.033.567,62	Rp	658.041.584.419,75

Catatan:

- Belanja modal sebesar Rp39.311.650.223,61 merupakan pengadaan tahun 2020
- Hibah peralatan dan mesin tahun 2020 sebesar Rp2.156.800.689.12,00 terdiri dari :
 - CSR Pertamina ke SDN 5 Pedungan berupa *LCD* dan *Attacment* senilai Rp60.000.000,00 dan Panel Surya sebesar Rp50.000.000,00
 - Hibah Komite ke SDN 5 Panjer berupa *SoundSystem* sebesar Rp7.500.000,00





- (3) Hibah Yayasan Cinta Kasih ke SDN 12 Padang Sambian berupa wastafel *portable* sebesar Rp3.070.000,00
- (4) Hibah mobil Ambulance dan Karoseri sebesar Rp263.700.000,00 dan CSR Ventilator sebesar Rp348.000.000,00 ke RSUD Wangaya
- (5) Hibah CSR berupa Portabel Wastafel ke Dinas Sosial total sebesar Rp9.871.689,12
- (6) Hibah CSR berupa 4 *Micro* Bus ke Dinas Perhubungan sebesar Rp1.378.209.000,00
- (7) Hibah CSR Bilik *Syneteyzer* ke DPMPTSP sebesar Rp20.500.000,00
- (8) Hibah CSR tempat cuci tangan ke Kecamatan Denpasar Timur sebesar Rp6.000.000,00
- (9) Hibah LCD Proyektor ke Kelurahan Pedungan sebesar Rp9.950.000,00.
- c) Hibah peralatan mesin sebelum tahun 2020 yang baru dicatat terdiri dari hibah peralatan dan mesin pada Kelurahan Pedungan sebesar Rp45.000.000,00 berupa motor tangka air penyiraman
- d) Reklas dari KIB lainnya ke Aset Tetap Peralatan Mesin sebesar Rp13.670.878.468,14 terdiri dari:
 - (1) Reklas atas Belanja BOS dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp11.355.101.977,00, Reklas Pemecahan nilai kontrak Gedung dan Bangunan untuk pembelian Peralatan mesin SMPN 10 Denpasar sebesar Rp37.158.500,00, Reklas Pemecahan nilai kontrak Gedung dan Bangunan untuk pembelian peralatan mesin SDN 22 Dauh Puri sebesar Rp519.147.328,93 dan Reklas Pemecahan nilai kontrak Gedung dan Bangunan untuk Peralatan mesin SDN 1 Peguyangan sebesar Rp20.115.000,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 - (2) Reklas Belanja Modal Dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp8.272.000,00 pada Dinas Kesehatan
 - (3) Reklas Belanja Modal Peralatan Mesin dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.026.317.380,00 pada RSUD Wangaya
 - (4) Reklas Belanja Peralatan Mesin dari Gedung dan Bangunan SMPN 14 Denpasar sebesar Rp554.758.093,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - (5) Reklas dari Jalan, Jaringan dan Irigasi Pemecahan Papan Nama Jalan sebesar Rp89.798.000,00 Dinas Perumahan dan Permukiman
 - (6) Reklas Belanja Modal sebesar Rp3.300.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika
 - (7) Reklas Pemecahan nilai kontrak Gedung dan Bangunan untuk pembelian Peralatan Mesin sebesar Rp34.543.469,21 Sekertarian DPRD
 - (8) Reklas Belanja Modal Dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp17.500.000,00 pada Kecamatan Denpasar Timur
 - (9) reklas Belanja Modal dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.886.700,00 pada Kecamatan Denpasar Selatan
 - (10) Tindak Lanjut Temuan BPK RI 2019 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp210.802.625,00 SDN 4 Ubung dan SDN 5 Sanur untuk Peralatan Mesin yang Belum Tercatat,
- e) Belanja Tak Terduga (BTT) Dinas Kesehatan sebesar Rp19.193.122.547,00
- f) Reklas dari Barang Jasa Pemasangan *Exhaust Fan* sebesar Rp16.950.000,00
- g) Reklas ke KIB lainnya sebesar sebesar Rp1.286.482.300,61 terdiri dari :
 - (1) Reklas ke Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 sebesar Rp855.155.800,61
 - (2) Reklas ke KDP dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 sebesar Rp235.592.500,00
 - (3) Reklas ke Jalan Irigasi dan Jaringan dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 sebesar Rp195.734.000,00
- h) Koreksi kurang catat peralatan dan mesin perolehan sebelum TA 2020 yang pada Kelurahan Pedungan berupa komputer dan printer sebesar Rp15.500.000,00
- i) Pengeluaran Hibah pada Pengelola Barang Milik Daerah sebesar Rp74.670.000,00
- j) Reklas Ke Aset Lainnya Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain sebesar Rp11.367.907.420,00.





k) Reklas Masuk dari Gedung dan Bangunan akibat pemecahan SPK karena ada pembelian Peralatan Mesin pada gedung DPRD sebelum T.A 2020 sebesar Rp3.250.000,00
Adapun Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada **Lampiran 16** Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2020.

Uraian		31 Desember 2020	31 Desember 2019
4) Gedung dan Bangunan	Rp	1.089.321.627.556,07	Rp 946.232.397.689,86
Gedung dan bangunan milik Pemerintah Kota Denpasar per 31 Desember 2020 antara lain, terdiri dari gedung, monumen dan tugu. Rincian perhitungan sebagai berikut:			
Saldo Awal per 1 Januari	Rp	946.232.397.689,86	Rp 771.765.921.503,74
Penambahan:			
(a) Belanja Modal	Rp	29.449.362.418,00	Rp 118.026.241.990,26
(b) Reklas Masuk dari belanja BOS	Rp	46.508.533,00	Rp 0,00
(c) Pencatatan Gedung dan Bangunan	Rp	0,00	Rp 4.356.000.000,00
(d) Reklas Masuk dari belanja modal Aset Tetap Lainnya	Rp	142.214.000,00	Rp 0.00
(e) Reklas Masuk dari belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	77.503.500,00	Rp 0.00
(f) Hibah	Rp	1.459.356.500,00	Rp 10.275.573.000,00
(g) Reklas dari KDP	Rp	105.748.792.248,00	Rp 139.219.768.364,00
(h) Reklasi dari belanja modal Aset Tetap Lainnya (BLUD) pada RSUD Wangaya	Rp	0,00	Rp 790.592.953,00
(i) Reklas dari belanja modal Peralatan dan Mesin	Rp	855.155.800,61	Rp 810.585.721,91
(j) Reklas dari Aset Tetap Lain – Aset Renovasi	Rp	177.896.000,00	Rp 0,00
(k) Koreksi kapitalisasi Gedung dan Bangunan yang sebelumnya tercatat sebagai Gedung dan Bangunan extra perolehan TA 2019	Rp	0,00	Rp 448.090.500,00
(l) Koreksi kapitalisasi KDP ke Gedung dan Bangunan yang telah terbangun	Rp	725.149.000,00	Rp 3.331.290.000,00
(m) Reklas Kapitalisasi ke Gedung induk	Rp	5.062.445.388,00	Rp 0,00
(n) Pencatatan Gedung Ruang Pertemuan Kelurahan Pedungan	Rp	400.000.000,00	Rp 0,00
(o) Koreksi Pencatatan Mutasi antar OPD sebelum Tahun Anggaran 2020	Rp	13.966.015.000,00	Rp 0.00
(p) Mutasi Antar OPD	Rp	123.497.660.905,51	Rp 0,00
(q) Penilaian Gedung SMPN 10 Denpasar	Rp	22.236.000.000,00	Rp 0,00





(r)	Pencatatan Penilaian Gedung Taman Rekreasi Oongan	Rp	3.272.624.000,00	Rp	0,00
(s)	Tukar menukar SDN 3 Sanur	Rp	3.620.429.000,00	Rp	0,00
Jumlah Penambahan		Rp	310.737.112.293,12	Rp	277.258.142.529,17
Pengurangan:					
(a)	Penghapusan	Rp	0,00	Rp	6.150.356.200,00
(b)	Reklas kondisi Ke Aset Lain-lain	Rp	0,00	Rp	138.494.000,00
(c)	Reklas keluar ke Persediaan	Rp	0,00	Rp	3.381.533.086,00
(d)	Reklas Keluar ke KIB F (Kontruksi Dalam Pengerjaan)	Rp	9.364.339.890,00	Rp	88.831.776.084,00
(e)	Reklas Keluar ke KIB Lainnya	Rp	7.728.818.076,65	Rp	877.543.000,00
(f)	Reklas ke <i>Extrakomptabel</i> dan Aset Tak Berwujud	Rp	0,00	Rp	60.450.000,00
(g)	Koreksi kurang nilai Gedung dan Bangunan yang sebelumnya sudah dibongkar dan dibangun kembali	Rp	0,00	Rp	26.009.200,00
(h)	Koreksi ke <i>Extrakomptabel</i> atas Gedung dan Bangunan yang sebelumnya tercatat gabungan sebagai aset intra perolehan TA 2019	Rp	0,00	Rp	276.514.073,05
(i)	Koreksi Reklasifikasi ke Jalan Irigasi dan Jaringan dari Gedung dan Bangunan perolehan sebelum TA 2019	Rp	0,00	Rp	308.576.000,00
(j)	Koreksi Reklasifikasi DED atas gedung dan bangunan yang telah menjadi kewenangan provinsi perolehan sebelum TA 2019 ke Aset Lainnya	Rp	0,00	Rp	796.201.000,00
(k)	Koreksi Reklasifikasi Gedung dan Bangunan perolehan sebelum TA 2019 ke Aset Tetap Lainnya (Aset Renovasi)	Rp	0,00	Rp	142.807.100,00
(l)	Koreksi Reklasifikasi ke Aset Lainnya atas Gedung dan Bangunan perolehan sebelum TA 2019 yang sudah diserahkan ke pihak ketiga namun masih tercatat	Rp	0,00	Rp	1.791.406.600,00





(m) Reklas ke <i>Extrakomptabel</i>	Rp	695.760.500,61	Rp	0,00
(n) Reklas keluar ke KIB lain selain KDP	Rp	1.601.999.391,14	Rp	0,00
(o) Koreksi Pencatatan Saldo Awal atas reklas keluar ke KIB Lain perolehan sebelum TA 2020	Rp	3.250.000,00	Rp	0,00
(p) Koreksi Pencatatan Saldo Awal atas mutasi kurang lainnya	Rp	13.966.015.000,00	Rp	0,00
(q) Mutasi antar OPD	Rp	123.497.660.905,51	Rp	0,00
(r) Reklas ke Aset Lainnya (Aset yang dimanfaatkan pihak lain)	Rp	5.159.169.275,00	Rp	0,00
(s) Reklas Kapitalisasi	Rp	5.062.445.388,00	Rp	0,00
(t) Hibah	Rp	568.424.000,00	Rp	0,00
Jumlah Pengurangan	Rp	167.637.982.426,91	Rp	102.791.666.343,05
Saldo Akhir per 31 Desember	Rp	1.089.321.627.556,07	Rp	946.232.397.689,86

Catatan :

- a) Reklas Masuk dari KIB Lain sebesar Rp1.121.381.833.61 terdiri dari:
- Reklas Belanja BOS Gedung bangunan yang dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp46.508.533,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 - Reklas Belanja Modal Gedung Bangunan dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp142.214.000,00 pada RSUD Wangaya
 - Reklas Belanja Modal Gedung dan Bangunan dari Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp77.503.500,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Reklas Belanja Modal Gedung dan Bangunan dari Peralatan Mesin sebesar Rp686.009.800.61 pada Dinas Perhubungan
 - Reklas Belanja Modal dari Peralatan Mesin Rp169.146.000 pada Kecamatan Denpasar Utara
 - Reklas dari Aset Tetap Lain – Aset Renovasi pada DLHK karena merupakan aset renovasi TPS pada lahan milik Pemkot sendiri yang masih proses pembuatan sertifikat tanah (TPS Munang Maning Jl Merpati Banjar Tegal) sebesar Rp177.896.000,00.
- b) Reklas Kapitalisasi Sebesar Rp5.062.445.388,00 Terdiri dari:
- Kapitalisasi ke gedung induk dari dinas PUPR sebesar Rp2.844.390.628,00 pada Dinas Kesehatan
 - Kapitalisasi ke gedung induk dari dinas PUPR sebesar Rp228.393.000.00 pada DPMPTSP
 - Kapitalisasi ke Gedung Induk dari Dinas PUPR sebesar Rp77.121.000,00 pada Dinas Pertanian
 - Kapitalisasi ke Gedung Induk dari Dinas PUPR sebesar Rp1.912.540.760,00 pada Sekretariat DPRD
- c) Penilaian Gedung SMPN 10 Denpasar sebesar Rp22.236.000.000,00
- d) Penilaian Gedung Taman Rekreasi Oongan sebesar Rp3.272.624.000,00
- e) Pencatatan Gedung Tukar Menukar SDN 3 Sanur sebesar Rp3.620.429.000,00
- f) Hibah Gedung Aula dari Komite SMPN 8 Denpasar sebesar Rp850.000.000,00
- g) Hibah Gedung dari Komite SMPN 6 Denpasar sebesar Rp609.356.500,00
- h) Reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp105.748.792.248,00 terdiri dari:
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahragara sebesar Rp7.095.678.400,00
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp98.653.113.848,00
- i) Koreksi kapitalisasi KDP ke Gedung dan Bangunan yang telah terbangun sebesar Rp725.149.000,00 terdiri dari :
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp98.974.000,00





- Dinas Perumahan ,Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sebesar Rp626.175.000,00
- j) Koreksi Pencatatan Mutasi antar OPD sebelum Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp13.966.015.000,00 terdiri dari :
 - Sekretariat DPRD Mutasi DED Gedung dari Dinas PUPR sebesar Rp4.999.721.000,00
 - Pengelola Barang Milik Daerah Mutasi Pembangunan Central parker Lumintang + DED sebesar Rp8.966.294.000,00
- k) Reklas Keluar ke KIB Lain Selain KDP sebesar Rp7.728.818.076,65 terdiri dari :
 - Reklas Pemecahan Belanja Peralatan Mesin ke KIB B sebesar Rp576,420,828.93 pada Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga
 - Reklas Belanja Modal ke Peralatan Mesin sebesar Rp8,272,000.00 pada Dinas Kesehatan
 - Reklas ke Aset Tetap Renovasi Rehab Stadion Kompiang Sujana sebesar Rp198.889.000,00 dan Reklas Pemecahaan Belanja Peralatan Mesin SMPN 14 Denpasar sebesar Rp554.758.093,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Reklas Belanja Modal Ke Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp20.650.000,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan
 - Reklas Pemecahan Belanja Peralatan Mesin sebesar Rp34.543.469,21 pada Sekretariat DPRD
 - Reklas Pemavingan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp198.566.000,00 pada Kecamatan Denpasar Selatan
- l) Koreksi Pencatatan Saldo Awal atas mutasi kurang lainnya sebesar Rp13.966.015.000,00 terdiri dari:
 - Mutasi Ke DPRD terjadi sebelum T.A 2020 namun belum di proses di SIMDA BMD sebesar Rp4.999.721.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - Mutasi Ke Pengelola Barang Milik Daerah Pembuatan Parkir dan DED Gedung Alaya sebesar Rp8.966.294.000,00 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- m)Pengeluaran Hibah sebesar Rp5.062.445.388,00 Terdiri dari:
 - Hibah Kantor Desa Sanur Kaja sebesar Rp193.424.000,00.
 - Hibah Kantor Desa Padang Sambian Kaja sebesar Rp375.000.000,00.

Adapun Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada **Lampiran 17** Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2020.

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
5) Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp 1.347.058.339.850,93	Rp 1.334.192.693.806,92
Merupakan Jalan Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kota Denpasar per 31 Desember 2020 yang terdiri dari jalan, jembatan, bangunan air (irigasi), instalasi dan jaringan, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:		
Saldo Awal per 1 Januari	Rp 1.334.192.693.806,92	Rp 1.134.333.280.409,25
Penambahan:		
(a) Belanja Modal	Rp 12.677.346.957,01	Rp 85.526.273.950,45
(b) Hibah	Rp 0,00	Rp 120.141.005.980,00
(c) Reklas masuk dari KIB Lainnya	Rp 527.827.590,00	Rp 880.451.990,00
(d) Koreksi Reklasifikasi ke Jalan Irigasi dan Jaringan dari Gedung dan Bangunan perolehan sebelum TA 2019	Rp 0,00	Rp 308.576.000,00





(e) Koreksi Kapitalisasi KDP extra (bagian dari DED yang sudah dilaksanakan) TA 2019	Rp	0,00	Rp	7.898.855,00
(f) Koreksi pencatatan Saldo Awal atas reklas masuk dari Kontruksi Dalam Pengerjaan sebelum TA 2020	Rp	1.089.794.225,00	Rp	0,00
(g) Reklas kapitalisasi dari ektrakompatable	Rp	101.846.101,00	Rp	0,00
(h) Mutasi Antar OPD	Rp	242.857.499,00	Rp	0,00
Jumlah Penambahan	Rp	14.639.672.372,01	Rp	206.864.206.775,45
Pengurangan:				
(a) Penghapusan	Rp	0,00	Rp	734.600.000,00
(b) Reklas ke KIB F (Kontruksi Dalam Pengerjaan)	Rp	784.181.941,00	Rp	0,00
(c) Reklas Keluar ke KIB Lainnya	Rp	170.601.500,00	Rp	2.528.973.648,78
(d) Reklas ke Aset Lain-lain berupa Jalan Kabupaten Kota tercatat ganda	Rp	0,00	Rp	318.835.000,00
(e) Reklas ke <i>Extrakompatabel</i>	Rp	335.201.706,00	Rp	238.894.279,00
(f) Reklas ke Aset Tidak Berwujud	Rp	0,00	Rp	98.230.000,00
(g) Koreksi keluar biaya-biaya yang tidak memenuhi kriteria aset tetap yang sebelumnya tercatat sebagai Jalan Irigasi dan Jaringan perolehan sebelum TA 2019	Rp	0,00	Rp	2.925.767.000,00
(h) Koreksi reklasifikasi ke Aset Lainnya atas Jalan Irigasi dan Jaringan perolehan sebelum TA 2019	Rp	0,00	Rp	84.780.000,00
(i) Koreksi reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya (Aset Tetap Renovasi) atas penambahan daya listrik sebelum TA 2019 pada gedung pinjam pakai yang digunakan Pemkot	Rp	0,00	Rp	74.713.450,00
(j) Reklas ke Aset Lain-Lain Rusak Berat	Rp	51.007.000,00	Rp	0,00
(k) Kapitalisasi ke <i>Extracomptable</i>	Rp	190.176.682,00	Rp	0,00
(l) Mutasi keluar Antar OPD	Rp	242.857.499,00	Rp	
Jumlah Pengurangan	Rp	1.774.026.328,00	Rp	7.004.793.377,78
Saldo Akhir per 31 Desember	Rp	1.347.058.339.850,93	Rp	1.334.192.693.806,92





Catatan :

- Koreksi pencatatan Saldo Awal atas reklas masuk dari Kontruksi Dalam Pengerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang T.A 2019 sebesar Rp1.089.794.225,00
- Reklas Kapitalisasi Jalan Desa Dinas PUPR dari *Extrakomptabel* ke induknya Intrakomptabel sebesar Rp101.846.101,00
- Reklas Kapitalisasi Jalan Desa Dinas PUPR ke *Extrakomptabel* dari Intra sebesar Rp190.176.682,00
- Reklas Keluar Ke KIB Lain Selain KDP sebesar Rp170.601.500,00 terdiri dari :
 - Reklas Belanja Modal Ke Gedung Bangunan sebesar Rp77.503.500,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Reklas pemecahan Papan Nama Jalan ke Peralatan Mesin sebesar Rp89.708.000,00 pada Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan
 - Reklas Belanja Modal ke Peralatan Mesin sebesar Rp3.300.000,00 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
- Nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.347.058.339.850,93 belum termasuk aset tetap LPJU pada Dinas Perhubungan yang saat ini dicatat dalam KIB Gedung dan Bangunan *Extracomptable* namun belum disajikan dalam KIB *Intracomptable*. Sesuai dengan temuan pemeriksaan atas LKPD TA 2017, aset tetap berupa PJU tersebut belum diinventarisasi dan dinilai titik-titik PJU untuk dicatat sebagai Barang Milik Daerah pada aset tetap *intrakomptabel*.

Adapun Daftar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada **Lampiran 18** Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2020.

Uraian		31 Desember 2020		31 Desember 2019	
6) Aset Tetap Lainnya	Rp	62.418.055.645,91	Rp	65.594.080.572,91	
Merupakan Aset Tetap lain yang dimiliki Pemerintah Kota Denpasar per 31 Desember 2019 yang terdiri dari buku/barang perpustakaan, barang bercorak seni budaya dan olah raga, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:					
Saldo Awal per 1 Januari	Rp	65.594.080.572,91	Rp	64.128.658.446,11	
Penambahan:					
(a) Belanja Modal	Rp	1.399.017.340,00	Rp	9.699.628.371,00	
(b) Aset Tetap Lainnya belanja BOS	Rp	11.981.094.730,00	Rp	0,00	
(c) Reklas masuk dari KIB Lainnya	Rp	198.889.000,00	Rp	496.347.000,00	
(d) Reklas masuk dari Barang dan Jasa	Rp	0,00	Rp	103.813.000,00	
(e) Koreksi Reklasifikasi Gedung dan Bangunan perolehan sebelum TA 2019 ke Aset Tetap Lainnya (Aset Renovasi)	Rp	0,00	Rp	142.807.100,00	
(f) Koreksi reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya (Aset Tetap Renovasi) atas penambahan daya listrik sebelum TA 2019 pada gedung pinjam pakai yang digunakan Pemkot	Rp	0,00	Rp	66.713.450,00	
(g) Mutasi Tambah Non Belanja Modal Lainnya	Rp	430.800,00	Rp	0,00	
(h) Mutasi Antar OPD	Rp	57.200.000,00	Rp	0,00	
Jumlah Penambahan	Rp	13.636.631.870,00	Rp	10.509.308.921,00	



**Pengurangan:**

(a) Penghapusan	0,00	210.564.700,00
(b) Reklas ke Aset Lain-lain	2.999.666.465,00	7.184.375,00
(c) Reklas keluar ke KIB Lainnya	12.882.329.610,00	8.570.006.371,00
(d) Reklas ke <i>Extrakomptabel</i>	212.060.352,00	116.041.500,00
(e) Mutasi Antar OPD	57.200.000,00	0,00
(f) Koreksi Reklasifikasi ke Aset Lainnya atas Aset Tetap Lainnya yang akan diajukan penghapusan	0,00	71.938.600,00
(g) Koreksi ke Aset Tetap Lainnya <i>Extrakomptabel</i> atas Aset Tetap Lainnya perolehan tahun sebelum 2019	661.400.370,00	22.732.360,00
(h) Koreksi Reklasifikasi ke <i>Extrakomptabel</i> atas Aset Tetap Lainnya yang tadinya tercatat gabungan sebagai Aset <i>Intrakomptabel</i> , perolehan TA 2019	0,00	6.173.000,00
(i) Koreksi keluar biaya yang tercatat sebagai Aset Tetap Lainnya perolehan sebelum TA 2019	0,00	26.701.675,00
(j) Koreksi Reklasifikasi ke Aset Lainnya atas Aset Tetap Lainnya yang sudah diserahkan ke pihak ketiga, perolehan sebelum TA 2019	0,00	12.544.213,20
Jumlah Pengurangan	16.812.656.797,00	9.043.886.794,20
Saldo Akhir per 31 Desember	Rp 62.418.055.645,91	Rp 65.594.080.572,91

Catatan:

- Reklas dari Gedung dan Bangunan berupa Rehab Stadion Kompiang Sujana sebesar Rp198.889.000,00 ke Aset Tetap renovasi .
- Pencatatan Barang yang belum Tercatat Sebelum TA 2020 di SDN 5 Sanur berupa CD Pembelajaran sebesar Rp430.800,00.
- Reklas Ke *Extrakomptabel* sebesar Rp212.060.352,00 terdiri dari :
 - Reklas Belanja Modal Rp189.081.422 dan Reklas CD Pembelajaran SDN 5 Sanur sebesar Rp302.800,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 - Pemecahan Buku yang tercatat gabungan pada Dinas Sosial sebesar Rp1.614.000,00
 - Reklas Belanja Modal pada Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp8.614.430,00 dan Pemecahan buku yang tercatat gabungan sebesar Rp8.147.700,00
 - Reklas Belanja Modal pada Kecamatan Denpasar Selatan sebesar Rp4.300.000,00
- Koreksi ke Aset Tetap Lainnya *Extrakomptabel* atas Aset Tetap Lainnya perolehan tahun sebelum 2019 karena nilainya di bawah kapitalisasi sebesar Rp661.400.370,00.
- Jumlah Aset Tetap Lainnya diatas termasuk seperangkat alat musik (Gamelan Gong Kebyar) pada Dinas Pariwisata dengan nilai perolehan Rp176.735.000,00 dipinjamkaikan kepada Komandan Lanal Denpasar namun tidak bisa direklas ke Aset Lainnya karena keterbatasan aplikasi SIMDA BMD.





Adapun Daftar Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 19** Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2020.

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
7) Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp 73.222.188.252,78	Rp 170.746.361.624,78
Merupakan Aset Tetap yang sedang dalam proses penyelesaian atau Aset Tetap yang akan dilaksanakan proses pengerjaannya namun telah ada dokumen perencanaannya dengan rincian perhitungan sebagai berikut:		
Saldo Awal per 1 Januari	Rp 170.746.361.624,78	Rp 159.318.608.747,00
Penambahan:		
(a) Pencatatan KDP	Rp 0,00	Rp 391.350.000,00
(b) Hibah	Rp 0,00	Rp 62.278.459.364,00
(c) Reklas masuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan Masuk KDP	Rp 9.599.932.390,00	Rp 88.831.776.084,00
(d) Reklas masuk Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Masuk KDP	Rp 784.181.941,00	Rp 2.528.973.648,78
(e) Reklas Masuk dari KIB Lainnya	Rp 0,00	Rp 337.535.000,00
(f) Reklas dari <i>Extrakomptabel</i>	Rp 351.677.360,00	Rp 0,00
Jumlah Penambahan	Rp 10.735.791.691,00	Rp 154.368.094.096,78
Pengurangan:		
(a) Reklas keluar Ke KIB Lainnya	Rp 105.749.744.838,00	Rp 139.219.768.364,00
(b) Reklas Ke Aset Lain-lain	Rp 0,00	Rp 47.365.000,00
(c) Penghapusan	Rp 660.262.000,00	Rp 0,00
(d) Reklas ke <i>Extrakomptabel</i>	Rp 0,00	Rp 19.702.000,00
(e) Koreksi Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Lain-lain) atas DED yang tidak dibangun pada Dinas Kesehatan	Rp 0,00	Rp 43.100.000,00
(f) Koreksi Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Lain-lain) atas Pengawasan dan Perencanaan perolehan sebelum TA 2019 pada Disperindag	Rp 0,00	Rp 271.217.000,00
(g) Koreksi Reklasifikasi (pecah register) ke KDP <i>Extrakomptabel</i> , karena sebagian akan dikapitalisasi ke Jalan Irigasi dan Jaringan perolehan TA 2019 pada Dinas PUPR	Rp 0,00	Rp 7.898.855,00
(h) Koreksi Reklasifikasi (kapitalisasi DED) KDP ke Gedung dan Bangunan yang telah dibangun pada TA 2019	Rp 0,00	Rp 3.331.290.000,00





(i) Koreksi atas Rp	35.015.000,00	Rp	0,00
<i>Extrakomptable</i> KDP tahun perolehan sebelum tahun 2020 berupa kegiatan rehabilitasi gedung dan bangunan yang induknya telah diserahkan ke pihak lain (reklas ke aset lain-lain)			
(j) Koreksi Saldo Awal Reklas Keluar KIB Lain Rp	1.814.943.225,00	Rp	0,00
Jumlah Pengurangan	Rp 108.259.965.063,00	Rp	142.940.341.219,00
Saldo Akhir per 31 Desember	Rp 73.222.188.252,78	Rp	170.746.361.624,78

Catatan:

- Reklas dari *Extrakomptabel* Pengawasan dan DED sebesar Rp315.709.770,00 antara lain pada Dinas PUPR sebesar Rp296.007.770,00 dan Dinas Perhubungan sebesar Rp19.702.000,00.
- Penghapusan KDP pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp660.262.000.
- Reklas Keluar ke KIB Lain sebesar Rp105.748.792.248,00 terdiri dari :
 - Reklas ke Gedung Bangunan sebesar Rp7.095.678.400,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 - Reklas Ke Gedung Bangunan Pembangunan Gedung Alaya sebesar Rp98.553.418.648,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Reklas Ke Gedung Bangunan pada SMPN 14 Denpasar sebesar Rp99.695.200,00.
- Koreksi Saldo Awal Reklas Ke KIB Lain Sebesar sebesar Rp1.814.943.225,00 terdiri dari :
 - Reklas Ke Gedung Bangunan DED Gedung Sekretariat DPRD sebesar Rp98.974.000,00 dan Reklas KDP Jalan Desa ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.089.794.225,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Reklas Ke Gedung Bangunan DED Pembuatan Gedung Balai budaya sebesar Rp626.175.000,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Adapun Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada **Lampiran 20** Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2020.

Uraian		31 Desember 2020	31 Desember 2019
8) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp	(1.544.313.350.199,88)	Rp (1.398.839.011.632,26)
Akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2020 dan 2019 terdiri dari:			
a) Tanah	Rp	0,00	Rp 0,00
b) Peralatan dan Mesin	Rp	(500.427.491.225,31)	Rp (435.611.773.627,02)
c) Gedung dan Bangunan	Rp	(174.450.919.838,67)	Rp (162.254.173.006,00)
d) Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	(856.383.841.089,28)	Rp (788.362.111.732,06)
e) Aset Tetap Lainnya	Rp	(13.051.098.046,62)	Rp (12.610.953.267,18)
f) Kontruksi Dalam Pengerjaan	Rp	0,00	Rp 0,00





Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
--------	------------------	------------------

D. ASET LAINNYA Rp **44.719.097.298,75** Rp **22.541.675.798,09**

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lainnya Pemerintah Kota Denpasar per 31 Desember 2020 dan 2019.

a) Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp	31.385.542.415,00	Rp	6.412.500.000,00
b) Aset Lain-lain	Rp	15.659.014.951,67	Rp	20.080.945.109,01
c) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	Rp	(5.886.541.064,67)	Rp	(8.416.928.737,67)
d) Aset Tak Berwujud	Rp	14.831.087.926,75	Rp	13.853.571.624,75
e) Amortisasi ATB	Rp	(11.270.006.930,00)	Rp	(9.388.412.198,00)

Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada **lampiran 21** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020.

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
--------	------------------	------------------

1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp **31.385.542.415,00** Rp **6.412.500.000,00**

Jumlah tersebut merupakan nilai aset Pemerintah Kota Denpasar berupa Tanah dan Bangunan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019. Rincian kemitraan dengan pihak ketiga sebagai berikut:

a) Pertokoan Jalan M.H Thamrin	Rp	6.412.500.000,00	Rp	6.412.500.000,00
b) Pinjam Pakai Kendaraan ke Desa	Rp	4.449.237.420,00	Rp	0,00
c) Pinjam Pakai Tanah Bangunan ke Desa	Rp	7.682.550.860,00	Rp	0,00
d) Pinjam Pakai Bangunan Kantor ke Desa	Rp	1.888.295.275,00	Rp	0,00
e) Pinjam Pakai Tanah Bangunan ke Organisasi Vertikal	Rp	268.414.860,00	Rp	0,00
f) Pinjam Pakai Kendaraan Ke Organisasi Vertikal dan Forkompinda	Rp	1.878.670.000,00	Rp	0,00
g) Pinjam Pakai Gedung Kantor Ke Organisasi Vertikal	Rp	3.270.874.000,00	Rp	0,00
h) Pinjam Pakai Kendaraan Ke Parum Pecalang dan Desa Adat	Rp	5.040.000.000,00	Rp	0,00
i) Pinjam Pakai Tanah ke Desa Pekraman	Rp	495.000.000,00	Rp	0,00

Catatan:

1. Penambahan senilai Rp24.478.042.415,00 merupakan Pinjam Pakai dari tahun TA 2016 sampai dengan T.A 2020 yang baru di inputkan di SIMDA BMD.
2. Penambahan senilai Rp495.000.000,00 merupakan reklasifikasi atas Aset Tetap Tanah yang Dipinjampakaikan ke Desa Pekraman Renon





Uraian		31 Desember 2020		31 Desember 2019	
2)	Aset Lain-Lain	Rp	15.659.014.951,67	Rp	20.080.945.109,01
Jumlah tersebut di atas merupakan jumlah aset lain-lain Pemerintah Kota Denpasar per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 yang terdiri dari:					
a.	Aset Rusak Berat	Rp	13.588.754.431,67	Rp	16.854.775.394,17
b.	Tanah Lain-lain	Rp	2.035.245.520,00	Rp	2.475.495.520,00
c.	DED yang aset induknya sudah diserahkan ke pihak lain	Rp	35.015.000,00	Rp	0,00
d.	Persediaan Kadaluarasa	Rp	0,00	Rp	750.674.194,84
a. Aset Rusak Berat					
Rincian penambahan dan pengurangan Aset Rusak Berat selama tahun 2020 adalah sebagai berikut.					
Saldo Awal per 1 Januari				Rp	16.854.775.394,17
Penambahan					
a)	Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin		Rp		6.523.439.886,00
b)	Reklasifikasi dari Gedung Bangunan		Rp		7.728.818.076,65
c)	Reklasifikasi dari Jalan, Jaringan dan Irigasi		Rp		51.007.000,00
d)	Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya		Rp		2.999.666.465,00
Jumlah Penambahan				Rp	17.302.931.427,65
Pengurangan					
a)	Reklasifikasi kembali ke Peralatan dan Mesin		Rp		6.690.000,00
b)	Penghapusan Peralatan dan Mesin rusak berat		Rp		9.408.588.373,50
c)	Penghapusan Gedung dan Bangunan rusak berat		Rp		8.072.873.076,65
d)	Penghapusan Jalan Irigasi dan Jaringan rusak berat		Rp		51.007.000,00
e)	Penghapusan Aset Tetap Lainnya Jaringan rusak berat		Rp		3.029.793.940,00
Jumlah Pengurangan				Rp	20.568.952.390,15
Saldo Akhir per 31 Desember 2019				Rp	13.623.769.431,67
b. Tanah Lain-Lain					
Tanah yang tercatat pada Aset Lain-lain merupakan tanah yang digunakan oleh entitas dibawah Pemerintah Kota Denpasar namun bukti kepemilikannya atas nama (sedang diproses oleh) Pihak lain yang dapat dirinci sebagai berikut.					
(a)	Tanah yang tercatat pada SD Negeri 10 Pemecutan di Desa Pemecutan		Rp		1.170.910.000,00
(b)	Tanah yang tercatat pada Puskesmas I Denpasar Utara di Desa Dangin Puri Kangin		Rp		137.540.000,00
(c)	Tanah yang tercatat pada Kelurahan Sumerta di Jl. WR Supratman		Rp		344.500.000,00
(d)	Tanah yang tercatat pada Kelurahan Kesiman di Jl. WR Supratman		Rp		362.700.000,00
(e)	Biaya sertifikasi tanah yang telah menjadi kewenangan Provinsi (SMA/SMK)		Rp		19.595.520,00
Total Tanah pada Aset Lain-Lain				Rp	2.035.245.520,00





Adapun rincian penambahan dan pengurangan yang terjadi selama tahun 2020 atas tanah yang tercatat pada aset lain-lain ini adalah sebagai berikut.

Saldo Awal per 1 Januari	Rp	2.475.495.520,00
Pengurangan		
(a) Penghapusan Tanah yang tercatat pada SD 1 Sumerta di Desa Sumerta	Rp	440.250.000,00
Jumlah Pengurangan	Rp	440.250.000,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2020	Rp	2.035.650.000,00

Catatan :

- Tanah yang tercatat pada SD 10 Pemecutan di Desa Pemecutan merupakan aset milik Puri Pemecutan
- Tanah yang tercatat pada Puskesmas I Denpasar Utara di Desa Dangin Puri Kangin merupakan aset milik Provinsi Bali
- Tanah yang tercatat pada Kelurahan Sumerta di Jl. WR Supratman merupakan aset milik Puri Kesiman
- Tanah yang tercatat pada Kelurahan Kesiman di Jl. WR Supratman merupakan aset milik Puri Kesiman

c. DED yang aset induknya sudah diserahkan ke pihak lain

Adapun rincian penambahan dan pengurangan yang terjadi selama tahun 2020 atas DED yang aset induknya sudah diserahkan ke pihak lain yang tercatat pada aset lain-lain ini adalah sebagai berikut.

Saldo Awal per 1 Januari	Rp	0,00
Penambahan:		
(a) Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	35.015.000,00
Jumlah Penambahan	Rp	35.015.000,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2020	Rp	35.015.000,00

Catatan:

Reklas dari Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun perolehan sebelum tahun 2020 berupa kegiatan rehabilitas gedung dan bangunan yang induknya telah diserahkan ke pihak lain pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

d. Persediaan Kadaluarsa

Adapun rincian penambahan dan pengurangan yang terjadi selama tahun 2020 atas DED yang aset induknya sudah diserahkan ke pihak lain yang tercatat pada aset lain-lain ini adalah sebagai berikut.

Saldo Awal per 1 Januari	Rp	750.674.194,84
Pengurangan:		
Penghapusan persediaan kadaluarsa Dinas Kesehatan	Rp	750.674.194,84
Jumlah Pengurangan	Rp	0,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2020	Rp	0,00

Catatan :

Penghapusan persediaan kadaluarsa sesuai Surat Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/910/HK/2020 tentang Penghapusan Barang Persediaan Milik Pemerintah Kota Denpasar pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar dari Daftar Barang Persediaan Milik Pemerintah Kota Denpasar.

Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada *lampiran 22* Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020.





	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
3)	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	Rp (5.886.541.064,67)	Rp (8.416.928.737,67)

	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
--	--------	------------------	------------------

4)	Aset Tak Berwujud	Rp 14.831.087.926,75	Rp 13.853.571.624,75
----	--------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tak Berwujud tahun 2020 dan 2019. Aset Tak Berwujud berupa *software* pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, RSUD Wangaya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Penanggulangan Bencana, Badan Perencanaan Pembangunan, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Capil, DP3AP2KB, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, Dinas Kebudayaan, Kesbangpol, Set. DPRD, Badan Pendapatan, Inspektorat, BPKSDM, Kecamatan, DPMPTSP, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kominfo, DPKP, Disparda, Disperindag, BPKAD dan Setda, yang terdiri dari:

Saldo Awal per 1 Januari **Rp 13.853.571.624,75** **Rp 13.066.577.874,75**

Penambahan:

(a) Reklas dari Belanja Modal KIB Lainnya Rp 932.984.302,00 Rp 875.763.750,00

(b) Reklas dari Belanja Barang dan Jasa Rp 14.500.000,00 Rp 117.700.000,00

(c) Reklas dari Belanja Barang dan Jasa Dibawah T.A 2020 Rp 13.380.000,00 Rp 0,00

(d) Reklas dari Belanja Tak Terduga Rp 150.000.000,00 Rp 0,00

Jumlah Penambahan **Rp 1.110.864.302,00** **Rp 993.463.750,00**

Pengurangan:

(a) Penghapusan Rp 133.348.000,00 Rp 113.520.000,00

(b) Reklas Keluar ke KIB Lainnya Rp 0.00 Rp 92.950.000,00

Jumlah Pengurangan **Rp 133.348.000,00** **Rp 206.470.000,00**

Saldo Akhir per 31 Desember **Rp 14.831.087.926,75** **Rp 13.853.571.624,75**

	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
--	--------	------------------	------------------

5)	Amortisasi Aset Tak Berwujud	Rp (11.270.006.930,00)	Rp (9.388.412.198,00)
----	-------------------------------------	-------------------------------	------------------------------

Jumlah tersebut merupakan Amortisasi Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kota Denpasar per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019.

Adapun rincian Penyusutan Aset Tetap, Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada **Lampiran 23** Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2020.





Uraian		31 Desember 2020		31 Desember 2019	
6.5.2 KEWAJIBAN	Rp	25.045.446.208,26	Rp	33.169.706.290,09	
1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	Rp	25.045.446.208,26	Rp	33.169.706.290,09	
1) Hutang PFK	Rp	67.115.799,00	Rp	6.320.610,00	
Jumlah tersebut merupakan jumlah belanja yang belum dibayarkan ke pihak ketiga dan menjadi kas pada Bendahara Pengeluaran tahun 2020 dan 2019, yang terdiri atas:					
a) uang beras dan simpanan wajib koperasi pada BPKAD	Rp	0,00	Rp	180.000,00	
b) kelebihan pengamprahan belanja BPJS bulan Desember 2019 pada DPMPTSP	Rp	0,00	Rp	6.140.610,00	
c) Belanja BPJS yang belum dibayarkan ke BPJS pada BRSU Wangaya	Rp	67.115.799,00	Rp	0,00	
2) Pendapatan Diterima Dimuka	Rp	1.485.734.128,35	Rp	2.096.200.553,11	
Jumlah tersebut merupakan jumlah Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2020 dan 2019, yang terdiri dari:					
a) Pendapatan Sewa Diterima Di Muka	Rp	126.730.000,00	Rp	152.950.000,00	
b) Pendapatan Diterima Di Muka Pajak Hotel	Rp	0,00	Rp	5.600.216,00	
c) Pendapatan Diterima Di Muka Pajak Restoran	Rp	237.613.065,00	Rp	776.822.982,00	
d) Pendapatan Diterima Di Muka Pajak Hiburan	Rp	0,00	Rp	14.411.000,00	
e) Pendapatan Diterima Di Muka Pajak Air Tanah	Rp	22.122	Rp	19.456,00	
f) Pendapatan Diterima Di Muka Pajak Reklame	Rp	791.478.941,35	Rp	1.146.396.899,11	
g) Pendapatan Diterima Di Muka Pajak BPHTB	Rp	329.890.000,00	Rp	0,00	
Rincian selengkapnya atas Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada <i>lampiran 24, lampiran 24a dan lampiran 24b</i> Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020.					
3) Hutang Belanja	Rp	23.492.596.280,91	Rp	31.067.185.126,98	
Jumlah tersebut merupakan jumlah Hutang Belanja tahun 2020 dan 2019 yang terdiri dari:					
a) Hutang Belanja Pegawai	Rp	5.780.328.110,00	Rp	11.880.234.132,00	
b) Hutang Belanja Barang/Jasa	Rp	7.656.813.820,67	Rp	5.924.156.343,80	
c) Hutang Belanja Persediaan	Rp	8.793.152.600,24	Rp	11.644.467.831,18	





d) Hutang Belanja Hibah	Rp	1.262.301.750,00	Rp	0,00
e) Hutang Belanja Modal	Rp	0,00	Rp	717.932.605,00
f) Hutang Belanja Transfer	Rp	0,00	Rp	900.394.215,00

Adapun rincian dari Hutang Belanja dapat dilihat pada ***lampiran 25*** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020, dan untuk rincian dari Hutang Listrik, Telepon dan Air dapat dilihat pada ***Lampiran 25a*** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020.

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
6.5.3. EKUITAS	Rp 6.272.728.211.150,50	Rp 6.196.323.480.708,77

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kota Denpasar yang merupakan selisih antara jumlah Aset dan Kewajiban per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019. Saldo Ekuitas di Neraca sama dengan saldo akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas.

6.6. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

6.6.1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus kas dari aktivitas operasi sampai dengan 31 Desember 2020 surplus sebesar Rp173.922.830.827,61. Jumlah tersebut merupakan jumlah kas bersih dari aktivitas operasi yaitu arus kas masuk aktivitas operasi dikurangi dengan arus kas keluar aktivitas operasi. Rincian arus kas dari aktivitas operasi sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	Rp 1.963.349.790.165,60	Rp 2.192.902.790.245,51
a. Penerimaan Pajak Daerah	Rp 489.692.369.902,61	Rp 800.355.727.648,55
b. Penerimaan Retribusi Daerah	Rp 29.183.790.708,00	Rp 33.161.961.523,00
c. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 56.572.597.030,60	Rp 45.521.727.968,30
d. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp 155.108.220.202,32	Rp 131.111.867.354,03
e. Penerimaan Bagi Hasil Pajak	Rp 85.712.138.834,00	Rp 61.039.184.579,00
f. Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp 788.276.289,00	Rp 590.155.800,00
g. Penerimaan Dana Alokasi Umum	Rp 619.582.547.000,00	Rp 677.033.111.000,00
h. Penerimaan Dana Alokasi Khusus	Rp 122.272.026.330,00	Rp 131.296.406.179,00
i. Penerimaan Dana Penyesuaian	Rp 85.367.717.000,00	Rp 18.878.781.000,00
j. Penerimaan Dana Desa	Rp 36.621.601.000,00	Rp 0,00
k. Penerimaan Hibah	Rp 112.331.786.553,91	Rp 61.115.544.028,96
l. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp 155.780.657.698,16	Rp 191.850.862.164,67





m. Penerimaan Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	Rp	14.336.061.617,00	Rp	6.197.000.000,00
n. Penerimaan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	Rp	0,00	Rp	34.750.461.000,00

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	Rp 1.789.426.959.337,99	Rp 1.961.612.703.615,75
a. Pembayaran Pegawai	Rp 747.920.479.236,00	Rp 809.371.496.020,78
b. Pembayaran Barang dan Jasa	Rp 697.596.172.310,88	Rp 826.430.741.592,13
c. Pembayaran Hibah	Rp 105.695.939.156,99	Rp 121.514.449.362,90
d. Pembayaran Bantuan Sosial	Rp 42.202.013.856,21	Rp 4.090.975.000,00
e. Pembayaran Bantuan Keuangan	Rp 114.007.687.200,00	Rp 122.324.571.266,94
f. Pembayaran Tidak Terduga	Rp 34.287.080.777,91	Rp 35.242.373,00
g. Pembayaran Bagi Hasil	Rp 47.717.586.800,00	Rp 77.845.228.000,00
3) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp 173.922.830.827,61	Rp 231.290.086.629,76

6.6.2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus kas dari aktivitas investasi sampai dengan 31 Desember 2020 defisit sebesar Rp(98.544.565.888,62). Jumlah tersebut merupakan jumlah kas bersih dari aktivitas investasi yaitu arus kas masuk aktivitas investasi dikurangi dengan arus kas keluar aktivitas investasi. Rincian arus kas dari aktivitas investasi sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1) Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Investasi	Rp 704.303.062,00	Rp 628.197.204,00
Arus Kas Masuk dari aktivitas investasi selama tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:		
a. Pencairan Dana Cadangan	Rp 0,00	Rp 0,00
b. Penjualan atas Tanah	Rp 0,00	Rp 0,00
c. Penjualan atas Peralatan dan Mesin	Rp 704.303.062,00	Rp 628.197.204,00
d. Penjualan atas Gedung dan Bangunan	Rp 0,00	Rp 0,00
e. Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 0,00	Rp 0,00
f. Penjualan Aset Tetap Lainnya	Rp 0,00	Rp 0,00
g. Penjualan Aset Lainnya	Rp 0,00	Rp 0,00
h. Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	Rp 0,00	Rp 0,00





Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
2) Arus Kas Keluar Dari Rp 99.248.868.950,62 Rp 317.861.867.360,62 Aktivitas Investasi		
Arus Kas keluar dari aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan kegiatan investasi berupa pengadaan aset selama tahun 2020 dan 2019. Jumlah tersebut terdiri dari:		
a. Pembentukan Dana Rp 0,00 Rp 0,00		
Cadangan		
b. Perolehan Tanah Rp 317.580.840,00 Rp 70.204.840,00		
c. Perolehan Peralatan dan Rp 39.301.750.223,61 Rp 80.377.733.062,91		
Mesin		
d. Perolehan Bangunan dan Rp 29.449.362.418,00 Rp 118.026.241.990,26		
Gedung		
e. Perolehan Jalan, Irigasi, dan Rp 12.677.346.957,01 Rp 85.526.273.950,45		
Jaringan		
f. Perolehan Aset Tetap Rp 13.380.112.070,00 Rp 9.699.628.371,00		
Lainnya		
g. Perolehan Aset Lainnya Rp 0,00 Rp 0,00		
h. Penyertaan Modal Rp 4.122.716.442,00 Rp 24.161.785.146,00		
Pemerintah Daerah		
i. Pengeluaran Pembelian Rp 0,00 Rp 0,00		
Investasi Non Permanen		
3) Arus Kas Bersih dari Rp (98.544.565.888,62) Rp (317.233.670.156,62) Aktivitas Investasi		

6.6.3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus kas dari aktivitas pendanaan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan jumlah kas bersih dari aktivitas pendanaan yaitu arus kas masuk pendanaan dikurangi dengan arus kas keluar pendanaan. Rincian arus kas dari aktivitas pendanaan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1) Arus Kas Masuk dari Rp 0,00 Rp 0,00 Aktivitas Pendanaan		
Arus Kas Masuk dari aktivitas pendanaan selama tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:		
a. Pinjaman Dalam Negeri - Rp 0,00 Rp 0,00		
Pemerintah Pusat		
b. Pinjaman Dalam Negeri - Rp 0,00 Rp 0,00		
Pemerintah Daerah Lainnya		
c. Pinjaman Dalam Negeri - Rp 0,00 Rp 0,00		
Lembaga Keuangan Bank		
d. Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Rp 0,00 Rp 0,00		
Perusahaan Negara		
e. Penerimaan Pembiayaan Rp 0,00 Rp 0,00		
Dana Bergulir		





Uraian		31 Desember 2020	31 Desember 2019
2)	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan	0,00 Rp	0,00
Arus Kas keluar dari kegiatan pendanaan dalam tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:			
a.	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00 Rp	0,00
b.	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00 Rp	0,00
c.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00 Rp	0,00
3)	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00 Rp	0,00

6.6.4. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus kas dari aktivitas transitoris sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp60.795.189,00. Jumlah tersebut merupakan jumlah kas bersih dari aktivitas transitoris yaitu arus kas masuk transitoris dikurangi dengan arus kas keluar transitoris. Rincian arus kas dari aktivitas transitoris sebagai berikut:

Uraian		31 Desember 2020	31 Desember 2019
1)	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris	41.413.299.528,00 Rp	41.368.819.016,00
a.	Arus kas masuk dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga/PFK tahun 2020 dan 2019 terdiri atas penerimaan:		
(1)	Tabungan Perumahan	323.438.000,00 Rp	507.712.000,00
(2)	Pajak Penghasilan Pasal 21	2.406.222.675,00 Rp	2.156.554.492,00
(3)	Potongan ASKES	1.879.272.781,00 Rp	8.363.413.735,00
(4)	BPJS Kesehatan	9.757.040.065,00 Rp	6.347.397,00
(5)	BPJS Tenaga Kerja	43.110.321,00 Rp	0,00
(6)	Penerimaan IWP 1%	2.920.738.399,00 Rp	5.580.084.242,00
(7)	Penerimaan IWP 8%	21.339.855.448,00 Rp	22.297.406.152,00
(8)	Potongan JKK	586.767.604,00 Rp	612.746.371,00
(9)	Potongan JKM	1.760.238.287,00 Rp	1.838.234.017,00
(10)	PFK Bendahara Pengeluaran	67.115.799,00 Rp	0,00
(11)	BPJS RSUD Wangaya	329.500.149,00 Rp	0,00
b.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00 Rp	6.320.610,00





Uraian		31 Desember 2020		31 Desember 2019	
2)	Arus Kas Keluwardari	Rp	41.352.504.339,00	Rp	41.362.498.406,00
	Aktivitas Transitoris				
a.	Arus kas keluar dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) tahun 2020 dan 2019 terdiri atas:				
	(1) Tabungan Perumahan	Rp	323.438.000,00	Rp	507.712.000,00
	(2) Pajak Penghasilan Pasal 21	Rp	2.406.222.675,00	Rp	2.156.554.492,00
	(3) Potongan ASKES	Rp	1.879.272.781,00	Rp	8.363.413.735,00
	(4) BPJS Kesehatan	Rp	9.757.040.065,00	Rp	6.347.397,00
	(5) BPJS Tenaga Kerja	Rp	43.110.321,00	Rp	0,00
	(6) Penerimaan IWP 1%	Rp	2.920.738.399,00	Rp	5.580.084.242,00
	(7) Penerimaan IWP 8%	Rp	21.339.855.448,00	Rp	22.297.406.152,00
	(8) Potongan JKK	Rp	586.767.604,00	Rp	612.746.371,00
	(9) Potongan JKM	Rp	1.760.238.287,00	Rp	1.838.234.017,00
	(10) PFK Bendahara Pengeluaran	Rp	6.320.610,00	Rp	0,00
	(11) BPJS RSUD Wangaya	Rp	329.500.149,00	Rp	0,00
b.	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	0,00	Rp	0,00
3)	Arus Kas Bersih dari	Rp	60.795.189,00	Rp	6.320.610,00
	Aktivitas Transitoris				

6.6.5. KENAIKAN/ (PENURUNAN) BERSIH KAS

Saldo Kenaikan/(Penurunan Bersih Kas tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian		31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas	Rp	75.439.060.127,99	Rp	(85.937.262.916,86)

6.6.6. SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS

Saldo awal kas dan setara kas tahun 2020 dan 2019 terdiri atas:

Uraian		31 Desember 2020		31 Desember 2019	
1)	Kas di Kas Daerah	Rp	226.175.517.105,65	Rp	305.116.730.715,48
2)	Kas di Bendahara BLUD RSUD Wangaya	Rp	119.425.537,13	Rp	6.131.585.742,72
3)	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	6.320.610,00	Rp	266.436.117,00
4)	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	16.183.000,00	Rp	5.144.000,00
5)	Kas di Bendahara FKTP	Rp	4.354.183.239,42	Rp	4.360.981.910,42
6)	Kas di Bendahara BOS	Rp	6.648.107.916,60	Rp	7.486.424.005,29
7)	Kas di Bendahara Dana Bergulir Koperasi dan LPD	Rp	110.372.772,21	Rp	70.606,96
	Jumlah Saldo Awal Kas dan Setara Kas	Rp	237.430.110.181,01	Rp	323.367.373.097,87





6.6.7. SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS

Saldo akhir kas dan setara kas tahun 2020 dan 2019 terdiri atas:

Uraian	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
1) Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas	Rp	75.439.060.127,99	Rp	(85.937.262.916,86)
2) Jumlah Saldo Awal Kas BUD dan BLUD	Rp	237.430.110.181,01	Rp	323.367.373.097,87
Jumlah Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	Rp	312.869.170.309,00	Rp	237.430.110.181,01

6.6.8. SALDO AKHIR KAS

Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
a. Kas di Kas Daerah	Rp	274.802.704.477,01	Rp	226.175.517.105,65
b. Kas di Bendahara BLUD RSUD Wangaya	Rp	23.305.081.922,87	Rp	119.425.537,13
c. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	67.115.799,00	Rp	6.320.610,00
d. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	15.147.000,00	Rp	16.183.000,00
e. Kas di Bendahara FKTP	Rp	3.308.176.246,42	Rp	4.354.183.239,42
f. Kas di Bendahara BOS	Rp	11.370.944.863,70	Rp	6.648.107.916,60
g. Kas di Bendahara Dana Bergulir Koperasi	Rp	0,00	Rp	26.515.143,75
h. Kas di Bendahara Dana Bergulir LPD	Rp	0,00	Rp	83.857.628,46
Jumlah Saldo Akhir Kas	Rp	312.869.170.309,00	Rp	237.430.110.181,01





BAB VII

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pada laporan keuangan Pemerintah Kota Denpasar tahun anggaran 2020 ini dilengkapi pula dengan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah (Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma, Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma, dan Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar tahun anggaran 2020. Entitas akuntansi di Pemerintah Kota Denpasar tahun 2020 sebanyak 38 Entitas (Perangkat Daerah) yang terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
2. Dinas Kesehatan
3. BLUD RSU Daerah Wangaya
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan
7. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
8. Satuan Polisi Pamong Praja
9. Dinas Sosial
10. Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
13. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15. Dinas Perhubungan
16. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
17. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
20. Dinas Kebudayaan
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
22. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
23. Dinas Pariwisata
24. Dinas Pertanian
25. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
26. Inspektorat
27. Badan Penelitian dan Pengembangan
28. Badan Pendapatan Daerah
29. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
30. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
31. Sekretariat Daerah
32. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
33. Sekretariat DPRD





34. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
35. Kecamatan Denpasar Barat
36. Kecamatan Denpasar Timur
37. Kecamatan Denpasar Selatan
38. Kecamatan Denpasar Utara

Pengungkapan Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Pada awal Maret tahun 2020 dunia mengalami suatu pandemik yaitu *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)* yang mempengaruhi tatanan kehidupan baik sosial, ekonomi, politik di seluruh dunia termasuk Indonesia. Provinsi Bali khususnya Kota Denpasar termasuk salah satu daerah yang harus menerapkan suatu pola baru dalam kehidupan sehari-hari untuk memutus mata rantai dari penyebaran *COVID-19* ini. Pemerintahan mengalami suatu perubahan seiring kebijakan pusat yang harus diikuti oleh daerah. Adapun beberapa hal yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2020 adalah:

1. Terhadap potensi ketertagihan piutang Pemerintah Kota Denpasar yang material kepada pihak ketiga yang kelangsungan usahanya terganggu sebagai dampak dari pandemi *COVID-19* adalah sebagai berikut:
 - a. Atas piutang pajak dengan memperhatikan kondisi pandemi *COVID-19*, saat ini terjadi pelemahan ekonomi. Dengan memahami kondisi wajib pajak, upaya penagihan secara aktif tetap dilakukan melalui mediasi melalui telepon dan penyampaian surat pemberitahuan dan surat teguran sebagai bentuk himbauan untuk melunasi pembayaran pajak daerah yang lancar maupun tertunggak, disamping melakukan penagihan langsung dengan memberdayakan dan mengintensifkan tim validasi penagihan piutang pajak daerah secara maksimal *by name by address* dengan bekerja sama dengan kepala lingkungan setempat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Upaya lainnya yang dilakukan adalah memberikan keringanan pembayaran PBB-P2 secara otomatis tanpa mengajukan permohonan untuk tahun tertentu serta perpanjangan jatuh tempo pembayaran dan bebas denda pajak PBB-P2 sampai dengan 31 Desember 2020;
 - b. Atas piutang retribusi akan selalu dilakukan koordinasi dengan pihak yang diajak kerja sama dengan Wajib Retribusi serta dilakukan upaya penagihan dengan menyurati yang bersangkutan disamping melakukan penagihan langsung dengan memperhatikan protokol kesehatan.
2. Terhadap hutang-hutang yang belum terbayar, rencana akan dianggarkan di APBD Perubahan tahun 2021 sesuai ketersediaan dana. Apabila tidak bisa dianggarkan pada APBD Perubahan, maka akan dianggarkan pada APBD Induk Tahun 2022.
3. Untuk rencana program penanganan krisis di Pemerintah Kota Denpasar adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam rangka penanganan krisis di tingkat pemerintah daerah maka Pemerintah Kota Denpasar menetapkan 5 tujuan dalam penanganan krisis pandemik *COVID-19*, antara lain:
 - 1) Memutuskan dan mencegah penyebaran *COVID-19*;





- 2) Mengurangi dampak sosial;
 - 3) Menjaga stabilitas dan ketertiban;
 - 4) Memperkuat kesehatan mental masyarakat;
 - 5) Penanganan dampak ekonomi.
- b. Untuk mencapai tujuan tersebut diatas dapat diuraikan sasaran masing-masing tujuan sebagai berikut:
- 1) Memutus dan mencegah penyebaran *COVID-19* dilakukan dengan beberapa upaya:
 - a) Melakukan promosi, preventif, kuratif dan rehabilitatif seperti melakukan penyuluhan kepada masyarakat;
 - b) Dalam penanganan kasus, pemerintah melakukan *tracking, tracing, dan treatment* untuk mencegah penyebarluasan kasus positif;
 - c) Meningkatkan intervensi medis dengan indikator jumlah kasus positif yang meninggal;
 - 2) Mengurangi dampak sosial dilakukan dengan sasaran memberikan bantuan sosial kepada masyarakat dengan indikator persentase masyarakat terdampak yang memperoleh bantuan sosial.
 - 3) Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban dengan sasaran meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban dengan indikator jumlah pelanggaran protokol kesehatan yang diterbitkan. Upaya yang dilakukan antara lain:
 - a) Melakukan sosialisasi pencegahan *COVID-19* kepada masyarakat Kota Denpasar;
 - b) Memberikan edukasi mengenai penanganan *COVID-19* kepada masyarakat Kota Denpasar;
 - c) Melakukan Penertiban Yustisial dan Non Yustisial terhadap masyarakat yang masih melakukan pelanggaran protokol pencegahan *COVID-19*;
 - d) Melakukan pengamanan pada rumah singgah/karantina;
 - 4) Memperkuat kesehatan mental masyarakat dilakukan dengan sasaran meningkatkan pelayanan/konseling kesehatan mental masyarakat indikator jumlah masyarakat penerima layanan kesehatan mentalnya membaik yang dilakukan pada setiap puskesmas.
 - 5) Penanganan dampak ekonomi dilakukan dengan sasaran:
 - a) Menurunkan angka pengangguran khususnya masyarakat yang terdampak *COVID-19* dengan indikator angka pengangguran;
 - b) Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan dengan indikator angka inflasi di bidang pangan;
 - c) Aktivasi aktifitas perekonomian dengan indikator jumlah UMKM meningkat, prosentase jumlah usaha yang beroperasi normal dan menjalankan protokol kesehatan.
- c. Program/kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan serta sasaran tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut:
- 1) Intervensi kesehatan: menyediakan rumah sakit rujukan untuk pasien terinfeksi *COVID-19*, melengkapi sarana dan prasarana pelayanan terhadap masyarakat yang terinfeksi *COVID-19*;





- 2) Intervensi sosial: melakukan sosialisasi, penyemprotan desinfektan, pembatasan kegiatan masyarakat, *Work From Home*, sekolah *online*, protokol kesehatan terhadap dunia usaha dan pembatasan terhadap jam operasional, serta pemasangan tempat cuci tangan di tempat-tempat umum, menyediakan rumah singgah;
- 3) Bantuan sosial yang diberikan berupa:
 - a) Pemberian sembako kepada warga berdampak *COVID-19* berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebanyak satu kali per keluarga dan kepada warga yang melakukan isolasi mandiri per Kartu Tanda Penduduk setiap menjalankan isolasi mandiri;
 - b) Memberikan bantuan langsung tunai kepada karyawan yang dirumahkan atau yang di-PHK sebesar Rp600.000,00 sebanyak 1 kali;
 - c) memberikan bantuan langsung tunai kepada keluarga/pekerja yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan akibat bencana non alam *Virus Corona Disease (COVID-19)*, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), BLT Dana Desa dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit/kronis serta keluarga miskin yang tercecer dari pendataan Organisasi Perangkat Daerah sebesar Rp600.000,00 selama 3 bulan.





BAB VIII PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020. Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta dapat memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

WALIKOTA DENPASAR

JAYA NEGARA





PEMERINTAH KOTA DENPASAR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN

Desember 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN - LRA	1.947.478.202.444,12	1.964.054.093.227,60	100,85	2.193.530.987.449,51
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	654.920.213.449,58	731.261.280.905,53	111,66	1.010.779.481.697,88
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	448.400.000.000,00	489.692.369.902,61	109,21	800.355.727.648,55
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	28.775.868.000,00	29.183.790.708,00	101,42	33.161.961.523,00
1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	56.725.345.449,58	56.572.597.030,60	99,73	45.521.727.968,30
1.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	121.019.000.000,00	155.812.523.264,32	128,75	131.740.064.558,03
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	1.178.171.318.994,54	1.120.461.025.768,16	95,10	1.121.635.961.722,67
1.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA	853.287.029.452,00	828.354.988.453,00	97,08	869.958.857.558,00
1.2.2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	121.989.318.000,00	121.989.318.000,00	100,00	53.629.242.000,00
1.2.3.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	186.130.058.542,54	155.780.657.698,16	83,69	191.850.862.164,67
1.2.4.	Bantuan Keuangan - LRA	16.764.913.000,00	14.336.061.617,00	85,51	6.197.000.000,00
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	114.386.670.000,00	112.331.786.553,91	98,20	61.115.544.028,96
1.3.1.	Pendapatan Hibah - LRA	114.386.670.000,00	112.331.786.553,91	98,20	61.115.544.028,96
2.	BELANJA	2.019.054.001.573,13	1.722.827.837.846,61	85,33	2.055.142.986.563,43
2.1.	BELANJA OPERASI	1.794.098.119.339,96	1.593.414.604.560,08	88,81	1.761.407.661.975,81
2.1.1.	Belanja Pegawai	819.560.096.023,55	747.920.479.236,00	91,26	809.371.496.020,78
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	792.271.428.974,41	697.596.172.310,88	88,05	826.430.741.592,13
2.1.5.	Belanja Hibah	130.607.619.342,00	105.695.939.156,99	80,93	121.514.449.362,90
2.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	51.658.975.000,00	42.202.013.856,21	81,69	4.090.975.000,00
2.2.	BELANJA MODAL	101.168.786.870,82	95.126.152.508,62	94,03	293.700.082.214,62
2.2.1.	Belanja Modal Tanah	544.000.000,00	317.580.840,00	58,38	70.204.840,00
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.739.774.824,86	39.301.750.223,61	91,96	80.377.733.062,91
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.566.222.873,80	29.449.362.418,00	96,35	118.026.241.990,26
2.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	12.913.948.163,16	12.677.346.957,01	98,17	85.526.273.950,45
2.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.404.841.009,00	13.380.112.070,00	92,89	9.699.628.371,00
2.3.	BELANJA TAK TERDUGA	123.787.095.362,35	34.287.080.777,91	27,70	35.242.373,00
2.3.1.	Belanja Tak Terduga	123.787.095.362,35	34.287.080.777,91	27,70	35.242.373,00
3.	TRANSFER	161.725.274.000,00	161.725.274.000,00	100,00	200.169.799.266,94
3.1.	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	47.717.586.800,00	47.717.586.800,00	100,00	77.845.228.000,00
3.1.1.	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	47.717.586.800,00	47.717.586.800,00	100,00	77.845.228.000,00
3.2.	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	114.007.687.200,00	114.007.687.200,00	100,00	122.324.571.266,94
3.2.2.	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	112.682.101.000,00	112.682.101.000,00	100,00	121.760.322.643,94
3.2.3.	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.325.586.200,00	1.325.586.200,00	100,00	564.248.623,00
	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER	2.180.779.275.573,13	1.884.553.111.846,61	86,42	2.255.312.785.830,37

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS/(DEFISIT)	(233.301.073.129,01)	79.500.981.380,99	(34,08)	(61.781.798.380,86)
4.	<u>PEMBIAYAAN</u>	233.301.073.129,01	233.301.073.129,01	100,00	299.205.587.951,87
4.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	237.423.789.571,01	237.423.789.571,01	100,00	323.367.373.097,87
4.1.1.	Penggunaan SiLPA	237.423.789.571,01	237.423.789.571,01	100,00	323.367.373.097,87
4.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.122.716.442,00	4.122.716.442,00	100,00	24.161.785.146,00
4.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	4.122.716.442,00	4.122.716.442,00	100,00	24.161.785.146,00
	PEMBIAYAAN NETTO	233.301.073.129,01	233.301.073.129,01	100,00	299.205.587.951,87
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	312.802.054.510,00	-	237.423.789.571,01

SIPKD
MODUL CORE SYSTEM

WALIKOTA DENPASAR

JAYA NEGARA



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2020 dan 2019

URAIAN	2020	2019
Saldo Anggaran Lebih Awal	237.423.789.571,01	323.367.373.097,87
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	237.423.789.571,01	323.367.373.097,87
Subtotal	0,00	0,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	312.802.054.510,00	237.423.789.571,01
Subtotal	312.802.054.510,00	237.423.789.571,01
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Lain-lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	312.802.054.510,00	237.423.789.571,01

SIPKD
MODUL CORE SYSTEM

WALIKOTA DENPASAR

JAYA NEGARA



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 DAN 2019

(Dalam rupiah)

URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
<u>KEGIATAN OPERASIONAL</u>				
<u>PENDAPATAN - LO</u>	1.997.231.738.329,04	2.283.725.980.036,58	286.494.241.707,54)	(12.55)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	786.073.805.608,10	1.034.333.176.976,93	(248.259.371.368,83)	(24.00)
Pendapatan Pajak Daerah - LO	550.681.615.655,91	833.964.554.436,64	(283.282.938.780,73)	(33.97)
Pajak Hotel - LO	62.892.915.388,49	201.284.645.347,36	(138.391.729.958,87)	(68.75)
Hotel - LO	59.278.243.571,37	188.289.562.438,00	(129.011.318.866,63)	(68.52)
Gubuk Pariwisata - LO	2.474.633.032,82	10.492.115.250,74	(8.017.482.217,92)	(76.41)
Pondok Wisata	1.140.038.784,30	2.502.967.658,62	(1.362.928.874,32)	(54.45)
Pajak Restoran - LO	97.595.687.868,66	160.010.391.803,08	(62.414.703.934,42)	(39.01)
Restoran - LO	61.317.279.252,71	88.113.503.440,26	(26.796.224.187,55)	(30.41)
Rumah Makan - LO	28.372.493.008,05	56.261.592.995,32	(27.889.099.987,27)	(49.57)
Kafetaria - LO	3.589.684.073,60	5.864.396.351,00	(2.274.712.277,40)	(38.79)
Bar - LO	914.383.796,30	2.494.027.448,50	(1.579.643.652,20)	(63.34)
Jasa Boga/ Katering - LO	2.082.598.419,00	4.664.198.241,00	(2.581.599.822,00)	(55.35)
Pusat Penjualan Makanan	1.319.249.319,00	2.612.673.327,00	(1.293.424.008,00)	(49.51)
Pajak Hiburan - LO	9.558.268.888,66	25.177.732.422,30	(15.619.463.533,64)	(62.04)
Pameran - LO	9.800.000,00	28.750.000,00	(18.950.000,00)	(65.91)
Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan sejenisnya - LO	2.935.167.872,00	5.491.187.672,00	(2.556.019.800,00)	(46.55)
Permainan Biliar, Golf, Bowling - LO	52.014.993,60	104.734.887,00	(52.719.893,40)	(50.34)
Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan - LO	1.618.432.939,40	4.076.086.237,00	(2.457.653.297,60)	(60.29)
Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (fitnes center) - LO	1.316.507.564,66	3.421.485.885,30	(2.104.978.320,64)	(61.52)
Kolam Renang - LO	129.639.401,00	364.667.577,00	(235.028.176,00)	(64.45)
Pajak Hiburan.	(293.147.041,20)	613.096.065,80	(906.243.107,00)	(147.81)
Gelanggang Rekreasi Olah Raga	386.222.546,20	705.061.144,20	(318.838.598,00)	(45.22)
Gelanggang Seni	3.358.785.616,00	10.221.033.840,00	(6.862.248.224,00)	(67.14)

URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Taman Rekreasi	44.844.997,00	151.629.114,00	(106.784.117,00)	(70.42)
Pajak Reklame - LO	1.653.621.390,10	771.110.255,90	882.511.134,20	114.45
P a j a k R e k l a m e Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LO	1.653.621.390,10	771.110.255,90	882.511.134,20	114.45
Pajak Penerangan Jalan - LO	96.917.837.846,00	95.535.189.555,00	1.382.648.291,00	1.45
Pajak Penerangan Jalan sumber lain - LO	96.917.837.846,00	95.535.189.555,00	1.382.648.291,00	1.45
Pajak Parkir - LO	6.627.157.907,00	9.137.910.424,00	(2.510.752.517,00)	(27.48)
Pajak Parkir - LO	6.627.157.907,00	9.137.910.424,00	(2.510.752.517,00)	(27.48)
Pajak Air Tanah - LO	7.878.418.381,00	10.947.297.185,00	(3.068.878.804,00)	(28.03)
Pajak Air Tanah. - LO	7.878.418.381,00	10.947.297.185,00	(3.068.878.804,00)	(28.03)
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	140.048.000.079,00	138.097.568.367,00	1.950.431.712,00	1.41
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO	140.048.000.079,00	138.097.568.367,00	1.950.431.712,00	1.41
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	127.509.707.907,00	193.002.709.077,00	(65.493.001.170,00)	(33.93)
BPHTB - Pemindahan Hak - LO	127.509.707.907,00	193.002.709.077,00	(65.493.001.170,00)	(33.93)
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	29.246.589.983,00	33.225.525.463,00	(3.978.935.480,00)	(11.98)
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	2.897.203.100,00	4.977.696.500,00	(2.080.493.400,00)	(41.80)
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO.	2.897.203.100,00	4.977.696.500,00	(2.080.493.400,00)	(41.80)
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	2.935.531.000,00	2.852.638.000,00	82.893.000,00	2.91
Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah - LO	2.935.531.000,00	2.852.638.000,00	82.893.000,00	2.91
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	3.767.679.000,00	3.124.995.000,00	642.684.000,00	20.57
Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LO	21.832.000,00	43.800.000,00	(21.968.000,00)	(50.16)
Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus - LO	47.720.000,00	32.735.000,00	14.985.000,00	45.78
Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus - LO	70.018.000,00	101.610.000,00	(31.592.000,00)	(31.09)
Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO	2.395.404.000,00	1.899.990.000,00	495.414.000,00	26.07
Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LO	547.250.000,00	390.005.000,00	157.245.000,00	40.32
Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LO	397.537.000,00	290.575.000,00	106.962.000,00	36.81
Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Suburband - LO	122.335.000,00	252.700.000,00	(130.365.000,00)	(51.59)
Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Microlet - LO	5.724.000,00	1.800.000,00	3.924.000,00	218.00
Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban - Khusus - LO	2.339.000,00	3.755.000,00	(1.416.000,00)	(37.71)
Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban Tangki - LO	21.213.000,00	30.910.000,00	(9.697.000,00)	(31.37)

URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban - Kereta Tempelan - LO	4.360.000,00	3.150.000,00	1.210.000,00	38.41
Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban - Double Cabin - LO	13.832.000,00	8.230.000,00	5.602.000,00	68.07
Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban - Dump Truk - LO	56.356.000,00	39.895.000,00	16.461.000,00	41.26
Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban - Tronton - LO	61.759.000,00	25.840.000,00	35.919.000,00	139.01
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	91.866.650,00	21.513.800,00	70.352.850,00	327.01
Pengujian Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya - LO	91.866.650,00	21.513.800,00	70.352.850,00	327.01
Retribusi Terminal - LO	1.199.415.826,00	1.192.646.686,00	6.769.140,00	0.57
Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LO	3.961.000,00	7.956.000,00	(3.995.000,00)	(50.21)
Tempat Kegiatan Usaha - LO	233.106.186,00	189.771.046,00	43.335.140,00	22.84
Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal - LO	962.348.640,00	994.919.640,00	(32.571.000,00)	(3.27)
Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	263.670.000,00	374.280.000,00	(110.610.000,00)	(29.55)
Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong - LO	263.670.000,00	374.280.000,00	(110.610.000,00)	(29.55)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	12.077.049.407,00	15.587.730.477,00	(3.510.681.070,00)	(22.52)
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan - LO	12.077.049.407,00	15.587.730.477,00	(3.510.681.070,00)	(22.52)
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO	55.500.000,00	79.500.000,00	(24.000.000,00)	(30.19)
Pemberian Izin untuk Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO	55.500.000,00	79.500.000,00	(24.000.000,00)	(30.19)
Retribusi Izin Trayek - LO	235.000,00	635.000,00	(400.000,00)	(62.99)
Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LO	0,00	635.000,00	(635.000,00)	(100.00)
Pemberian Izin Trayek kepada Badan - LO	235.000,00	0,00	235.000,00	0.00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	5.958.440.000,00	5.013.890.000,00	944.550.000,00	18.84
Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LO	5.958.440.000,00	5.013.890.000,00	944.550.000,00	18.84
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	49.145.259.942,60	26.703.877.129,40	22.441.382.813,20	84.04
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO	49.145.259.942,60	26.703.877.129,40	22.441.382.813,20	84.04
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Tirta Sewakadarma- LO	4.195.379.354,00	25.593.143.009,15	(21.397.763.655,15)	(83.61)
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI - LO	44.945.769.902,60	0,00	44.945.769.902,60	0.00
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Pasar Sewakadarma - LO	0,00	1.110.734.120,25	(1.110.734.120,25)	(100.00)
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada PT Jamkrida- LO	4.110.686,00	0,00	4.110.686,00	0.00
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	157.000.340.026,59	140.439.219.947,89	16.561.120.078,70	11.79

URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	704.303.062,00	628.197.204,00	76.105.858,00	12.11
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin - LO	704.303.062,00	628.197.204,00	76.105.858,00	12.11
Penerimaan Jasa Giro - LO	5.100.584.781,94	6.676.040.909,90	(1.575.456.127,96)	(23.60)
Jasa Giro Kas Daerah - LO	5.100.584.781,94	6.676.040.909,90	(1.575.456.127,96)	(23.60)
Pendapatan Bunga - LO	4.562.500.000,03	8.531.250.000,00	(3.968.749.999,97)	(46.52)
Pendapatan Bunga Deposito - LO	4.562.500.000,03	8.531.250.000,00	(3.968.749.999,97)	(46.52)
Pendapatan Denda Pajak - LO	12.200.641.851,05	12.228.077.848,00	(27.435.996,95)	(0.22)
Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO	3.040.497.300,00	1.671.900.195,00	1.368.597.105,00	81.86
Pendapatan Denda Pajak Restoran - LO	1.803.552.169,05	1.049.428.302,00	754.123.867,05	71.86
Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LO	183.563.145,00	309.283.834,00	(125.720.689,00)	(40.65)
Pendapatan Denda Pajak Parkir - LO	309.977.394,00	179.871.852,00	130.105.542,00	72.33
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LO	249.883.217,00	101.569.175,00	148.314.042,00	146.02
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO	6.613.168.626,00	8.916.024.490,00	(2.302.855.864,00)	(25.83)
Pendapatan Denda Retribusi - LO	1.024.367.428,00	883.214.925,00	141.152.503,00	15.98
Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	1.020.899.560,00	874.574.800,00	146.324.760,00	16.73
Pendapatan Denda Retribusi Terminal - LO	3.467.868,00	6.516.677,00	(3.048.809,00)	(46.78)
Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	0,00	1.729.047,00	(1.729.047,00)	(100.00)
Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan - LO	0,00	394.401,00	(394.401,00)	(100.00)
Pendapatan BLUD - LO	114.699.696.168,59	92.263.343.641,84	22.436.352.526,75	24.32
Pendapatan Jasa Layanan Dari Masyarakat - LO	114.699.696.168,59	92.263.343.641,84	22.436.352.526,75	24.32
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO	18.708.246.734,98	19.229.095.419,15	(520.848.684,17)	(2.71)
Pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional dengan Kapitasi - LO	15.047.390.100,00	17.566.754.400,00	(2.519.364.300,00)	(14.34)
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya. - LO	0,00	1,37	(1,37)	(100.00)
Penerimaan Lain - Lain	3.641.446.634,98	1.624.361.017,78	2.017.085.617,20	124.18
Penggantian, Pembelian Stuk, Plat uji yang hilang / Rusak- LO	19.410.000,00	37.980.000,00	(18.570.000,00)	(48.89)
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	786.073.805.608,10	1.034.333.176.976,93	(248.259.371.368,83)	(24.00)
PENDAPATAN TRANSFER - LO	1.079.792.307.070,31	1.092.795.876.974,91	(13.003.569.904,60)	(1.19)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	828.354.988.453,00	876.539.127.558,00	(48.184.139.105,00)	(5.50)
Bagi Hasil Pajak - LO	85.712.138.834,00	61.039.184.579,00	24.672.954.255,00	40.42
Dana Bagi Hasil (DBH) dari Cukai Hasil Tembakau - LO	1.516.534.607,00	467.281.631,00	1.049.252.976,00	224.54

URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Dana Bagi Hasil (DBH) dari pajak bumi dan bangunan (PBB) - LO	3.788.111.420,00	60.571.902.948,00	(56.783.791.528,00)	(93.75)
Dana Bagi Hasil (DBH)-PPH	80.407.492.807,00	0,00	80.407.492.807,00	0.00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	788.276.289,00	590.155.800,00	198.120.489,00	33.57
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LO	788.276.289,00	590.155.800,00	198.120.489,00	33.57
Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	619.582.547.000,00	683.613.381.000,00	(64.030.834.000,00)	(9.37)
Dana Alokasi Umum - LO	619.582.547.000,00	683.613.381.000,00	(64.030.834.000,00)	(9.37)
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	11.870.536.132,00	25.251.621.082,00	(13.381.084.950,00)	(52.99)
DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LO	0,00	11.315.271.353,00	(11.315.271.353,00)	(100.00)
DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LO	0,00	798.287.856,00	(798.287.856,00)	(100.00)
DAK Bidang Pertanian - LO	0,00	687.286.000,00	(687.286.000,00)	(100.00)
DAK Bidang Pendidikan SD/SDLB - LO	2.584.995.000,00	904.914.500,00	1.680.080.500,00	185.66
DAK Bidang Kesehatan dan KB Pelayanan Dasar - LO	465.241.911,00	11.545.861.373,00	(11.080.619.462,00)	(95.97)
DAK Bidang Pendidikan SMP/SMPLB - LO	1.396.230.675,00	0,00	1.396.230.675,00	0.00
DAK Bidang SKB - LO	2.815.550.000,00	0,00	2.815.550.000,00	0.00
DAK Bidang Kesehatan dan KB Pelayanan Rujukan - LO	3.692.774.185,00	0,00	3.692.774.185,00	0.00
DAK Bidang Kesehatan dan KB Pelayanan Kefarmasian - LO	915.744.361,00	0,00	915.744.361,00	0.00
DAK Non Fisik - LO	105.845.717.362,00	101.603.197.137,00	4.242.520.225,00	4.18
Biaya Operasioanal PAUD	6.820.456.900,00	10.621.969.000,00	(3.801.512.100,00)	(35.79)
Sertifikasi Guru	74.557.243.000,00	78.782.953.900,00	(4.225.710.900,00)	(5.36)
Non Sertifikasi	0,00	567.000.000,00	(567.000.000,00)	(100.00)
Biaya Operasional Kesehatan	6.331.825.000,00	4.904.020.187,00	1.427.804.813,00	29.11
Akreditas Puskesmas	694.960.000,00	731.185.000,00	(36.225.000,00)	(4.95)
Jampersal	663.408.000,00	598.000.000,00	65.408.000,00	10.94
Bantuan Operasional Keluarga Berencana	826.282.000,00	1.022.647.000,00	(196.365.000,00)	(19.20)
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.068.740.664,00	1.329.422.050,00	739.318.614,00	55.61
BOP Pendidikan Kesetaraan	1.933.600.000,00	2.573.500.000,00	(639.900.000,00)	(24.86)
Peningkatan Kapasitas Koperasi Dan UKM	448.463.600,00	472.500.000,00	(24.036.400,00)	(5.09)
Pengawasan Obat Dan Makanan	247.615.000,00	0,00	247.615.000,00	0.00
Dana Pelayanan Kepariwisataaan	344.050.000,00	0,00	344.050.000,00	0.00
Dana Cadangan BOK Tambahan	10.909.073.198,00	0,00	10.909.073.198,00	0.00
DAK Penugasan	4.555.772.836,00	4.441.587.960,00	114.184.876,00	2.57

URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
DAK Penugasan Bidang Air Minum	0,00	1.512.257.360,00	(1.512.257.360,00)	(100.00)
DAK Penugasan Bidang Pasar	0,00	1.251.685.000,00	(1.251.685.000,00)	(100.00)
DAK Penugasan Bidang Lingkungan Hidup	0,00	373.890.000,00	(373.890.000,00)	(100.00)
Kesehatan Dan KB (Penurunan Stunting)	245.808.800,00	803.363.900,00	(557.555.100,00)	(69.40)
Kesehatan Dan KB (Pengendalian Penyakit)	3.933.214.036,00	500.391.700,00	3.432.822.336,00	686.03
DAK Penugasan Pertanian	376.750.000,00	0,00	376.750.000,00	0.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	85.367.717.000,00	18.878.781.000,00	66.488.936.000,00	352.19
Dana Penyesuaian - LO	85.367.717.000,00	18.878.781.000,00	66.488.936.000,00	352.19
Dana Insentif Daerah - LO	85.367.717.000,00	18.878.781.000,00	66.488.936.000,00	352.19
Bantuan Keuangan - LO	166.069.601.617,31	197.377.968.416,91	(31.308.366.799,60)	(15.86)
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO	14.336.061.617,00	6.197.000.000,00	8.139.061.617,00	131.34
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi - LO	14.336.061.617,00	6.197.000.000,00	8.139.061.617,00	131.34
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi - LO	151.733.540.000,31	191.180.968.416,91	(39.447.428.416,60)	(20.63)
Pendapatan bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor - LO	64.416.281.507,07	71.500.509.739,28	(7.084.228.232,21)	(9.91)
Pendapatan bagi hasil dari pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan - LO	191.938.593,74	239.291.338,33	(47.352.744,59)	(19.79)
Pendapatan bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor - LO	26.947.863.674,76	57.551.344.528,16	(30.603.480.853,40)	(53.18)
Pendapatan bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor - LO	26.929.965.322,74	35.552.856.387,49	(8.622.891.064,75)	(24.25)
Bagi Hasil Dari Pajak Rokok - LO	33.247.490.902,00	26.336.966.423,65	6.910.524.478,35	26.24
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER - LO	1.079.792.307.070,31	1.092.795.876.974,91	(13.003.569.904,60)	(1.19)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	131.365.625.650,63	156.596.926.084,74	(25.231.300.434,11)	(16.11)
Pendapatan Hibah - LO	131.339.405.650,63	156.570.706.084,74	(25.231.300.434,11)	(16.11)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	2.065.000.000,00	83.095.566.614,44	(81.030.566.614,44)	(97.51)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	2.065.000.000,00	83.095.566.614,44	(81.030.566.614,44)	(97.51)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	45.232.943.000,00	0,00	45.232.943.000,00	0.00
Pendapatan Hibah Pariwisata	45.232.943.000,00	0,00	45.232.943.000,00	0.00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO	0,00	445.683.000,00	(445.683.000,00)	(100.00)
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri.... - LO	0,00	445.683.000,00	(445.683.000,00)	(100.00)
Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LO	16.942.619.096,72	11.913.912.441,34	5.028.706.655,38	42.21
Pendapatan Hibah Dari Pihak Ketiga	16.942.619.096,72	11.913.912.441,34	5.028.706.655,38	42.21

URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Pendapatan Hibah Dana BOS-LO	67.098.843.553,91	61.115.544.028,96	5.983.299.524,95	9.79
Pendapatan Hibah Dana BOS-LO.	67.098.843.553,91	61.115.544.028,96	5.983.299.524,95	9.79
Pendapatan Lainnya - LO	26.220.000,00	26.220.000,00	0,00	0.00
Pendapatan Lainnya - LO	26.220.000,00	26.220.000,00	0,00	0.00
Pendapatan Lainnya - LO	26.220.000,00	26.220.000,00	0,00	0.00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	131.365.625.650,63	156.596.926.084,74	(25.231.300.434,11)	(16.11)
<u>POS LUAR BIASA</u>	0,00	0,00	0,00	0.00
<u>BEBAN</u>	1.986.923.058.804,16	2.244.823.529.956,16	(257.900.471.152,00)	(11.49)
BEBAN OPERASI - LO	1.853.332.736.989,17	2.066.436.669.081,99	(213.103.932.092,82)	(10.31)
Beban Pegawai - LO	745.584.609.854,00	809.354.049.356,78	(63.769.439.502,78)	(7.88)
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	461.438.975.604,00	487.164.432.847,78	(25.725.457.243,78)	(5.28)
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	286.202.033.159,00	298.470.179.844,78	(12.268.146.685,78)	(4.11)
Tunjangan Keluarga - LO	26.232.029.510,00	27.359.102.375,00	(1.127.072.865,00)	(4.12)
Tunjangan Jabatan - LO	8.583.115.003,00	9.326.398.159,00	(743.283.156,00)	(7.97)
Tunjangan Fungsional - LO	15.840.662.186,00	16.835.394.522,00	(994.732.336,00)	(5.91)
Tunjangan Fungsional Umum - LO	5.482.013.904,00	5.367.282.234,00	114.731.670,00	2.14
Tunjangan Beras - LO	12.708.733.902,00	13.340.704.048,00	(631.970.146,00)	(4.74)
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	2.408.260.692,00	2.121.738.571,00	286.522.121,00	13.50
Pembulatan Gaji - LO	3.551.655,00	3.845.458,00	(293.803,00)	(7.64)
Iuran Jaminan Kesehatan - LO	11.759.817.128,00	8.445.832.329,00	3.313.984.799,00	39.24
Uang Paket - LO	84.955.500,00	86.058.000,00	(1.102.500,00)	(1.28)
Tunjangan Badan Musyawarah - LO	11.601.450,00	11.784.150,00	(182.700,00)	(1.55)
Tunjangan Komisi - LO	55.266.750,00	51.247.350,00	4.019.400,00	7.84
Tunjangan Badan Anggaran - LO	23.385.600,00	21.482.475,00	1.903.125,00	8.86
Tunjangan Badan Kehormatan - LO	7.856.100,00	7.201.425,00	654.675,00	9.09
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya - LO	65.680.650,00	53.622.450,00	12.058.200,00	22.49
Tunjangan Perumahan - LO	17.274.720.000,00	17.495.640.000,00	(220.920.000,00)	(1.26)
Uang Jasa Pengabdian - LO	3.150.000,00	419.265.000,00	(416.115.000,00)	(99.25)
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD - LO	393.120.000,00	393.120.000,00	0,00	0.00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	588.854.736,00	525.285.116,00	63.569.620,00	12.10
Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO	71.162.940.300,00	84.668.800.565,00	(13.505.860.265,00)	(15.95)

URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LO	780.500.000,00	226.500.000,00	554.000.000,00	244.59
Iuran Kecelakaan Kerja - LO	0,00	5.397.295,00	(5.397.295,00)	(100.00)
Iuran Jaminan Kematian - LO	1.766.727.379,00	1.592.379.299,00	174.348.080,00	10.95
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	0,00	336.172.182,00	(336.172.182,00)	(100.00)
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	236.774.756.805,00	266.460.753.150,00	(29.685.996.345,00)	(11.14)
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO	61.886.525.000,00	178.047.357.500,00	(116.160.832.500,00)	(65.24)
Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja - LO	17.759.324.950,00	0,00	17.759.324.950,00	0.00
Tambahan Penghasilan Obyektif Lainnya - LO	1.313.175.000,00	29.950.001.250,00	(28.636.826.250,00)	(95.62)
Tambahan Penghasilan Pegawai - LO	155.815.731.855,00	55.932.844.400,00	99.882.887.455,00	178.58
Santunan Bendahara - LO	0,00	1.498.300.000,00	(1.498.300.000,00)	(100.00)
Tunjangan Khusus / Penyimpan Pengurus Barang - LO	0,00	403.200.000,00	(403.200.000,00)	(100.00)
Tunjangan Khusus	0,00	629.050.000,00	(629.050.000,00)	(100.00)
Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	17.368.321.416,00	30.843.790.226,00	(13.475.468.810,00)	(43.69)
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD - LO	7.835.100.000,00	7.938.000.000,00	(102.900.000,00)	(1.30)
Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH - LO	981.301.416,00	1.423.571.600,00	(442.270.184,00)	(31.07)
Beban Jasa Pelayanan Medik - LO	0,00	12.655.666.626,00	(12.655.666.626,00)	(100.00)
Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD	6.611.520.000,00	7.518.252.000,00	(906.732.000,00)	(12.06)
Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD	1.940.400.000,00	1.308.300.000,00	632.100.000,00	48.31
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	15.449.940.000,00	23.858.200.000,00	(8.408.260.000,00)	(35.24)
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel - LO	3.060.990.000,00	7.034.500.000,00	(3.973.510.000,00)	(56.49)
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran - LO	3.569.062.500,00	5.325.750.000,00	(1.756.687.500,00)	(32.98)
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan - LO	484.987.500,00	546.750.000,00	(61.762.500,00)	(11.30)
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame - LO	43.537.500,00	60.750.000,00	(17.212.500,00)	(28.33)
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir - LO	202.500.000,00	197.437.500,00	5.062.500,00	2.56
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah - LO	189.337.500,00	395.887.500,00	(206.550.000,00)	(52.17)
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	2.907.900.000,00	5.267.025.000,00	(2.359.125.000,00)	(44.79)
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO	4.991.625.000,00	5.030.100.000,00	(38.475.000,00)	(0.76)
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	4.277.666.244,00	1.026.873.133,00	3.250.793.111,00	316.57
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan - LO	3.841.644.340,00	201.672.845,00	3.639.971.495,00	1,804.89
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	121.386.906,00	88.828.077,00	32.558.829,00	36.65

URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	0.00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal - LO	33.936.530,00	28.231.734,00	5.704.796,00	20.21
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan - LO	11.025.000,00	15.525.000,00	(4.500.000,00)	(28.99)
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan - LO	0,00	464.024.160,00	(464.024.160,00)	(100.00)
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO	0,00	2.605.371,00	(2.605.371,00)	(100.00)
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek - LO	13.668,00	23.396,00	(9.728,00)	(41.58)
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	268.129.800,00	225.625.050,00	42.504.750,00	18.84
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya	0,00	337.500,00	(337.500,00)	(100.00)
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Perangkat Daerah	10.274.949.785,00	0,00	10.274.949.785,00	0.00
Beban Jasa Pelayanan Medik - LO	10.274.949.785,00	0,00	10.274.949.785,00	0.00
Beban Barang dan Jasa	726.639.379.943,47	861.932.428.480,27	(135.293.048.536,80)	(15.70)
Beban Bahan Pakai Habis	92.257.052.555,81	106.778.701.510,55	(14.521.648.954,74)	(13.60)
Beban Persediaan alat tulis kantor	6.587.868.701,00	11.289.622.030,40	(4.701.753.329,40)	(41.65)
Beban Persediaan dokumen/administrasi tender	0,00	26.020.600,00	(26.020.600,00)	(100.00)
Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.208.615.875,00	2.801.583.401,50	(592.967.526,50)	(21.17)
Beban Persediaan perangkat, materai dan benda pos lainnya	420.368.000,00	490.744.000,00	(70.376.000,00)	(14.34)
Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.579.543.010,00	2.520.996.925,00	(941.453.915,00)	(37.34)
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	3.087.270.350,00	4.119.352.900,00	(1.032.082.550,00)	(25.05)
Beban Persediaan pengisian tabung pemadam kebakaran	51.887.400,00	110.089.000,00	(58.201.600,00)	(52.87)
Beban Persediaan pengisian isi tabung gas	53.410.000,00	74.815.150,00	(21.405.150,00)	(28.61)
Beban Belanja Aci - aci dan sesajen	17.716.821.500,00	25.160.279.200,00	(7.443.457.700,00)	(29.58)
Beban Belanja Penghargaan/Hadiah	580.473.996,00	2.238.324.900,00	(1.657.850.904,00)	(74.07)
Beban Materi Pameran	24.300.000,00	111.010.000,00	(86.710.000,00)	(78.11)
Beban Bahan Pakai Habis Kantor untuk BOS	50.394.911.876,81	54.741.519.619,65	(4.346.607.742,84)	(7.94)
Beban Pengisian Air Isi Ulang	31.817.000,00	32.700.000,00	(883.000,00)	(2.70)
Beban Plat Segel	18.000.000,00	34.200.000,00	(16.200.000,00)	(47.37)
Beban Karangan Bunga	60.060.000,00	68.605.000,00	(8.545.000,00)	(12.46)
Beban Kebutuhan Rumah Tangga	1.548.905.684,00	1.595.879.564,00	(46.973.880,00)	(2.94)
Beban Belanja Bahan Pakai Habis Acara Walikota, Wakil Walikota, Sekretariat	746.415.000,00	1.142.255.000,00	(395.840.000,00)	(34.65)

URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Belanja Bahan Perlengkapan Dapur	78.067.000,00	96.890.200,00	(18.823.200,00)	(19.43)
Beban Belanja Bahan Vas Bunga	57.552.000,00	63.552.000,00	(6.000.000,00)	(9.44)
Beban Belanja Penanganan Darurat Bencana	2.993.552.336,00	51.639.000,00	2.941.913.336,00	5,697.08
Beban Ijin Reviter	8.402.166,00	8.141.020,00	261.146,00	3.21
Beban Belanja Timbangan	0,00	482.000,00	(482.000,00)	(100.00)
Beban Belanja Souvenir	164.672.375,00	0,00	164.672.375,00	0.00
Beban lain-lain - CSR	3.844.138.286,00	0,00	3.844.138.286,00	0.00
Beban Persediaan Bahan/ Material	32.894.376.971,43	97.760.221.111,88	(64.865.844.140,45)	(66.35)
Beban Persediaan bahan baku bangunan	1.000.000,00	16.819.000,00	(15.819.000,00)	(94.05)
Beban Persediaan bahan/bibit tanaman	2.539.846.625,00	2.315.404.800,00	224.441.825,00	9.69
Beban Persediaan bibit ternak	2.500.000,00	22.428.700,00	(19.928.700,00)	(88.85)
Beban Persediaan bahan obat-obatan	3.109.528.170,96	74.974.738.187,49	(71.865.210.016,53)	(95.85)
Beban Persediaan bahan kimia	6.158.578.730,18	5.028.414.801,68	1.130.163.928,50	22.48
Beban Persediaan Makanan Pokok	139.309.900,00	99.814.000,00	39.495.900,00	39.57
Beban Belanja Bahan Sembako	4.808.679.125,00	958.072.000,00	3.850.607.125,00	401.91
Beban Belanja Bahan Makanan Ternak - LO	103.606.800,00	142.919.250,00	(39.312.450,00)	(27.51)
Beban Belanja Bahan Alat Kerja	6.849.840.116,70	4.858.116.018,50	1.991.724.098,20	41.00
Beban Belanja Bahan Praktek Pelatihan	97.373.100,00	543.064.400,00	(445.691.300,00)	(82.07)
Beban Belanja Bahan Permainan Anak	46.726.000,00	9.975.000,00	36.751.000,00	368.43
Beban Belanja Bahan Perlengkapan Olah Raga	600.000,00	167.473.400,00	(166.873.400,00)	(99.64)
Beban Belanja Bahan Konveksi	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	0.00
Beban Belanja Bahan Penelitian	5.000.000,00	9.850.000,00	(4.850.000,00)	(49.24)
Beban Belanja Materi Promosi	334.619.800,00	539.527.500,00	(204.907.700,00)	(37.98)
Beban Belanja Bahan Materi Lomba	28.706.500,00	87.848.200,00	(59.141.700,00)	(67.32)
Beban Belanja Bahan Kembang Api	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0.00
Beban Belanja Bahan Material Pembuatan Jalan	4.539.934.607,70	6.798.983.065,00	(2.259.048.457,30)	(33.23)
Beban Belanja Bahan Alat Kerja Pelayanan Kesehatan	4.091.277.495,89	1.149.522.789,21	2.941.754.706,68	255.91
Beban Jasa Kantor	100.282.756.157,60	320.308.542.068,00	(220.025.785.910,40)	(68.69)
Beban Jasa telepon	1.390.612.538,00	1.384.752.431,00	5.860.107,00	0.42
Beban Jasa air	617.512.156,00	620.008.792,00	(2.496.636,00)	(0.40)
Beban Jasa listrik	23.563.750.084,00	24.583.142.850,00	(1.019.392.766,00)	(4.15)

URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang	0,00	5.528.000,00	(5.528.000,00)	(100.00)
Beban Jasa surat kabar/majalah	2.556.586.260,00	2.776.067.220,00	(219.480.960,00)	(7.91)
Beban Jasa kawat/faksimili/internet	971.372.000,00	750.086.000,00	221.286.000,00	29.50
Beban Jasa paket/pengiriman	36.201.800,00	212.183.300,00	(175.981.500,00)	(82.94)
Beban Jasa Sertifikasi	5.500.147,00	35.458.147,00	(29.958.000,00)	(84.49)
Beban Jasa Transaksi Keuangan	360.000,00	50.935.000,00	(50.575.000,00)	(99.29)
Beban Jasa Kebersihan	0,00	44.000,00	(44.000,00)	(100.00)
Beban Jasa Non Pegawai	45.186.358.226,00	231.156.632.236,00	(185.970.274.010,00)	(80.45)
Beban Jasa Transportasi dan Akomodasi	1.294.221.575,00	12.153.778.584,00	(10.859.557.009,00)	(89.35)
Beban Belanja Dokumentasi	217.601.000,00	457.992.700,00	(240.391.700,00)	(52.49)
Beban Belanja Dekorasi	1.532.213.250,00	4.711.423.193,00	(3.179.209.943,00)	(67.48)
Beban Jasa Publikasi	4.560.127.560,00	6.554.226.782,00	(1.994.099.222,00)	(30.42)
Beban Jasa Uji Sampel	147.330.000,00	559.241.000,00	(411.911.000,00)	(73.66)
Beban Jasa Portir	12.600.000,00	10.000.000,00	2.600.000,00	26.00
Beban Belanja Bandwidth	3.587.007.200,00	3.555.180.681,00	31.826.519,00	0.90
Beban Belanja BHP Frekuensi Radio	20.761.099,00	31.073.715,00	(10.312.616,00)	(33.19)
Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.996.144.000,00	9.373.630.000,00	(6.377.486.000,00)	(68.04)
Beban Jasa DSDP	2.610.000,00	5.618.000,00	(3.008.000,00)	(53.54)
Beban Uang Saku	378.120.000,00	3.073.200.000,00	(2.695.080.000,00)	(87.70)
Beban Jasa Pihak Ketiga	10.672.747.462,60	15.249.239.807,00	(4.576.492.344,40)	(30.01)
Beban Uang Harian	35.250.000,00	1.047.620.000,00	(1.012.370.000,00)	(96.64)
Beban Belanja Medical Chek Up	12.245.040,00	38.987.070,00	(26.742.030,00)	(68.59)
Beban Belanja Kontribusi	485.524.760,00	1.912.492.560,00	(1.426.967.800,00)	(74.61)
Beban Premi Asuransi	28.256.627.347,86	19.454.386.434,47	8.802.240.913,39	45.25
Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan	27.774.929.500,00	18.967.143.486,00	8.807.786.014,00	46.44
Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah	322.697.847,86	386.560.209,47	(63.862.361,61)	(16.52)
Beban Premi Asuransi Jiwa	1.200.000,00	882.739,00	317.261,00	35.94
Beban Premi Asuransi Pohon Penghijauan	99.800.000,00	99.800.000,00	0,00	0.00
Beban Premi Asuransi Usaha Tani Padi	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00	0.00
Beban Premi Asuransi Usaha Tani Sapi/Kerbau	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0.00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	44.181.475.366,00	55.225.051.258,00	(11.043.575.892,00)	(20.00)

URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Jasa Service	1.979.523.356,00	3.223.904.387,00	(1.244.381.031,00)	(38.60)
Beban Penggantian Suku Cadang	14.016.360.402,00	13.343.742.693,00	672.617.709,00	5.04
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	27.291.156.430,00	37.641.404.280,00	(10.350.247.850,00)	(27.50)
Beban Jasa KIR	22.578.280,00	12.461.200,00	10.117.080,00	81.19
Beban Pajak Kendaraan Bermotor	703.314.198,00	769.450.500,00	(66.136.302,00)	(8.60)
Beban Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	55.733.200,00	15.176.698,00	40.556.502,00	267.23
Beban Belanja Kelengkapan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor - LO	105.309.500,00	196.411.500,00	(91.102.000,00)	(46.38)
Beban Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi - LO	0,00	22.500.000,00	(22.500.000,00)	(100.00)
Beban Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0.00
Beban Cetak dan Penggandaan	10.100.255.180,00	16.746.697.697,80	(6.646.442.517,80)	(39.69)
Beban Cetak	7.011.143.019,00	11.956.005.164,80	(4.944.862.145,80)	(41.36)
Beban Penggandaan	1.538.081.786,00	2.300.092.873,00	(762.011.087,00)	(33.13)
Beban Fotocopy	1.454.168.250,00	2.276.628.160,00	(822.459.910,00)	(36.13)
Beban Penjilidan	96.862.125,00	213.971.500,00	(117.109.375,00)	(54.73)
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.017.120.304,00	5.886.089.469,34	3.131.030.834,66	53.19
Beban sewa rumah jabatan/rumah dinas	651.200.000,00	709.800.000,00	(58.600.000,00)	(8.26)
Beban sewa gedung/ kantor/tempat	5.370.110.304,00	1.574.600.833,34	3.795.509.470,66	241.05
Beban sewa ruang rapat/pertemuan	2.990.810.000,00	2.979.050.000,00	11.760.000,00	0.39
Beban sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas	2.000.000,00	14.000.000,00	(12.000.000,00)	(85.71)
Beban Belanja Sewa Stand Pameran	0,00	541.638.636,00	(541.638.636,00)	(100.00)
Beban Belanja Sewa toilet	3.000.000,00	54.000.000,00	(51.000.000,00)	(94.44)
Beban Belanja Sewa Tempat Air	0,00	13.000.000,00	(13.000.000,00)	(100.00)
Beban Sewa Sarana Mobilitas	260.250.000,00	1.131.611.000,00	(871.361.000,00)	(77.00)
Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	173.250.000,00	1.121.811.000,00	(948.561.000,00)	(84.56)
Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	0,00	3.800.000,00	(3.800.000,00)	(100.00)
Beban Sewa Kendaraan	87.000.000,00	6.000.000,00	81.000.000,00	1,350.00
Beban Sewa Alat Berat	117.941.200,00	0,00	117.941.200,00	0.00
Beban Sewa Eskavator	62.091.200,00	0,00	62.091.200,00	0.00
Beban Sewa Bulldoser	55.850.000,00	0,00	55.850.000,00	0.00
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.466.245.282,00	10.398.063.574,00	(5.931.818.292,00)	(57.05)
Beban sewa meja kursi	112.970.000,00	759.813.450,00	(646.843.450,00)	(85.13)

URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban sewa komputer dan printer	551.460.000,00	0,00	551.460.000,00	0.00
Beban sewa proyektor	25.000.000,00	133.000.000,00	(108.000.000,00)	(81.20)
Beban sewa generator	55.400.000,00	456.600.000,00	(401.200.000,00)	(87.87)
Beban sewa tenda	722.782.600,00	2.512.701.140,00	(1.789.918.540,00)	(71.23)
Beban sewa pakaian adat/tradisional	11.500.000,00	275.210.000,00	(263.710.000,00)	(95.82)
Beban Sewa Alat Studio	62.600.000,00	404.600.000,00	(342.000.000,00)	(84.53)
Beban sewa sound system	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(100.00)
Beban Belanja Sewa Sound system - LO	626.140.000,00	1.353.345.000,00	(727.205.000,00)	(53.73)
Beban Belanja Sewa Panggung	145.450.000,00	1.062.530.000,00	(917.080.000,00)	(86.31)
Beban Belanja Sewa Instalasi / Jaringan	868.597.182,00	1.380.890.484,00	(512.293.302,00)	(37.10)
Beban Sewa Alat-Alat Band	20.000.000,00	54.500.000,00	(34.500.000,00)	(63.30)
Beban Sewa Alat Gamelan	0,00	89.950.000,00	(89.950.000,00)	(100.00)
Beban Belanja Sewa Alat Komunikasi	137.061.500,00	136.311.500,00	750.000,00	0.55
Beban Belanja Sewa Lampu	101.500.000,00	514.615.000,00	(413.115.000,00)	(80.28)
Beban Belanja Sewa Tanaman Hias	663.134.000,00	917.085.000,00	(253.951.000,00)	(27.69)
Beban Belanja Sewa Karpet	15.150.000,00	49.562.000,00	(34.412.000,00)	(69.43)
Beban Belanja Sewa Kipas Angin	26.000.000,00	41.500.000,00	(15.500.000,00)	(37.35)
Beban Belanja Sewa Alat Praktek Galley Utility (Pelatihan Cuci Piring)	0,00	2.800.000,00	(2.800.000,00)	(100.00)
Beban Belanja Sewa Alat	192.050.000,00	7.700.000,00	184.350.000,00	2,394.16
Beban Belanja Sewa Perlengkapan Pentas	25.000.000,00	82.500.000,00	(57.500.000,00)	(69.70)
Beban Belanja Sewa Peralatan Olahraga	0,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(100.00)
Beban Belanja Sewa Partisi	39.750.000,00	77.750.000,00	(38.000.000,00)	(48.87)
Beban Sewa Software	55.700.000,00	24.000.000,00	31.700.000,00	132.08
Beban Sewa Laser	0,00	16.100.000,00	(16.100.000,00)	(100.00)
Beban Belanja Sewa Kamera	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0.00
Beban Sewa Tanah	0,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(100.00)
Beban Makanan dan Minuman	12.811.582.500,00	30.894.444.816,00	(18.082.862.316,00)	(58.53)
Beban makanan dan minuman rapat	2.697.092.500,00	5.922.170.000,00	(3.225.077.500,00)	(54.46)
Beban makanan dan minuman tamu	1.036.915.100,00	2.764.912.095,00	(1.727.996.995,00)	(62.50)
Beban makanan dan minuman pelatihan/sosialisasi	41.800.000,00	400.010.000,00	(358.210.000,00)	(89.55)
Beban Makan dan Minuman Untuk Kegiatan Upacara Agama - LO	388.700.000,00	785.900.000,00	(397.200.000,00)	(50.54)

URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Makan dan Minum Pasien	33.160.000,00	2.090.458.771,00	(2.057.298.771,00)	(98.41)
Beban Makan dan Minum Seminar	30.000.000,00	66.875.000,00	(36.875.000,00)	(55.14)
Beban Makan dan Minum Petugas Khusus	2.431.595.000,00	121.885.000,00	2.309.710.000,00	1,894.99
Beban Makan dan Minum Untuk Kegiatan Kesehatan Masyarakat	73.200.000,00	106.200.000,00	(33.000.000,00)	(31.07)
Beban Makan dan Minum Penanganan Tanggap Darurat	275.400.000,00	379.150.000,00	(103.750.000,00)	(27.36)
Beban Makan dan Minum Untuk Pelayanan Kepada Masyarakat	166.127.000,00	675.277.000,00	(509.150.000,00)	(75.40)
Beban Makan dan Minum Kegiatan	4.020.645.500,00	9.927.118.600,00	(5.906.473.100,00)	(59.50)
Beban Makan dan Minum Pembinaan dan Monitoring	332.825.000,00	1.198.075.000,00	(865.250.000,00)	(72.22)
Beban Makan dan Minum Peringatan Hari Jadi	87.250.000,00	217.925.000,00	(130.675.000,00)	(59.96)
Beban Makan dan Minum Parade	0,00	116.700.000,00	(116.700.000,00)	(100.00)
Beban Makan dan Minum Kegiatan Lomba	129.350.000,00	1.551.285.000,00	(1.421.935.000,00)	(91.66)
Beban Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan	291.025.000,00	1.202.765.000,00	(911.740.000,00)	(75.80)
Beban Makan dan Minum Pengamanan	98.925.000,00	70.595.000,00	28.330.000,00	40.13
Beban Makan dan Minum Tim	468.172.400,00	1.747.453.350,00	(1.279.280.950,00)	(73.21)
Belanja Makan dan Minum BinteK/Pelatihan	202.400.000,00	1.536.690.000,00	(1.334.290.000,00)	(86.83)
Beban Makanan dan Minuman Dalam Rangka Sidang Tipiring	5.000.000,00	13.000.000,00	(8.000.000,00)	(61.54)
Beban Makan dan Minum Dalam Rangka Penyelenggaraan dan Pembongkaran	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0.00
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	350.189.752,00	5.565.756.655,25	(5.215.566.903,25)	(93.71)
Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	29.779.292,00	231.158.980,00	(201.379.688,00)	(87.12)
Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	52.329.502,00	294.878.738,75	(242.549.236,75)	(82.25)
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	47.444.212,00	3.578.553.346,50	(3.531.109.134,50)	(98.67)
Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	106.445.000,00	492.616.400,00	(386.171.400,00)	(78.39)
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	49.509.900,00	98.089.000,00	(48.579.100,00)	(49.53)
Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	16.214.646,00	118.079.490,00	(101.864.844,00)	(86.27)
Beban Kelengkapan Pakaian Lapangan	5.800.000,00	173.001.700,00	(167.201.700,00)	(96.65)
Beban Belanja kelengkapan Atribut	42.667.200,00	579.379.000,00	(536.711.800,00)	(92.64)
Belanja Pakaian Kerja	957.681.750,00	4.029.993.020,00	(3.072.311.270,00)	(76.24)
Beban pakaian kerja lapangan	944.931.750,00	4.029.993.020,00	(3.085.061.270,00)	(76.55)
Beban Perlengkapan/Pakaian Tim Kerja	12.750.000,00	0,00	12.750.000,00	0.00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.229.181.500,00	6.906.191.800,00	(4.677.010.300,00)	(67.72)
Beban pakaian adat daerah	382.516.000,00	1.973.545.000,00	(1.591.029.000,00)	(80.62)

URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban pakaian batik tradisional	241.643.500,00	662.817.600,00	(421.174.100,00)	(63.54)
Beban pakaian olahraga	1.117.774.000,00	3.181.943.750,00	(2.064.169.750,00)	(64.87)
Beban Belanja Pakaian Peserta	0,00	31.200.000,00	(31.200.000,00)	(100.00)
Beban pakaian khusus UPT	0,00	38.984.550,00	(38.984.550,00)	(100.00)
Beban Pakaian Khusus	487.248.000,00	1.017.700.900,00	(530.452.900,00)	(52.12)
Beban Perjalanan Dinas	19.482.119.478,00	70.157.780.764,88	(50.675.661.286,88)	(72.23)
Beban perjalanan dinas dalam daerah	191.654.600,00	567.397.500,00	(375.742.900,00)	(66.22)
Beban perjalanan dinas luar daerah	19.290.464.878,00	61.473.818.364,88	(42.183.353.486,88)	(68.62)
Beban perjalanan dinas luar negeri	0,00	8.069.264.900,00	(8.069.264.900,00)	(100.00)
Beban Belanja Transportasi (Biaya Langsung Non Personil)	0,00	47.300.000,00	(47.300.000,00)	(100.00)
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	2.794.376.845,00	11.414.795.470,00	(8.620.418.625,00)	(75.52)
Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	1.493.544.535,00	9.678.531.110,00	(8.184.986.575,00)	(84.57)
Beban bimbingan teknis	1.300.832.310,00	1.736.264.360,00	(435.432.050,00)	(25.08)
Beban Belanja Pemeliharaan	16.830.133.131,00	28.415.469.551,28	(11.585.336.420,28)	(40.77)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	243.222.250,00	624.423.000,00	(381.200.750,00)	(61.05)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.358.145.763,00	7.029.569.030,00	(2.671.423.267,00)	(38.00)
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.131.107.000,00	5.142.023.222,00	(2.010.916.222,00)	(39.11)
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	31.800.000,00	24.464.317,00	7.335.683,00	29.99
Beban Pemeliharaan Instalasi Listrik/Jaringan Telekomunikasi	1.137.440.600,00	1.509.677.600,00	(372.237.000,00)	(24.66)
Beban Pemeliharaan Jalan	1.583.933.540,00	4.692.684.227,28	(3.108.750.687,28)	(66.25)
Beban Pemeliharaan Peralatan Kantor - LO	913.320.200,00	1.097.565.000,00	(184.244.800,00)	(16.79)
Beban Pemeliharaan Meubelair - LO	199.461.400,00	313.735.000,00	(114.273.600,00)	(36.42)
Beban Pemeliharaan Komputer	1.325.578.061,00	1.530.618.341,00	(205.040.280,00)	(13.40)
Beban Pemeliharaan Printer.	428.395.000,00	489.564.825,00	(61.169.825,00)	(12.49)
Beban Pemeliharaan Taman dan Tempat parkir.	1.583.721.217,00	2.592.342.185,00	(1.008.620.968,00)	(38.91)
Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Ukur	138.474.900,00	222.181.460,00	(83.706.560,00)	(37.67)
Beban Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga	427.777.800,00	602.420.259,00	(174.642.459,00)	(28.99)
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Laboratorium	28.197.600,00	74.564.100,00	(46.366.500,00)	(62.18)
Beban Pemeliharaan Buku / Perpustakaan	12.735.000,00	31.952.100,00	(19.217.100,00)	(60.14)
Beban Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	0,00	504.068.985,00	(504.068.985,00)	(100.00)
Beban Pemeliharaan Alat Gambelan	16.000.000,00	88.690.000,00	(72.690.000,00)	(81.96)

URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Pemeliharaan Program / Software	294.080.000,00	543.514.000,00	(249.434.000,00)	(45.89)
Beban Pemeliharaan Alat Berat	29.725.000,00	54.314.000,00	(24.589.000,00)	(45.27)
Beban Pemeliharaan Trash Track (Alat Penjaring Sampah)	299.897.000,00	485.624.000,00	(185.727.000,00)	(38.25)
Beban Pemeliharaan Papan Informasi	8.998.000,00	211.397.650,00	(202.399.650,00)	(95.74)
Beban Pemeliharaan Got	110.050.000,00	0,00	110.050.000,00	0.00
Beban Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi	528.072.800,00	550.076.250,00	(22.003.450,00)	(4.00)
Belanja Jasa Konsultansi	1.350.062.585,00	4.781.518.260,00	(3.431.455.675,00)	(71.76)
Beban Jasa Konsultansi Penelitian	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0.00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	592.228.190,00	1.472.745.365,00	(880.517.175,00)	(59.79)
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	9.000.000,00	11.056.000,00	(2.056.000,00)	(18.60)
Beban Jasa Konsultansi Pendataan	658.874.395,00	3.071.821.095,00	(2.412.946.700,00)	(78.55)
Beban Jasa Konsultansi Pembuatan/Perbaikan Aplikasi	29.960.000,00	225.895.800,00	(195.935.800,00)	(86.74)
Belanja Barang Dana Bos	2.700.000.000,00	2.685.000.000,00	15.000.000,00	0.56
Beban Barang Dana Bos	2.700.000.000,00	2.685.000.000,00	15.000.000,00	0.56
Beban Hibah Barang	10.547.983.847,44	(10.574.445.306,44)	21.122.429.153,88	(199.75)
Beban Hibah Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	(10.574.445.306,44)	10.574.445.306,44	(100.00)
Beban Hibah Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	10.547.983.847,44	0,00	10.547.983.847,44	0.00
Beban Barang dan Jasa BLUD	101.631.849.342,33	59.941.049.525,26	41.690.799.817,07	69.55
Beban Barang dan Jasa BLUD.	101.631.849.342,33	59.941.049.525,26	41.690.799.817,07	69.55
Beban Jasa Kesehatan	11.523.107.418,00	620.989.800,00	10.902.117.618,00	1.755.60
Beban Jasa Kesehatan - LO	10.908.531.018,00	0,00	10.908.531.018,00	0.00
Beban Jasa KLaim - LO	614.576.400,00	620.989.800,00	(6.413.400,00)	(1.03)
Beban Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	149.280.000,00	232.100.000,00	(82.820.000,00)	(35.68)
Beban Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)	149.280.000,00	232.100.000,00	(82.820.000,00)	(35.68)
Beban Belanja Hibah Uang	4.513.217.000,00	8.177.580.000,00	(3.664.363.000,00)	(44.81)
Beban Belanja Hibah uang untuk diberikan pada pihak ketiga (hadiah/prestasi)	48.000.000,00	863.000.000,00	(815.000.000,00)	(94.44)
Beban Belanja Hibah Uang untuk diberikan pada pihak masyarakat (Hadiah/Prestasi)	4.302.567.000,00	2.746.250.000,00	1.556.317.000,00	56.67
Beban Belanja Hadiah Uang untuk diberikan pada pihak masyarakat berbasis kompetisi (Hadiah/Prestasi)	162.650.000,00	4.568.330.000,00	(4.405.680.000,00)	(96.44)
Beban Honorarium PNS.	3.831.426.000,00	2.205.950.000,00	1.625.476.000,00	73.69
Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.661.400.000,00	1.404.600.000,00	256.800.000,00	18.28

URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Honorarium Tim Kegiatan	687.266.000,00	430.700.000,00	256.566.000,00	59.57
Beban Honorarium/Uang Saku (PNS)	0,00	10.500.000,00	(10.500.000,00)	(100.00)
Beban Honorarium Tim/Petugas Khusus	1.482.760.000,00	360.150.000,00	1.122.610.000,00	311.71
Beban Honorarium Non PNS.	213.103.088.430,00	2.788.890.000,00	210.314.198.430,00	7,541.14
Beban Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	8.124.827.000,00	702.150.000,00	7.422.677.000,00	1,057.14
Beban Honorarium (Non PNS)	197.384.506.430,00	1.886.640.000,00	195.497.866.430,00	10,362.22
Beban Honorarium Tim Kegiatan	340.000.000,00	98.350.000,00	241.650.000,00	245.70
Beban Honorarium Tim/Petugas Khusus	6.669.655.000,00	101.750.000,00	6.567.905.000,00	6,454.94
Beban Upah Kerja	161.700.000,00	0,00	161.700.000,00	0.00
Beban Honorarium Tenaga Implementor/Pendamping	422.400.000,00	0,00	422.400.000,00	0.00
Beban Hibah	141.896.198.905,99	123.339.099.362,90	18.557.099.543,09	15.05
Beban Hibah kepada Pemerintah	67.540.912.450,00	3.950.000.000,00	63.590.912.450,00	1,609.90
Beban Hibah kepada Pemerintah.	67.540.912.450,00	3.950.000.000,00	63.590.912.450,00	1,609.90
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya	9.944.140.000,00	1.824.650.000,00	8.119.490.000,00	444.99
Beban Hibah kepada Pemerintah Provinsi	9.944.140.000,00	0,00	9.944.140.000,00	0.00
Beban Hibah kepada Pemerintah Kota	0,00	1.824.650.000,00	(1.824.650.000,00)	(100.00)
Beban Hibah.	2.176.648.350,00	0,00	2.176.648.350,00	0.00
Beban Hibah..	2.176.648.350,00	0,00	2.176.648.350,00	0.00
Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi kemasyarakatan	49.966.782.635,99	93.754.703.800,00	(43.787.921.164,01)	(46.70)
Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi kemasyarakatan.	49.966.782.635,99	93.754.703.800,00	(43.787.921.164,01)	(46.70)
Beban Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	12.267.715.470,00	23.809.745.562,90	(11.542.030.092,90)	(48.48)
Beban Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat	8.650.452.700,00	3.217.248.299,86	5.433.204.400,14	168.88
Beban Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	3.288.801.770,00	16.517.298.227,37	(13.228.496.457,37)	(80.09)
Beban Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat.	328.461.000,00	4.050.199.035,67	(3.721.738.035,67)	(91.89)
Beban Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga (Hadiah)	0,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(100.00)
Beban Bantuan Sosial	42.202.013.856,21	4.090.975.000,00	38.111.038.856,21	931.59
Beban Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	42.202.013.856,21	4.090.975.000,00	38.111.038.856,21	931.59
Beban Bantuan Sosial kepada kepada Anggota / Kelompok Masyarakat.	42.202.013.856,21	4.090.975.000,00	38.111.038.856,21	931.59
Beban Penyusutan dan Amortisasi	158.450.475.567,12	237.389.798.359,76	(78.939.322.792,64)	(33.25)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	73.531.963.088,29	65.282.876.919,04	8.249.086.169,25	12.64

URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin.	73.531.963.088,29	65.282.876.919,04	8.249.086.169,25	12.64
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	15.431.064.205,00	18.288.916.033,00	(2.857.851.828,00)	(15.63)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan.	15.431.064.205,00	18.288.916.033,00	(2.857.851.828,00)	(15.63)
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	68.031.611.963,22	142.232.261.161,23	(74.200.649.198,01)	(52.17)
Beban Penyusutan Jalan,Irigasi dan Jaringan.	68.031.611.963,22	142.232.261.161,23	(74.200.649.198,01)	(52.17)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	2.014.942.732,00	1.963.383.860,00	51.558.872,00	2.63
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud.	2.014.942.732,00	1.963.383.860,00	51.558.872,00	2.63
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.971.281.251,61	2.112.493.422,20	(141.212.170,59)	(6.68)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya.	1.971.281.251,61	2.112.493.422,20	(141.212.170,59)	(6.68)
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	(2.530.387.673,00)	7.509.866.964,29	(10.040.254.637,29)	(133.69)
Beban Penyusutan Aset Lain-lain.	(2.530.387.673,00)	7.509.866.964,29	(10.040.254.637,29)	(133.69)
Beban Penyisihan Piutang	33.374.075.159,47	28.254.349.107,23	5.119.726.052,24	18.12
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	33.394.310.747,96	28.262.698.575,97	5.131.612.171,99	18.16
Beban Penyisihan Piutang Pajak	32.157.242.148,18	27.134.829.259,10	5.022.412.889,08	18.51
Beban Penyisihan Piutang Retribusi	63.801.017,50	60.782.864,20	3.018.153,30	4.97
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(58.113.582,21)	(168.055.217,10)	109.941.634,89	(65.42)
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.231.381.164,49	1.235.141.669,77	(3.760.505,28)	(0.30)
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	(20.235.588,49)	(3.349.468,74)	(16.886.119,75)	504.14
Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	(20.235.588,49)	(3.349.468,74)	(16.886.119,75)	504.14
Beban Penyisihan Dana Bergulir	0,00	(5.000.000,00)	5.000.000,00	(100.00)
Beban Penyisihan Dana Bergulir .	0,00	(5.000.000,00)	5.000.000,00	(100.00)
Beban Lain-lain	5.185.983.702,91	2.075.969.415,05	3.110.014.287,86	149.81
Beban Lain-lain	5.185.983.702,91	2.075.969.415,05	3.110.014.287,86	149.81
Beban Lain-lain	5.185.983.702,91	2.075.969.415,05	3.110.014.287,86	149.81
JUMLAH BEBAN OPERASI - LO	1.853.332.736.989,17	2.066.436.669.081,99	(213.103.932.092,82)	(10.31)
BEBAN TRANSFER	123.778.086.800,00	166.319.732.481,94	(42.541.645.681,94)	(25.58)
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	47.717.586.800,00	77.845.228.000,00	(30.127.641.200,00)	(38.70)
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	44.840.000.000,00	75.000.000.000,00	(30.160.000.000,00)	(40.21)
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan desa	44.840.000.000,00	75.000.000.000,00	(30.160.000.000,00)	(40.21)
Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	2.877.586.800,00	2.845.228.000,00	32.358.800,00	1.14
Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah desa	2.877.586.800,00	2.845.228.000,00	32.358.800,00	1.14

URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	76.060.500.000,00	87.009.861.643,94	(10.949.361.643,94)	(12.58)
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	76.060.500.000,00	87.009.861.643,94	(10.949.361.643,94)	(12.58)
Beban Alokasi Dana Desa	71.000.000.000,00	77.000.000.000,00	(6.000.000.000,00)	(7.79)
Beban Bantuan Keuangan	5.060.500.000,00	4.060.500.000,00	1.000.000.000,00	24.63
Beban Pemilihan Kepala Desa	0,00	5.949.361.643,94	(5.949.361.643,94)	(100.00)
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	1.464.642.838,00	(1.464.642.838,00)	(100.00)
Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik	0,00	1.464.642.838,00	(1.464.642.838,00)	(100.00)
Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik.	0,00	1.464.642.838,00	(1.464.642.838,00)	(100.00)
JUMLAH BEBAN TRANSFER	123.778.086.800,00	166.319.732.481,94	(42.541.645.681,94)	(25.58)
DEFISIT NON OPERASIONAL	9.812.235.014,99	12.067.128.392,23	(2.254.893.377,24)	(18.69)
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	6.219.700.480,15	11.984.845.722,13	(5.765.145.241,98)	(48.10)
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	6.219.700.480,15	11.984.845.722,13	(5.765.145.241,98)	(48.10)
Defisit Penjualan Aset Tanah - LO	0,00	198.762.000,00	(198.762.000,00)	(100.00)
Defisit Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya - LO	0,00	916.667,00	(916.667,00)	(100.00)
Defisit penghentian aset tetap	0,00	3.359.840.144,78	(3.359.840.144,78)	(100.00)
Defisit Penghentian Aset Lainnya	6.219.700.480,15	8.425.326.910,35	(2.205.626.430,20)	(26.18)
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	3.592.534.534,84	82.282.670,10	3.510.251.864,74	4,266.09
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	3.592.534.534,84	82.282.670,10	3.510.251.864,74	4,266.09
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	3.592.534.534,84	82.282.670,10	3.510.251.864,74	4,266.09
J U M L A H D E F I S I T N O N O P E R A S I O N A L	9.812.235.014,99	12.067.128.392,23	(2.254.893.377,24)	(18.69)
JUMLAH BEBAN	1.986.923.058.804,16	2.244.823.529.956,16	(257.900.471.152,00)	(11.49)
SURPLUS/DEFISIT LO	10.308.679.524,88	38.902.450.080,42	(28.593.770.555,54)	(73.50)



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(dalam rupiah)

URAIAN	Ref	TA 2020 (Rp)	Realisasi Audited TA 2019 (Rp)
Ekuitas Awal	6.4.1.	6.196.323.480.708,77	6.019.446.672.858,64
Surplus (Defisit) LO	6.4.2.	10.308.679.524,88	38.902.450.080,42
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	6.4.3.	66.096.050.916,85	137.974.357.769,71
Koreksi Aset Tetap Tanah		35.344.476.000,00	1.986.720.000,00
Koreksi Aset Tetap Peralatan dan Mesin		274.552.625,00	8.764.817.199,00
Koreksi Aset Tetap Gedung dan Bangunan		30.250.952.000,00	10.493.050.214,00
Koreksi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan		1.002.416.234,00	117.215.238.980,00
Koreksi Aset Tetap Lainnya		(860.115.492,00)	(206.510.035,00)
Koreksi KDP		(1.499.233.455,00)	391.350.000,00
Koreksi Aset Lain-Lain		(417.460.000,00)	428.961.120,61
Koreksi Aset Tak Berwujud		13.380.000,00	24.750.000,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		-	529.372.000,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		699.749.370,50	
Koreksi Penyertaan Modal		(0,15)	0,10
Koreksi Pendapatan Pajak Daerah		(19.403.857,50)	(751.359.104,00)
Koreksi Denda Pajak		19.807.223,00	-
Koreksi Dana Bergulir		-	(5.000.000,00)
Koreksi Hutang Belanja Modal		717.932.605,00	(717.902.605,00)
Koreksi Hutang Belanja Transfer		568.997.664,00	-
Koreksi Piutang Lain-Lain		-	40.000,00
Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka		-	(179.170.000,00)
Koreksi Barang Masuk Antar OPD		158.492.397.534,51	265.790.650.364,15
Koreksi Barang Keluar Antar OPD		(158.492.397.534,51)	(265.790.650.364,15)
Ekuitas Akhir	6.4.3.	6.272.728.211.150,50	6.196.323.480.708,77

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

WALIKOTA DENPASAR

JAYA NEGARA



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

Lampiran V : Peraturan Daerah
Nomor : 4 Tahun 2021
Tanggal : 28 Juli 2021

URAIAN	JUMLAH	
	2020	2019
1	2	3
ASET	6.297.773.657.358,76	6.229.493.186.998,86
ASET LANCAR	615.421.207.191,13	531.230.290.199,36
Kas dan Setara Kas	312.869.170.309,00	237.430.110.181,01
Kas di Kas Daerah	274.802.704.477,01	226.175.517.105,65
Kas di Kas Daerah	274.802.704.477,01	226.175.517.105,65
Kas di Bendahara Penerimaan	15.147.000,00	16.183.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan	15.147.000,00	16.183.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	67.115.799,00	6.320.610,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	67.115.799,00	6.320.610,00
Kas di BLUD	23.305.081.922,87	119.425.537,13
Kas di BLUD	23.305.081.922,87	119.425.537,13
Kas di Bendahara FKTP	3.308.176.246,42	4.354.183.239,42
Kas Bendahara JKN	3.308.176.246,42	4.354.183.239,42
Kas Lainnya	0	110.372.772,21
Kas Lainnya.	0	110.372.772,21
Kas BOS	11.370.944.863,70	6.648.107.916,60
Kas BOS.	11.370.944.863,70	6.648.107.916,60
Piutang Pendapatan	584.006.443.269,03	538.318.623.618,72
Piutang Pajak Daerah	544.074.834.875,61	483.689.239.404,57
Piutang Pajak Hotel	18.531.693.389,63	9.862.937.737,70
Piutang Pajak Restoran	8.501.524.712,15	4.648.002.592,84
Piutang Pajak Hiburan	1.973.125.244,51	2.280.683.285,71
Piutang Pajak Reklame	1.208.618.925,32	1.208.618.925,32
Piutang Pajak Parkir	1.328.873.000,00	723.529.600,00
Piutang Pajak Air Tanah	10.093.572.211,00	8.752.054.347,00
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	502.437.427.393,00	456.213.412.916,00
Piutang Retribusi	574.183.825,00	799.709.865,00
Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	69.600.000,00	69.600.000,00
Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0	234.772.753,00
Piutang Retribusi Izin Gangguan	0	53.552.562,00
Piutang Retribusi Kbersihan dari PDAM	219.361.000,00	220.895.000,00
Piutang Tempat Kegiatan Usaha	285.222.825,00	220.889.550,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	28.048.815.276,28	26.851.230.917,01
Piutang Denda Pajak	11.840.103.561,96	6.968.575.232,07
Piutang Denda Retribusi	5.697.247,00	14.457.417,00
Piutang BLUD	16.197.076.167,32	19.868.198.267,94
Piutang Retribusi BUMD	5.938.300,00	0
Piutang Deviden	287.968.105,25	11.910.684.547,40
Piutang Deviden PDAM.	0	11.622.716.442,15
Piutang Deviden PD Pasar	287.968.105,25	287.968.105,25
Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	11.020.641.186,89	15.067.758.884,74
Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi.	11.020.641.186,89	15.067.758.884,74

URAIAN	JUMLAH	
	2020	2019
1	2	3
Piutang Lainnya	1.302.696.991,00	1.302.696.991,00
Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.302.696.991,00	1.302.696.991,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian	1.302.696.991,00	1.302.696.991,00
Penyisihan Piutang	(326.696.488.027,97)	(293.620.777.809,50)
Penyisihan Piutang Pendapatan	(325.338.687.831,04)	(292.242.742.024,08)
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(317.932.901.217,11)	(285.775.659.068,93)
Penyisihan Piutang Retribusi	(335.100.326,00)	(559.624.623,50)
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(1.439.840,53)	(59.553.422,74)
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(7.069.246.447,40)	(5.847.904.908,91)
Penyisihan Piutang Lainnya	(1.302.696.991,00)	(1.302.696.991,00)
Penyisihan Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian	(1.302.696.991,00)	(1.302.696.991,00)
Penyisihan Piutang Bagi Hasil	(55.103.205,93)	(75.338.794,42)
Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	(55.103.205,93)	(75.338.794,42)
Beban Dibayar Dimuka	495.822.719,00	766.903.492,86
Beban Jasa Dibayar Dimuka	192.733.333,33	524.233.333,33
Beban Sewa Dibayar Dimuka	192.733.333,33	524.233.333,33
Biaya Asuransi Dibayar Dimuka	303.089.385,67	242.670.159,53
Biaya Asuransi Dibayar Dimuka.	303.089.385,67	242.670.159,53
Persediaan	43.443.561.931,07	47.032.733.725,27
Persediaan Bahan Pakai Habis	43.443.561.931,07	47.032.733.725,27
Persediaan.	43.443.561.931,07	47.032.733.725,27
INVESTASI JANGKA PANJANG	482.792.836.526,05	477.201.815.620,05
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
Dana Bergulir	3.661.000.000,00	3.661.000.000,00
Dana Bergulir	3.661.000.000,00	3.661.000.000,00
Penyisihan Dana Begulir	(161.000.000,00)	(161.000.000,00)
Penyisihan Dana Begulir.	(161.000.000,00)	(161.000.000,00)
Investasi Jangka Panjang Permanen	479.292.836.526,05	473.701.815.620,05
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	479.292.836.526,05	473.701.815.620,05
Penyertaan Modal Kepada BUMD	479.292.836.526,05	473.701.815.620,05
ASET TETAP	5.154.840.516.342,83	5.198.519.405.381,36
Tanah	3.415.823.621.669,40	3.422.551.298.899,40
Tanah Perkampungan	3.415.429.085.989,40	3.422.474.344.059,40
Tanah Kampung	36.750.000,00	36.750.000,00
Tanah.	3.415.392.335.989,40	3.422.437.594.059,40
Tanah Pengguna Lain	42.000.000,00	42.000.000,00
Tanah Pengguna Lain.....	42.000.000,00	42.000.000,00
Tanah Untuk Bangunan Gedung	352.535.680,00	34.954.840,00
Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	352.535.680,00	34.954.840,00
Peralatan dan Mesin	711.310.033.567,62	658.041.584.419,75
Alat-Alat Besar Darat	551.598.541.929,62	522.408.938.284,75
Asphal Equipment	99.825.000,00	99.825.000,00
Mesin Proses	1.581.415.000,00	0
Dump Truck	1.643.164.150,00	1.643.164.150,00
Peralatan dan mesin.	548.274.137.779,62	520.665.949.134,75
Alat-Alat Besar Apung	117.700.000,00	117.700.000,00
Kapal Tarik	117.700.000,00	117.700.000,00

URAIAN	JUMLAH	
	2020	2019
1	2	3
Alat-alat Bantu	6.517.048.900,00	6.160.725.900,00
Alat Penarik	18.955.000,00	13.755.000,00
Electric Generating Set	3.770.600.000,00	3.770.600.000,00
Pompa	292.806.500,00	177.683.500,00
Mesin Bor	7.950.000,00	3.600.000,00
Alat Pengolahan Air Kotor	490.000,00	490.000,00
Alat Potong Rumput	372.383.400,00	366.597.400,00
Tenda Knock Down	44.275.000,00	44.275.000,00
Gergaji Mesin	168.000.000,00	28.400.000,00
Pompa Air	106.389.000,00	61.625.000,00
Tangga	32.700.000,00	32.700.000,00
Peralatan dan Mesin Bak Sampah	1.661.000.000,00	1.661.000.000,00
Mesin Pencacah Sampah	41.500.000,00	0
Alat Angkutan Darat Bermotor	25.512.839.578,00	31.617.147.000,00
Kendaraan Bermotor Penumpang	2.966.649.000,00	11.287.769.000,00
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.049.662.580,00	6.009.750.000,00
Kendaraan Bermotor Khusus	17.979.392.998,00	12.917.293.000,00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.112.435.000,00	1.203.935.000,00
Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	404.700.000,00	198.400.000,00
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	496.540.000,00	323.180.000,00
Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	298.540.000,00	125.180.000,00
Container	198.000.000,00	198.000.000,00
Alat Angkut Apung Bermotor	75.950.000,00	75.950.000,00
Alat Angkut Apung Bermotor Khusus	75.950.000,00	75.950.000,00
Alat Bengkel Bermesin	137.400.000,00	137.400.000,00
Perkakas Pengangkat Bermesin	87.500.000,00	87.500.000,00
Perkakas Bengkel Kayu	49.900.000,00	49.900.000,00
Alat Bengkel Tak Bermesin	26.223.670,00	26.223.670,00
Perkakas Bengkel Service	17.973.670,00	17.973.670,00
Perkakas Standar (Standart Tool)	8.250.000,00	8.250.000,00
Alat Ukur	758.723.950,00	732.448.950,00
Alat Ukur universal	27.865.250,00	27.865.250,00
Alat Ukur Lainnya	713.183.700,00	704.583.700,00
Alat Timbangan/Blora	17.675.000,00	0
Alat Pengolahan	369.126.000,00	369.126.000,00
Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	23.800.000,00	23.800.000,00
Alat-Alat Peternakan	345.326.000,00	345.326.000,00
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	12.052.000,00	6.802.000,00
Alat Pemeliharaan Tanaman	8.400.000,00	5.900.000,00
Alat Penyimpanan	2.750.000,00	0
Alat Laboratorium	902.000,00	902.000,00
Alat Kantor	8.409.591.280,00	7.035.059.980,00
Mesin Tik	3.250.000,00	3.250.000,00
Mesin Hitung/Jumlah	5.000.000,00	5.000.000,00
Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	29.370.000,00	28.395.000,00
Alat Kantor Lainnya	570.420.500,00	342.424.500,00
Mesin Absensi	124.810.500,00	109.100.500,00

URAIAN	JUMLAH	
	2020	2019
1	2	3
Mesin Antrian	143.675.000,00	143.675.000,00
CCTV	1.206.354.220,00	902.034.220,00
Interkom (PABX)	378.374.850,00	358.929.850,00
Papan Visual Elektronik	37.543.000,00	37.543.000,00
Mesin Penghancur Kertas	10.200.000,00	10.200.000,00
White board	62.442.000,00	40.212.000,00
Air Conditioner (AC)	2.913.743.100,00	2.408.685.200,00
Filling Kabinet	303.601.500,00	250.802.900,00
Troli	10.640.000,00	10.640.000,00
Wireless	144.860.000,00	124.660.000,00
Meja Komputer	90.272.000,00	78.296.000,00
Wall Screen	184.460.200,00	184.460.200,00
Korden	270.889.850,00	217.206.350,00
Papan Informasi	309.657.000,00	292.307.000,00
Mesin Faximil	4.950.000,00	4.950.000,00
Mesin Tapping Box	745.747.585,00	745.747.585,00
Tempat Sampah	119.069.000,00	69.069.000,00
Exhaust Fan	7.805.000,00	3.500.000,00
GPS	16.500.000,00	16.500.000,00
Papan Nama Ruangan	14.010.000,00	14.010.000,00
Papan Struktur Organisasi	44.365.000,00	44.365.000,00
Brankas	17.000.000,00	17.000.000,00
Alat Barcode	3.485.800,00	0
Papan Nama Kantor	535.176.675,00	535.176.675,00
Mesin Fotocopy	25.000.000,00	25.000.000,00
Perlengkapan Kantor	15.918.500,00	11.920.000,00
Sketsel Pembatas Ruangan	61.000.000,00	0
Alat Rumah Tangga	11.616.399.250,00	10.038.880.600,00
Meubelair	8.780.240.000,00	8.088.334.250,00
Alat Pembersih	37.655.000,00	37.655.000,00
Alat Pendingin	34.005.000,00	25.825.000,00
Alat Dapur	51.244.200,00	45.244.200,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.038.873.550,00	546.524.350,00
Alat Pemadam Kebakaran	115.270.800,00	115.270.800,00
Televisi	641.991.600,00	490.783.600,00
Kipas Angin	76.255.700,00	24.669.000,00
Mesin Porporasi	221.767.100,00	221.767.100,00
Karpet	483.760.800,00	310.546.800,00
Water Heater	21.000.000,00	21.000.000,00
Vacum Cleaner	27.130.500,00	27.130.500,00
Air Cooler	9.200.000,00	9.200.000,00
Teralis Besi	30.180.000,00	30.180.000,00
Tempat Tidur	35.000.000,00	35.000.000,00
Tempat Pajangan Koran	1.600.000,00	0
Dispenser	1.475.000,00	0
Tower Air	9.750.000,00	9.750.000,00
Komputer	23.212.074.901,00	19.071.798.200,00

URAIAN	Jumlah	
	2020	2019
1	2	3
Komputer Unit/Jaringan	2.763.658.405,00	2.349.341.205,00
Personal Komputer	7.725.981.514,00	5.896.532.879,00
Peralatan Komputer Mainframe	510.538.300,00	500.782.500,00
Peralatan Personal Komputer	373.990.503,00	316.863.003,00
Peralatan Jaringan	1.569.349.497,00	1.170.535.497,00
Printer/Scanner	3.398.164.768,00	2.830.875.822,00
UPS/STABILIZER	652.739.176,00	626.943.776,00
Perangkat Layanan Informasi	87.796.200,00	29.796.200,00
Proyektor	761.553.000,00	626.863.000,00
Mainframe/Server	1.308.516.469,00	1.128.626.969,00
Aplikasi/Software	195.518.400,00	195.518.400,00
Komputer Note Book	3.707.153.979,00	3.242.004.259,00
Perlengkapan Komputer	157.114.690,00	157.114.690,00
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	7.285.490.562,00	6.229.010.262,00
Meja Kerja Pejabat	1.564.983.597,00	1.345.383.597,00
Meja Rapat Pejabat	438.146.800,00	388.246.800,00
Kursi Kerja Pejabat	1.114.626.119,00	945.423.219,00
Kursi Rapat Pejabat	730.418.000,00	606.453.000,00
Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	44.352.900,00	36.852.900,00
Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	773.455.286,00	670.266.286,00
Lemari dan Arsip Pejabat	2.574.462.860,00	2.191.339.460,00
Meja Front Office	45.045.000,00	45.045.000,00
Alat Studio	3.927.999.550,00	3.582.420.550,00
Peralatan Studio Visual	117.960.000,00	38.710.000,00
Peralatan Studio Video dan Film	44.950.000,00	44.950.000,00
Peralatan Computing	15.600.000,00	15.600.000,00
Peralatan Studio Audio	1.431.487.800,00	1.370.321.800,00
Camera	985.540.997,00	913.045.997,00
Tripod	22.115.000,00	19.115.000,00
Sound system	1.289.775.753,00	1.160.547.753,00
Alat Studio.	20.570.000,00	20.130.000,00
Alat Komunikasi	1.037.222.940,00	949.720.640,00
Alat Komunikasi Telephone	586.389.940,00	542.263.640,00
Alat Komunikasi Radio SSB	32.500.000,00	0
Alat Komunikasi Radio HF/FM	218.513.000,00	207.637.000,00
Alat Komunikasi Radio UHF	199.820.000,00	199.820.000,00
Peralatan Pemancar	101.477.000,00	101.477.000,00
Peralatan Antena UHF	37.280.000,00	37.280.000,00
Peralatan Translator UHF/VHF	15.000.000,00	15.000.000,00
Repeater	49.197.000,00	49.197.000,00
Alat Kedokteran	60.269.587.515,00	46.303.842.062,00
Alat Kedokteran Umum	46.697.810.524,00	46.093.689.874,00
Alat Kedokteran Gigi	577.870.096,00	165.213.188,00
Alat Farmasi	7.800.000,00	5.500.000,00
Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	36.275.876,00	33.239.000,00
Alat Kesehatan Anak	6.200.000,00	6.200.000,00
Alat Kedokteran Radiologi	12.580.521.019,00	0

URAIAN	Jumlah	
	2020	2019
1	2	3
Alat Kedokteran Jiwa	363.110.000,00	0
Alat Kesehatan	5.381.683.726,00	761.077.905,00
Alat Kesehatan Olahraga	68.275.000,00	68.275.000,00
Alat Kesehatan.	5.313.408.726,00	692.802.905,00
Unit-Unit Laboratorium	2.732.523.916,00	322.563.166,00
Alat Laboratorium Kimia Air	755.111.650,00	0
Alat Laboratorium Umum	983.590.800,00	0
Alat Laboratorium Kedokteran	6.492.500,00	6.492.500,00
Alat Laboratorium Kimia	175.933.666,00	152.783.666,00
Alat Laboratorium Hematologi	740.000,00	740.000,00
Alat Laboratorium Fisika	226.200.000,00	73.600.000,00
Alat Laboratorium Biologi	104.950.000,00	0
Alat Laboratorium Lainnya	479.505.300,00	88.947.000,00
Alat Peraga/Praktek Sekolah	179.670.000,00	153.670.000,00
Bidang Studi : Olah Raga	148.544.000,00	148.544.000,00
Alat Peraga Edukatif	31.126.000,00	5.126.000,00
Alat Keamanan dan Perlindungan	1.534.166.900,00	1.516.422.250,00
Alat Bantu Keamanan	6.900.000,00	6.900.000,00
Alat Perlindungan	982.618.650,00	964.874.000,00
Alat Bantu Lalu Lintas Darat dan Air	535.352.000,00	535.352.000,00
Tabung Pemadam Kebakaran	9.296.250,00	9.296.250,00
Gedung dan Bangunan	1.089.321.627.556,07	946.232.397.689,86
Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.088.959.686.856,07	946.044.941.689,86
Bangunan Gedung Kantor	17.939.239.174,24	13.015.948.591,24
Bangunan Gudang	47.890.000,00	47.890.000,00
Bangunan Gedung Instalasi	149.266.000,00	149.266.000,00
Bangunan Kesehatan	3.647.432.820,00	3.554.525.820,00
Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1.989.170.129,00	1.989.170.129,00
Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.346.223.949,44	3.346.223.949,44
Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	34.716.987.751,95	14.719.477.256,95
Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	80.300.000,00	0
Bangunan Gedung Garasi/Pool	57.770.000,00	57.770.000,00
Bangunan Gedung Pemotongan Hewan	299.682.200,00	299.682.200,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	11.450.239.725,00	11.038.738.725,00
Gedung dan Bangunan.	1.006.153.162.863,80	888.862.635.775,59
Konstruksi Pagar, Taman, Tempat Parkir dan Halaman	9.082.322.242,64	8.963.613.242,64
Rambu-Rambu	338.140.700,00	163.656.000,00
Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	76.096.000,00	76.096.000,00
Rambu Tidak Bersuar	214.844.700,00	87.560.000,00
Fasilitas Lalu Lintas	47.200.000,00	0
Kolam Ikan	23.800.000,00	23.800.000,00
Kolam Air Tawar	23.800.000,00	23.800.000,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.347.058.339.850,93	1.334.192.693.806,92
Jalan	122.451.196.989,98	111.000.561.112,97
Jalan Kabupaten/Kota	82.810.847.863,30	82.139.476.725,30
Jalan Desa	35.452.911.180,01	26.691.517.515,00
Jalan Khusus	2.190.099.899,00	1.153.680.539,00

URAIAN	JUMLAH	
	2020	2019
1	2	3
Pelengkap Jalan	121.400.000,00	121.400.000,00
Drainase Jalan	1.875.938.047,67	894.486.333,67
Jembatan	13.742.032.822,70	13.322.979.122,70
Jembatan Khusus	199.240.000,00	199.240.000,00
Jembatan Penyeberangan	197.435.000,00	197.435.000,00
Konstruksi Kanal Permukaan	12.871.655.822,70	12.452.602.122,70
Konstruksi Jembatan Diatas Air	473.702.000,00	473.702.000,00
Bangunan Air Irigasi	1.492.877.670,00	1.146.536.670,00
Bangunan irigasi	1.492.877.670,00	1.146.536.670,00
Bangunan Air Pasang Surut	1.206.185.327.039,47	1.205.997.027.952,47
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.206.185.327.039,47	1.205.997.027.952,47
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	158.895.000,00	0
Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	158.895.000,00	0
Instalasi Air Minum Bersih	2.217.545.148,78	2.093.295.148,78
Air Tanah Dalam	74.550.000,00	49.750.000,00
Air Bersih/Air Baku Lainnya	2.142.995.148,78	2.043.545.148,78
Instalasi Air Kotor	104.500.000,00	0
Instalasi Air Kotor	104.500.000,00	0
Instalasi Gardu Listrik	247.557.300,00	247.557.300,00
Instalasi Gardu Listrik Distribusi	53.757.300,00	53.757.300,00
Instalasi Pusat Pengatur Listrik	193.800.000,00	193.800.000,00
Jaringan Listrik	430.863.880,00	357.192.500,00
Jaringan Distribusi	93.707.000,00	65.774.500,00
Jaringan Listrik.	337.156.880,00	291.418.000,00
Jaringan Telepon	27.544.000,00	27.544.000,00
Jaringan Telepon Di atas Tanah	27.544.000,00	27.544.000,00
Aset Tetap Lainnya	62.418.055.645,91	65.594.080.572,91
Buku	234.210.530,00	222.830.700,00
Umum	18.115.400,00	18.115.400,00
Agama	25.740.300,00	25.740.300,00
Ilmu Sosial	12.500.000,00	12.500.000,00
Ilmu Bahasa	44.605.000,00	44.605.000,00
Matematika & Pengetahuan alam	17.400.000,00	17.400.000,00
Buku Seni dan Budaya	27.400.000,00	27.400.000,00
Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	27.400.000,00	27.400.000,00
Buku Ensiklopedia	32.300.000,00	32.300.000,00
Kamus Bahasa	17.370.000,00	17.370.000,00
Buku Perpustakaan	11.379.830,00	0
Barang-Barang Perpustakaan	600.771.160,00	600.771.160,00
Musik	600.771.160,00	600.771.160,00
Barang Bercorak Kebudayaan	651.400.000,00	633.900.000,00
Pahatan	3.720.000,00	3.720.000,00
Lukisan	90.415.000,00	90.415.000,00
Alat Kesenian	492.000.000,00	492.000.000,00
Maket dan Foto Dokumen	26.770.000,00	26.770.000,00
Permainan Anak	38.495.000,00	20.995.000,00
Alat Olah Raga Lainnya	22.737.000,00	22.737.000,00

URAIAN	JUMLAH	
	2020	2019
1	2	3
Alat olah raga lainnya	22.737.000,00	22.737.000,00
Tanaman	247.303.700,00	166.237.000,00
Tanaman Hias	245.989.700,00	164.923.000,00
Tanaman Obat dan Kosmetika	1.314.000,00	1.314.000,00
Aset tetap lainnya	60.661.633.255,91	63.947.604.712,91
Aset tetap lainnya.	60.661.633.255,91	63.947.604.712,91
Konstruksi Dalam Pengerjaan	73.222.188.252,78	170.746.361.624,78
Konstruksi Dalam Pengerjaan	73.222.188.252,78	170.746.361.624,78
Konstruksi Dalam Pengerjaan	73.222.188.252,78	170.746.361.624,78
Akumulasi Penyusutan	(1.544.313.350.199,88)	(1.398.839.011.632,26)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(500.427.491.225,31)	(435.611.773.627,02)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.	(500.427.491.225,31)	(435.611.773.627,02)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(174.450.919.838,67)	(162.254.173.006,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.	(174.450.919.838,67)	(162.254.173.006,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	(856.383.841.089,28)	(788.362.111.732,06)
Akumulasi Penyusutan Jalan,Irigasi dan Jaringan.	(856.383.841.089,28)	(788.362.111.732,06)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(13.051.098.046,62)	(12.610.953.267,18)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya.	(13.051.098.046,62)	(12.610.953.267,18)
ASET LAINNYA	44.719.097.298,75	22.541.675.798,09
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	31.385.542.415,00	6.412.500.000,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga.	31.385.542.415,00	6.412.500.000,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga..	31.385.542.415,00	6.412.500.000,00
Aset Tidak Berwujud	3.561.080.996,75	4.465.159.426,75
Aset Tidak Berwujud.	14.831.087.926,75	13.853.571.624,75
Aplikasi/Software	2.693.434.050,00	1.766.704.050,00
Aset Tidak Berwujud..	12.101.973.876,75	12.051.187.574,75
Software Berlisensi	35.680.000,00	35.680.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(11.270.006.930,00)	(9.388.412.198,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud.	(11.270.006.930,00)	(9.388.412.198,00)
Aset Lain-lain	9.772.473.887,00	11.664.016.371,34
Aset Lain-lain	15.659.014.951,67	20.080.945.109,01
Aset Lain-lain..	15.659.014.951,67	20.080.945.109,01
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(5.886.541.064,67)	(8.416.928.737,67)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain.	(5.886.541.064,67)	(8.416.928.737,67)
JUMLAH ASET	6.297.773.657.358,76	6.229.493.186.998,86
KEWAJIBAN	25.045.446.208,26	33.169.706.290,09
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	25.045.446.208,26	33.169.706.290,09
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	67.115.799,00	6.320.610,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) .	67.115.799,00	6.320.610,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)..	67.115.799,00	6.320.610,00
Pendapatan Diterima Dimuka	1.485.734.128,35	2.096.200.553,11
Pendapatan Diterima Dimuka.	1.485.734.128,35	2.096.200.553,11
Pendapatan Diterima Dimuka..	1.485.734.128,35	2.096.200.553,11
Utang Belanja	23.492.596.280,91	31.067.185.126,98
Utang Belanja Pegawai	5.780.328.110,00	11.880.234.132,00
Utang Belanja Pegawai..	5.780.328.110,00	11.880.234.132,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	16.449.966.420,91	17.568.624.174,98

URAIAN	JUMLAH	
	2020	2019
1	2	3
Utang Belanja Persediaan	8.793.152.600,24	11.644.467.831,18
Utang Belanja.	7.656.813.820,67	5.924.156.343,80
Utang Belanja Modal	0	717.932.605,00
Utang Belanja Modal.	0	717.932.605,00
Utang Belanja Hibah	1.262.301.750,00	0
Utang Belanja Hibah.	1.262.301.750,00	0
Utang Belanja Transfer	0	900.394.215,00
Utang Belanja Transfer.	0	900.394.215,00
JUMLAH KEWAJIBAN	25.045.446.208,26	33.169.706.290,09
EKUITAS	6.272.728.211.150,50	6.196.323.480.708,77
EKUITAS	6.272.728.211.150,50	6.196.323.480.708,77
Ekuitas	6.272.728.211.150,50	6.196.323.480.708,77
Ekuitas	6.196.323.480.708,77	6.196.323.480.708,77
Ekuitas	6.196.323.480.708,77	6.196.323.480.708,77
Surplus/Defisit - LO	10.308.679.524,88	0
Surplus/Defisit - LO	10.308.679.524,88	0
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	66.096.050.916,85	0
Koreksi Aset Lain-Lain	(417.460.000,00)	0
Koreksi Aset Tetap Tanah	35.344.476.000,00	0
Koreksi Aset Tetap Peralatan dan Mesin	274.552.625,00	0
Koreksi Gedung dan Bangunan	30.250.952.000,00	0
Koreksi Jalan Irigasi dan Jaringan	1.002.416.234,00	0
Koreksi Penyertaan Modal	(0,15)	0
Koreksi Pendapatan Pajak Daerah	(19.403.857,50)	0
Koreksi Aset Tidak Berwujud	13.380.000,00	0
Koreksi Aset Tetap Lainnya	(860.115.492,00)	0
Koreksi Konstruksi Dalam Pengerjaan	(1.499.233.455,00)	0
Koreksi Utang Belanja Modal	717.932.605,00	0
Koreksi Utang Belanja Transfer	568.997.664,00	0
Koreksi Pendapatan Denda Pajak	19.807.223,00	0
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	699.749.370,50	0
RK Mutasi Barang Masuk	158.492.397.534,51	0
RK Mutasi Barang Keluar	(158.492.397.534,51)	0
JUMLAH EKUITAS DANA	6.272.728.211.150,50	6.196.323.480.708,77
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	6.297.773.657.358,76	6.229.493.186.998,86



WALIKOTA DENPASAR

JAYA NEGARA



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1	2	3
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pajak Daerah	489.692.369.902,61	800.355.727.648,55
Penerimaan Retribusi Daerah	29.183.790.708,00	33.161.961.523,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	56.572.597.030,60	45.521.727.968,30
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	155.108.220.202,32	131.111.867.354,03
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	85.712.138.834,00	61.039.184.579,00
Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak	788.276.289,00	590.155.800,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	619.582.547.000,00	677.033.111.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	122.272.026.330,00	131.296.406.179,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	85.367.717.000,00	18.878.781.000,00
Penerimaan Dana Desa	36.621.601.000,00	0,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan Hibah	112.331.786.553,91	61.115.544.028,96
Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00
Penerimaan Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	155.780.657.698,16	191.850.862.164,67
Penerimaan Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	14.336.061.617,00	6.197.000.000,00
Penerimaan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	34.750.461.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas	1.963.349.790.165,60	2.192.902.790.245,51
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	747.920.479.236,00	809.371.496.020,78
Pembayaran Barang	697.596.172.310,88	826.430.741.592,13
Pembayaran Bunga	0,00	0,00
Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
Pembayaran Hibah	105.695.939.156,99	121.514.449.362,90
Pembayaran Bantuan Sosial	42.202.013.856,21	4.090.975.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	114.007.687.200,00	122.324.571.266,94
Pembayaran Tidak Terduga	34.287.080.777,91	35.242.373,00
Pembayaran Bagi Hasil	47.717.586.800,00	77.845.228.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	1.789.426.959.337,99	1.961.612.703.615,75
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	173.922.830.827,61	231.290.086.629,76
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan mesin	704.303.062,00	628.197.204,00
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Jalan, irigasi dan jaringan	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
Penjualan Peralatan / Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	704.303.062,00	628.197.204,00
Arus Keluar Kas		
Perolehan Tanah	317.580.840,00	70.204.840,00
Perolehan Peralatan dan mesin	39.301.750.223,61	80.377.733.062,91
Perolehan Gedung dan Bangunan	29.449.362.418,00	118.026.241.990,26
Perolehan Jalan, irigasi dan jaringan	12.677.346.957,01	85.526.273.950,45
Perolehan Aset Tetap Lainnya	13.380.112.070,00	9.699.628.371,00

URAIAN	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1	2	3
Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.122.716.442,00	24.161.785.146,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	99.248.868.950,62	317.861.867.360,62
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(98.544.565.888,62)	(317.233.670.156,62)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Masuk Kas		
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan - Dana Bergulir	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	0,00	0,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	41.413.299.528,00	41.362.498.406,00
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	6.320.610,00
Jumlah Arus Masuk Kas	41.413.299.528,00	41.368.819.016,00
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	41.352.504.339,00	41.362.498.406,00
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	41.352.504.339,00	41.362.498.406,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	60.795.189,00	6.320.610,00
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	75.439.060.127,99	(85.937.262.916,86)
Saldo Awal Kas BUD	237.430.110.181,01	323.367.373.097,87
Saldo Akhir Kas di BUD	312.869.170.309,00	237.430.110.181,01
Kas di BUD	274.802.704.477,01	226.175.517.105,65
Kas di BLUD	23.305.081.922,87	119.425.537,13
Kas di Bendahara Pengeluaran	67.115.799,00	6.320.610,00
Kas di Bendahara Penerimaan	15.147.000,00	16.183.000,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara JKN FKTP	3.308.176.246,42	4.354.183.239,42
Kas di Bendahara BOS	11.370.944.863,70	6.648.107.916,60
Kas Lainnya - Bunga Tabungan Dana Bergulir LPD	0,00	83.857.628,46
Kas Lainnya - Bunga Tabungan Dana Bergulir Koperasi	0,00	26.515.143,75
Saldo Akhir Kas	312.869.170.309,00	237.430.110.181,01